LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK SWADESA

2018

TIM PENYUSUN
BUKU KERJA KKN TEMATIK
SWADESA
2018

PELINDUNG
Rektor Universitas Trilogi
Dr. Aam Bastaman

PENANGGUNG-JAWAB
Kepala LPPM Universitas Trilogi
Dr. P. Setia Lenggono

KETUA KKN
Heny Agustin, S.P., M.Si.

PENYUNTING
Ratih Mahardika, S.T, M.Ds
Rossi Iskandar, S.Pd, M.Pd
Mufti Utama, S.Kom
Tuti Yani

KATA PENGANTAR

Program KKN SWADESA yang digagas Universitas Trilogi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendekatkan civitas akademika khususnya Mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta yang akan menempuh mata kuliah KKN sebagai mata kuliah wajib Universitas. Program KKN SWADESA merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Trilogi dalam mengejawantahkan Visi Mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian dalam Sistem Ekonomi Berdasar Nilai-Nilai Pancasila.

SWADESA juga berarti desa mandiri untuk mengangkat harkat martabat masyarakat desa menjadi lebih sejahtera. Mandiri tidak hanya dalam aspek sandang tetapi juga papan & pangan melalui pengarusutamaan koperasi desa sebagai soko guru perekonomian rakyat, sehingga mampu merdeka dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam rangka untuk suksesnya kegiatan dimaksud, LPPM berupaya menyusun “Buku Kerja KKN Tematik SWADESA 2018” sebagai pegangan mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan (DPL) agar kinerja KKN Tematik dapat berjalan terencana dan terstruktur serta terevaluasi.

Kepala LPPM Universitas Trilogi

Dr. P. Setia Lenggono

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi mempunyai misi yang dinyatakan sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut meliputi berbagai bidang yaitu bidang pendidikan dan pengajaran, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penelitian. Salah satu implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut adalah program kegiata Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Pada tahun 2017 Universitas Trilogi telah melaksanakan KKN di Desa Pasarean Bogor Kecamatan Pamijahan yang dilaksanakan dalam skala kecil di 5 RW yaitu RW 03. 04, 05, 06, 07 Desa Pasarean. Hasil evaluasi dan respon dari masyarakat sekitar sangat baik sehingga pada tahun 2018 LPPM Universitas Trilogi merspon denga menindaklanjuti kegiatan KKN wilayah admnistratif dengan skala yang besar, yaitu pada Kecamatan Pamijahan didasarkan pada realita jumlah mahasiswa peserta KKNUniversitas Trilogi Jakarta yang dikisarkan mencapai 600 orang.

Dasar kegiatan KKN adalah Empati-Partisipatif, yaitu melaksanaka hubungan sinergi antara mahasiswa dengan masyarakat. Dengan hubungan ini maka kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Bagi mahasiswa KKN merupakan wadah implementasi keilmuan yang didapat di kampus dan memperoleh pengalaman nyata terjun ke masyarakat. Bagi masyarakat mendapatkan masukan pengalaman yang dibawa oleh mahasiswa dalam pembangunan wilayahnya.

Sifat dari KKN adalah multidisipliner, dimana dalam pelaksanaannya merupakan implementasi dari gabungan berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian maka pengalaman masyarakat menjadi lebih komprehensif, komplementatif dan berdimensi luas.

B. DASAR HUKUM

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi yang diselenggarakan berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis, agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan secara bertanggungjawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkannya.

Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, ketrampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap pemulihan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan: "Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat". Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Perguruan Tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Prakter dari ilmu yang telah dipelajari dan penerapan hasil penelitian dilakukan oleh civitas akademika dengan suatu media yang mendukung.

Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN PPM diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan dunia empiris-praktis. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling asah, asih dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat.

Melalui KKN, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara lebih nyata, KKN merupakan media penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara sistematis dalam program pemberdayaan masyarakat. KKN juga diharapkan menjadi pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik dalam rangka

membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Dalam implementasi KKN Tematik, saat ini Universitas Trilogi melakukan sinergi program KKN dengan Yayasan Damandiri. Programnya adalah KKN Tematik Posdaya. Dimana Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) adalah forum silaturahmi dan pengembangan budaya peduli sesama anak bangsa, forum pemberdayaan keluarga kurang mampu secara gotong royong. Sinergi program ini diharapkan menjadi alternatif solusi mengabdi pada masyarakat terutama dalam membantu menyelesaikan target *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Pada pelaksanaan KKN Tematik tahun 2015 ini, Universitas Trilogi bekerja sama dengan Kecamatan Pancoran kota administratif Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Camat Pancoran. Oleh karena itu, lokasi KKN tahun 2015 cenderung berada di wilayah kecamatan tersebut, di lokasi baik yang merupakan kawasan Desa Binaan maupun kawasan Desa Unggulan.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

a. Untuk kepentingan mahasiswa pelaksanaan KKN Tematik Bina Kelola Desa dimaksudkan untuk membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat, menerapkan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung dan melihat apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang diikutinya, serta membawa manfaat bagi rakyat. Mahasiswa berlatih mendidik dan mengajar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Mahasiswa melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan bangsa.

b. Untuk kepentingan keluarga dan masyarakat, KKN Tematik Bina Kelola Desa dimaksudkan untuk membantu pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan dan ketrampilan, KB dan kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Tujuan

a. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa mempelajari dan mengatasi permasalahan keluarga dan penduduk melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat dan lembaga pedesaan lainnya.

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat arahan pembangunan manusia *(human development)*, mencapai target sasaran *MDG's,* kompetensi, potensi, sumberdaya dan kemampuan lingkungan dalam wadah kerjasama masyarakat, pemerintah, swasta dan lembaga lainnya.

c. Menggalang komitmen, kepedulian dan kerjasama berbagai *stakeholders* (Pemda, swasta, LSM dan masyarakat) dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, mengatasi permasalahan dan ketidak berdayaan penduduk dan keluarga lainnya.

d. Membantu mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh mitra kerja pembangunan (Pemda, lembaga swasta dan LSM) dalam perencanaan dan pengelolaan program yang bersifat partisipatif.

e. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang ditekuni.

3. Sasaran

a. Terbentuknya Bina Kelola Desa ataupun nama lainnya yang dikenal dengan istilah Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga (FKPK) di wilayah Kecamatan Pamijahan, sebagai sarana pemberdayaan keluarga dan penduduk untuk pengembangan SDM dan pengentasan kemiskinan. Sasaran utama pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk Desa Mandiri Lestari, tetapi dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga lansia, kaya dan miskin bisa bersilatuhrahmi dan saling peduli sesamanya.

b. Jadi sasarannya adalah bahwa Bina kelola Desa ini menjadi forum pemberdayaan keluarga muda kurang mampu dan berkembangnya suasana hidup gotong royong di kalangan masyarakat setempat.

c. Terbentuknya Pengurus melalui fasilitas yang diberikan atau diupayakan oleh mahasiswa dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan lainnya yang ada di sekitar desa.

d. Tersusunnya rencana program dan kegiatan pembangunan yang kreatif dan inovatif berdasarkan arahan basis *human development* atau *Millenium Development Goals (people centered development)* melalui pengembangan kemampuan keluarga dan masyarakat dengan mengembangkan program pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, sekaligus mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan potensi, minat masyarakat dan kondisi penduduk sebagai sasaran garapan.

e. Terlaksananya program Bina Kelola Desa dengan pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa.

f. Makin mengecilnya jumlah keluarga kurang mampu karena mengikuti proses pemberdayaan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara sempurna.

g. Meningkatnya kerja sama Perguruan Tinggi dengan Pemda, swasta dan LSM.

D. GAMBARAN UMUM KKN TEMATIK BINA KELOLA DESA

Tema yang diangkat pada KKN Tematik Bina Kelola Desa tahun 2018 ini ialah: ***"Dari Kampus Kekmapung Mendampingi Masyarakat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial"***

Sebagai konsekuensi dari kerjasama dengan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, maka Universitas Trilogi akan memfokuskan wilayah KKN tahun 2018 ini di wilayah Kecamatan Pamijahan. Lokasi KKN Tematik tahun 2018 ini tersebar di 10 Desa. Selain itu, KKN Tematik 2018 juga mencakup pembinaan di setiap Desa, melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong Tata Kelola Desa untuk beraktivitas kembali melalui berbagai macam pelatihan dan inisiasi lainnya. Hingga saat ini, ada 1 Desa yang sudah dijadikan tempat KKN Tematik Bina Kelola Desa yang berada di wilayah Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Pada setiap satu titik lokasi Desa rombongan KKN Universitas Trilogi terdiri dari 2–3 kelompok mahasiswa (3 orang) yang didampingi oleh 1 orang dosen pendamping lapangan (DPL). Durasi dilakukan selama kurang lebih 14 minggu, yang terbagi menjadi pembekalan di

kelas selama 7 minggu dan turun lapangan selama 7 minggu. Mahasiswa yang didampingi DPL-nya akan membantu pencapaian program kerja Desa setempat, namun target prioritas KKN Tematik 2018 adalah memendmpingi masyarakat mewujudkan kesejahteraan sosial serta mengadakan pendataan dan pemetaan Desa.

E. TAHAPAN KKN TEMATIK BINA KELOLA DESA

Sebagai panduan proses KKN, tabel 1 menunjukkan tahapan proses dalam melakukan KKN Tematik. Tabel 1 hanya merupakan panduan dasar dan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya.

Kelompok mahasiswa KKN dan dosen pendamping lapangan dapat menambahkan kegiatan-kegiatan lain berdasarkan potensi masyarakat yang ditemukan di lokasi KKN-nya. Secara umum target per minggu yang diharapkan dari KKN Tematik ini adalah:

Tabel 1. Target keluaran per minggu

Minggu	Kegiatan
1	Bertemu untuk Koordinasi dengan Lurah dan Ketua RW
2	Penggalian potensi masyarakat yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan dan program kerja Posdaya
3	Pengembangan lanjutan kegiatan-kegiatan pemberdayaan berdasarkan potensi masyarakat sesuai dengan kompetensi para dosen di Universitas Trilogi. Pemberdayaan masyarakat ini lebih ditujukan pada pembangunan sosial, belum menyentuh pembangunan fisik, namun tidak membatasi jika hal tersebut dapat dilakukan, serta melakukan Pendataan dan pemetaan masyarakat Posdaya untuk keluarga sejahtera.
4	Senantiasa melakukan pencatatan kegiatan yang dilakukan agar memudahkan dalam penyusunan laporan akhir KKN 2018. Nantinya Desa dan Kelurahan akan meminta laporan tersebut untuk dilaporkan lagi ke Camat Pamijahan.
5	Mendorong, menggerakkan dan memacu masyarakat agar pemberdayaan dapat optimal dengan menggerakan Bina Kelola Desa yang sudah terbentuk.
7	Mengembangkan Tata Kelola Desa untuk mendampingi masyarakat mewujudkan kesejahteraan sosial
8	Kegiatan lain yang berkaitan serta membuat Laporan KKN untuk Lurah dan tembusannya kepada LPPM.

F. ALTERNATIF USULAN KEGIATAN KKN TEMATIK BINA KELOLA DESA

Kegiatan KKN memerlukan terobosan atau ide-ide dalam pelaksanaannya. Dalam tabel 2 ditunjukkan berbagai kegiatan yang sifatnya sudah menjadi program pengentasan Desa pemerintah Kabupaten Bogor.

Tabel 2. Program pengentasan Desa binaan

No	Program Pengentasan RW Binaan
1	Meningkatkan kualitas hunian masyarakat
2	Rumah sehat dan layak huni
3	Pengolahan sampah
4	Pengaturan buangan limbah rumah tangga
5	Penyediaan air bersih
6	Tanam dan pelihara pohon
7	Pembuatan Lubang Resapan Biopori
8	Pembuatan ruang terbuka hijau
9	Penataan tanah pekarangan yang asri indah nyaman
10	Pembentukan kelompok BKB, PAUD
11	Penyediaan sudut-sudut bacaan
12	Peningkatan pelayanan Posyandu
13	Peningkatan pelayanan puskesmas
14	Pemberdayaan ekonomi keluarga
15	Pelatihan kewirausahaan

Selain itu, contoh kegiatan yang sifatnya sebagai referensi penyelenggaraan pengentasan Desa binaan ditunjukkan pada tabel 3, sedangkan alternatif program kegiatan yang dapat dilakukan Universitas Trilogi sesuai dengan kompetensi para dosennya ditunjukkan pada tabel 4. Dalam implementasinya, setiap kelompok mahasiswa KKN dan DPL-nya dipersilakan untuk berinisiatif menyusun program kegiatan lain yang terkait yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi masyarakat di wilayah KKN-nya.

Tabel 3. Referensi Penyelenggaraan pengentasan Desa kumuh

No	Referensi Penyelenggaraan Pengentasan Desa kumuh
1	Pembentukan/pengembangan Majelis Taklim
2	Pembentukan/pengembangan Pembinaan Anak Remaja
3	Penyelenggaraan dan pengembangan PIK Keluarga
4	Intensifikasi pelaksanaan gotong royong
5	Pembentukan/pengembangan Pola Asuh anak
6	Pembentukan/pengembangan bina Lansia
7	Intensifikasi penyuluhan Kadarkum
8	Pembentukan/pengembangan penyelenggaraan BKB PAUD
9	Mengembangkan kehidupan berkoperasi
10	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi dalam UP2K
11	Meningkatkan jiwa wirausaha dan ketrampilan keluarga
12	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah pekarangan
13	Meningkatkan ketahanan pangan keluarga
14	Mengoptimalkan pengelolaan perumahan dan tata laksana rumah tangga
15	Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
16	Mengoptimalkan pelayanan penimbangan Posyandu
17	Mengintensifkan penyelenggaraan kelestarian lingkungan
18	Mengembangan program RW Siaga
19	Menyelenggarakan program KP Ibu
20	Mengintensifkan pengelolaan FKPK (Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga)
21	Pembentukan/pengembangan kelompok kegiatan daur ulang sampah
22	Mengoptimalkan pembuatan komposting

Tabel 4. Alternatif KKN Tematik BinaKelola Desa Universitas Trilogi

No	Alternatif KKN Tematik Posdaya Universitas Trilogi
1	Mengintensifkan pengelolaan FKPK
2	Mengembangkan kehidupan berkoperasi
3	Pengelolaan Sampah
4	Tanam dan pelihara Pohon
5	Pembuatan Lubang Resapan Biopori
6	Pembuatan ruang terbuka hijau
7	penataan tanah pekarangan yang asri dan nyaman
8	Pembentukan kelompok BKB, PAUD
9	Penyediaan sudut-sudut bacaan
10	Pemberdayaan ekonomi keluarga
11	Pelatihan kewirausahaan
12	Pelatihan pemanfaat IT bagi pemberdayaan/Kompudaya
13	Pelatihan pengemasan produk

Demikianlah *Term of Reference* (TOR) yang dipersiapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trilogi. Semoga kegiatan KKN yang masih jauh dari sempurna ini dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kuliah kerja nyata mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Dengan kegiatan KKN yang diwajibkan oleh pemerintah diharapkan terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan diperguruan tinggi sehingga lulusan perguruan tinggi, khususnya Universitas Trilogi benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sangat diperlukan sebagai lokasi kegiatan KKN. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan hidayah -Nya sehingga kegiatan ini berlangsung dengan lancar.

Jakarta, Februari 2018

KETUA LPPM
Universitas Trilogi

MODUL

UTR123018 | 3 SKS

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL/KKN

DISUSUN OLEH :
Dr. P Setia Lenggono
Fathia Anggriani Pradina, S.S.,M.Hum
Heny Agustin, S.P.,M.Si
Muhamad Karim, S.Pi.,M.Si
Rossi Iskandar, S.Pd.I.,M.Pd
Ludwina Harahap, S.E.,M.S.,Ak
Winda Amelia, S.Pd.,M.Pd
Dhita Paranita Ningtyas, S.Pd.,M.Pd
Dr. Roostrianawahti Soekmono, M.Pd
Mia Rachmawaty, M.Pd
Duana Fera Risina, S.Pd.,M.Pd
Ayu Dwidyah, S.Pd.,M.Pd
Yaddrabullah, S.Kom.,M.Kom
Sulistyani Puteri Ramadhani ,S.Pd.,M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Modul Kewirausahaan Sosial telah berhasil disusun yang disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Modul ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan bahan rujukan yang mudah dipahami bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah kewirausahaan sosial.

Modul kewirausahaan sosial ini dibagi atas tiga bagian yang berjumlah 7 kegiatan belajar. Bagian pertama modul ini diberi judul "Sosiologi Pedesaan", yang memuat tiga kegiatan belajar meliputi; (1) Konsep sosiologi dan manusia serta aspek kultural di masyarakat desa, (2) Struktur dan Stratifikasi Sosial. Selanjutnya, Bagian kedua modul ini diberi judul "Pembangunan Berbasis Masyarakat", yang memuat empat kegiatan belajar, meliputi; (1) Perkembangan teori dan paradigma pembangunan, (2) Konsep pembangunan berbasis masyarakat, (3) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, (4) tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat. Bagian terakhir, merupakan Bagian ketiga dari modul ini, diberi judul "Kewirauashaan Sosial".

Penulisan Modul ini tak luput dari segala kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman sangat penting artinya bagi penyempurnaan modul ini di masa-masa mendatang

Jakarta, 27 Juni 2019
Penyusun,

(Tim Dosen KKN)

DAFTAR ISI

Halaman Judul 2
Kata Pengantar 2
Daftar Isi..... 4
Tinjauan Mata Kuliah..... 5

MODUL 1: SOSIOLOGI PEDESAAN 10
Kegiatan Belajar 1: Konsep Sosiologi dan Manusia serta Aspek Kultural di Masyarakat Desa 10
A. Uraian Materi..... 10
B. Latihan 33
C. Rangkuman 33
D. Tes Formatif 1 35

Kegiatan Belajar 2: Struktur dan Stratifikasi Sosial **37**
A. Uraian Materi..... 37
B. Latihan 44
C. Rangkuman 44
D. Tes Formatif 2 44
E. Kunci Jawaban Tes Formatif. 44
F. Daftar Pustaka. 45

MODUL 2: PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT..... 46
Kegiatan Belajar 1: Perkembangan Teori dan Paradigma Pembangunan 46
A. Uraian Materi..... 46
B. Latihan 70
C. Rangkuman 70
D. Tes Formatif 1 71

Kegiatan Belajar 2: Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat **74**
A. Uraian Materi 74
B. Latihan 74
C. Rangkuman..... 88
D. Tes Formatif 2..... 89

Kegiatan Belajar 3: Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat di Desa Mandiri Lesatari (DML)……. **91**
A. Uraian Materi..... 91
B. Latihan 106
C. Rangkuman 106
D. Tes Formatif 3 106

Kegiatan Belajar 4: Tahapan Dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat 110
A. Uraian Materi 110
B. Latihan 114
C. Rangkuman 115
D. Tes Formatif 4 115
E. Kunci Jawaban Tes Formatif. 116
F. Daftar Pustaka. 118

MODUL 3: KEWIRAUSAHAAN SOSIAL 121
Kegiatan Belajar 1: *Best practice* teknososiopreneur 123
A. Uraian Materi 123
B. Latihan 140
C. Rangkuman 140
D. Tes Formatif 1 142
E. Kunci Jawaban Tes Formatif. 142
F. Daftar Pustaka. 143

TINJAUAN MATA KULIAH

1. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberi pengalaman nyata kepada mahasiswa dari mengenali karakteristik masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di lokasi KKN, mengevaluasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan memecahkan permasalahan masyarakat di lokasi KKN dengan pendekatan multi disiplin. Pada mata kuliah Kewirausahaan Sosial ini, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kearifan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di masyarakat (potensi alam, penduduk, budaya, kesenian, sosial, ekonomi), memberdayakan masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat di lokasi KKN.

2. MANFAAT MATA KULIAH

Dengan adanya Modul Kewirausahaan ini diharapkan mampu belajar dari dunia nyata, termasuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama di perkuliahan. Keberhasilan kuliah ini ditentukan oleh kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk beradaptasi dalam dunia kerja/masyarakat, serta kemampuan membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan kewirausahaan sosial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah rumpun Keteknososiopreneuran dan mata kuliah terpadu dalam bentuk praktik lapangan.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Ranah	Capaian Pembelajaran Lulusan
Sikap	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (S6); 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7); 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8); 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9); dan 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10).
Keterampilan umum	1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2); 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni (KU3); 3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4);

	4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8); 5. Mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian professional untuk menyelesaikan penugasan kerja (KU10); dan 6. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan (KU11).
Keterampilan khusus	1. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memanfaatkan iptek sesuai prodi untuk mengembangkankeunggulan usaha secara mandiri dan kelompok (KK1); dan 2. Mampu menerapkan kecerdasan sosial dan keterampilan lunak untuk mengembangkan profesionalitas sesuai bidang keilmuan prodi, kemampuan bekerja dalam tim, dan mengantisipasi perkembangan masyarakat, serta memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa (KK 2).
Pengetahuan	1. Menguasai konsep kecerdasan sosial dan sistem ekonomi dan demokrasi Pancasila sebagai jatidiri bangsa, serta menerapkan dalam tugas profesinya dan kehidupan sehari-hari sebagai WNI yang baik (P2); dan 2. Menguasai konsep teknososiopreneur dan menerapkan prinsip-prinsip teknososiopreneur dan koperasi Indonesia dalam kegiatan usaha secara mandiri dan kelompok (P3).

4. PETA KONSEP

1. *Mind Map* Mata Kuliah Kewirausahaan Sosial

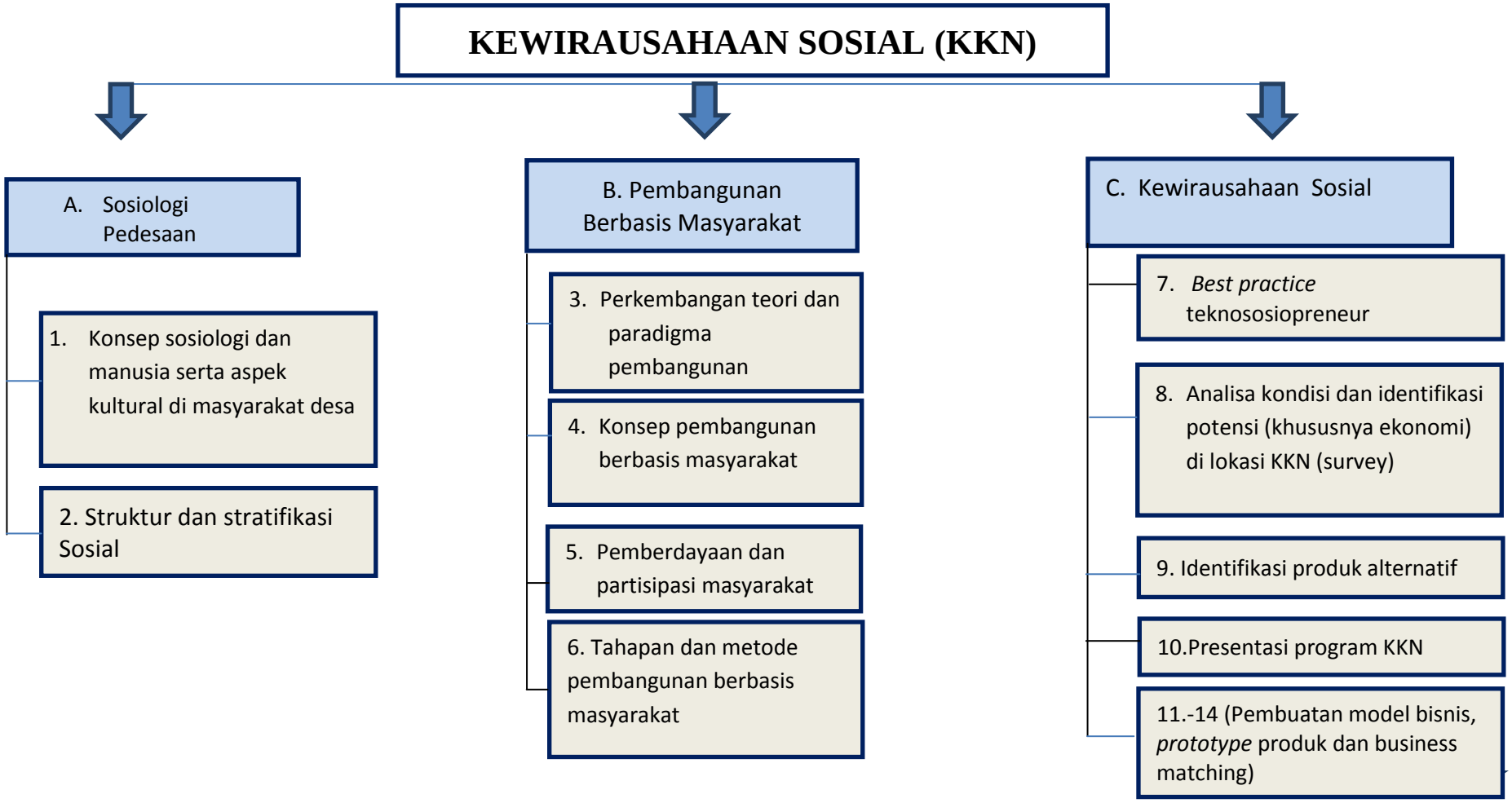

Gambar 1. Peta Kewirausahaan Sosial

2. Bagan Analisis Mata Kuliah Kewirausahaan Sosial

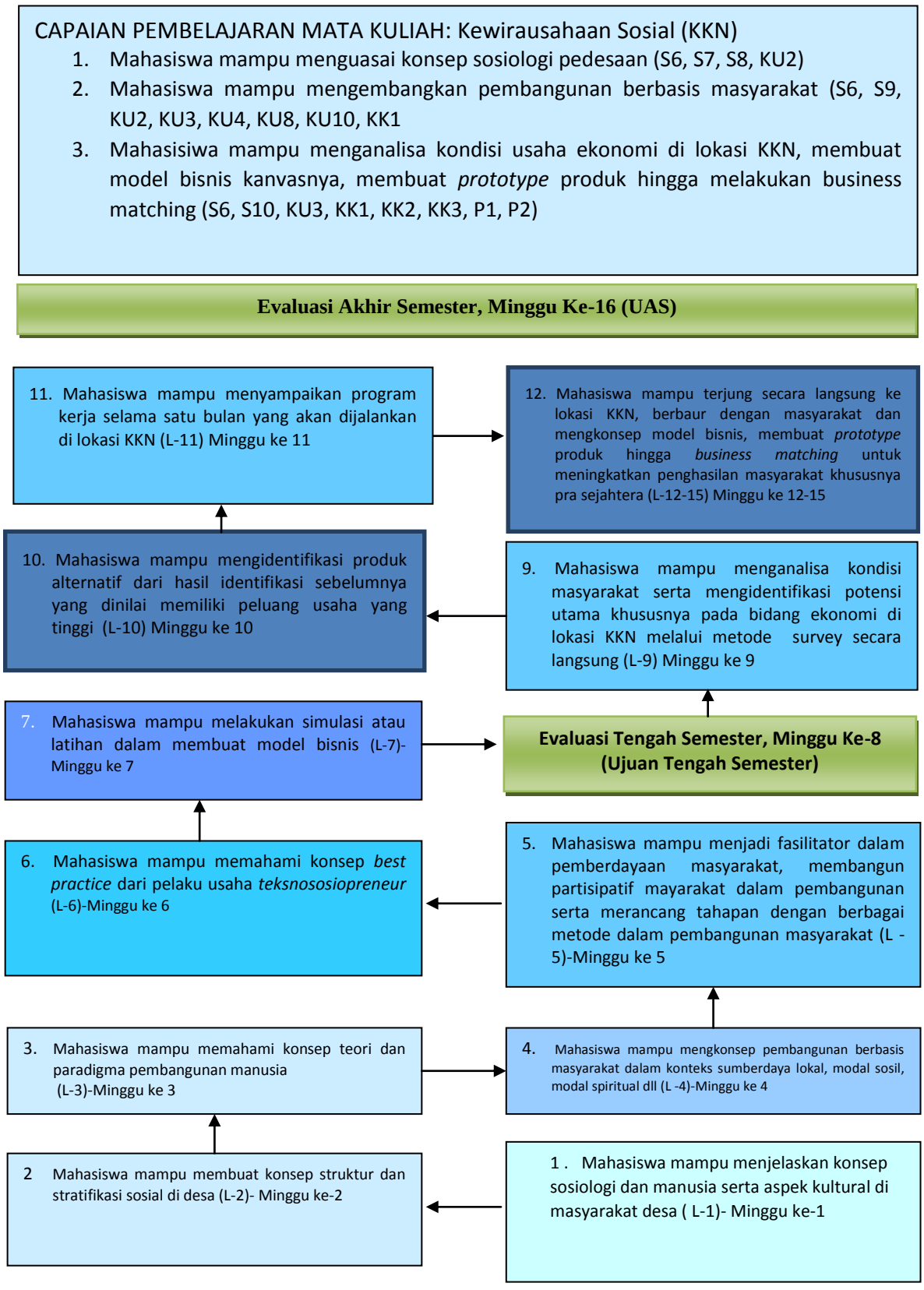

5. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul Kewirausahaan Sosial ini terdiri dari bagian modul yaitu, modul mengenai Sosiologi Pedesaan yang terdiri dari dua kegiatan belajar, modul Pembangunan Masyarakat terdiri dari empat kegiatan belajar, dan modul Kewirausahaan Sosial. Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan dan tes formatif. Apabila masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silakan diskusikan dengan teman atau dosen.

MODUL 1: SOSIOLOGI PEDESAAN

Kegiatan Belajar 1: Konsep Sosiologi dan Manusia Serta Aspek Kultural di Masyarakat Desa

A. Uraian Materi

Membicarakan manusia Indonesia berarti membicarakan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari sisi horizontal, dalam perbedaan etnis, bahasa daerah, agama, dan geografis, maupun dari sisi vertikal, dalam perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi dan sosial budaya (Usman Pelly & Asih Menanti, 1994). Ironisnya sejumlah kalangan ilmuwan dan budayawan Indonesia, mengenali manusia Indonesia dari sisi-sisi negatifnya, diantaranya Muchtar Lubis dalam karya monumentalnya ”manusia Indonesia” dan Koentjaraningrat dalam uraiannya dalam ”mental menerabas”. Keduanya melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari cita-cita pembangunan Indonesia. Muchtar Lubis secara lisan pada 1977, menyebut enam ciri manusia Indonesia, yaitu; 1) hipokrit alias munafik; 2) enggan bertanggungjawab atas perbuatan dan keputusannya; 3) berjiwa feodal; 4) percaya takhayul; 5) artistik; dan 6) berwatak lemah. Ketika pada 1982 diminta merefleksikan kembali ”manusia Indonesia”, Muchtar Lubis dengan tegas mengatakan tidak ada perubahan, bahkan semakin parah.

Sementara Koentjaraningrat (2004) menyebut manusia Indonesia mengidap mentalitas yang lemah, yaitu konsepsi atau pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran masyarakat yang terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya (*culture value system*) sejak dari beberapa generasi yang lalu dan timbul sejak zaman revolusi yang tidak bersumber dari sistem nilai otentik budaya pribumi. Artinya, kelemahan mentalitas manusia Indonesia diakibatkan oleh dua hal sekaligus, yaitu; karena sistem nilai budaya negatif yang berasal dari bangsa sendiri dan dari luar akibat penjajahan bangsa lain. Koentjaraningrat (2004) memperinci kelemahan mentalitas manusia Indonesia, sebagai berikut; 1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu; 2) sifat mentalitas yang suka menerabas; 3) sifat tak percaya kepada diri sendiri; 4) sifat tak berdisiplin murni; dan 5) sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh. Disini, Koentjaraningrat mengakui akan pengaruh dekolonisasi dan penjajahan Belanda, telah menjungkirbalikan tatanan dan tata kerja yang mapan hingga digantikan oleh sesuatu yang belum jelas kaidah dan strukturnya dan sebagai akibatnya terjadilah kemunduran-kemunduran dalam prestasi orang Indonesia pasca revolusi dan hal tersebut semakin melemahkan mentalitas bangsa Indonesia (2004).

Walaupun demikian, SatjiptoRahardjo (1986) meyakini bahwa masih banyak diantara manusia Indonesia yang memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter yang baik. Sebagaimana dikemukakan Myrdal bahwa kondisi yang demikian sesungguhnya tidak bisa dikembalikan kepada ciri-ciri jelek alamiah yang melekat pada sebuah bangsa, melainkan pada struktur tempat mereka berada, mengingat kelemahan itu bukan disebabkan oleh *inherent evil character straits of their peoples*, melainkan hasil dari tali-temali proses kesejarahan yang panjang.

Kebudayaan Indonesia

Di dalam "Primitive Culture", E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan bukan sesuatu yang "*given*", sesuatu yang dengan sendirinya terjadi dan menjadi faktor penyebab tunggal yang sangat menentukan. Kebudayaan mendapatkan sosoknya (yang sementara) dari hasil silang pengaruh dari berbagai sistem, seperti sistem kekuasaan, sistem pendidikan, sistem kepercayaan, sistem masyarakat, sistem ekonomi dan berbagai sistem lainnya. Dengan demikian, pola budaya kita merupakan sesuatu yang jamak atau "distribunal" (Hefner, 1999). Bourdieu menduga kebudayaan bukanlah "properti masyarakat yang tidak terbagi-bagi, tetapi sebaliknya sebagai suatu subjek bagi persaingan dan penafsiran yang berbeda. Akibatnya selain tidak homogen, pola-pola pemahaman budaya cenderung berbeda-beda di kalangan masyarakat dalam berbagai cara yang menarik. Secara sosiologis kata *civilization* atau yang umum diterjemahkan sebagai peradaban dapat pula dipakai dalam arti kebudayaan, secara sederhana mengandung arti kebudayaan yang tekniknya telah maju, dimana masyarakatnya telah melek huruf, umumnya bukan kebudayaan suku-suku yang masih terkebelakang dan hidup terpencil (Shadily, 1989).

Peradaban menjadi isu yang sangat menarik, sekaligus krusial ketika Samuel P. Huttington melalui jurnal "*Foreign Affairs*", pada 1993 secara provokatif membuat tesis dengan judul sensasional *The Clash of Civilizations*. Huttington mendasarkam sumber tesisnya dari konflik di dunia baru (era globalisasi), terutama bukan bersifat ideologis, politik dan ekonomi. Dimana negara-negara bangsa masih akan menjadi aktor yang paling kuat dalam urusan-urusan dunia, tetapi konflik utama dari politik global akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok peradaban yang berbeda. Identitas peradaban akan semakin penting pada masa akan datang dan dunia akan dibentuk dalam ukuran besar oleh interaksi diantara tujuh atau delapan peradaban utama. Peradaban ini meliputi; Peradaban Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia Ortodoks, Amerika Latin dan mungkin Afrika. Konflik yang paling penting pada masa akan

datang terjadi di antara garis budaya yang memisahkan satu peradaban dengan peradaban yang lain. Dimana Peradaban Barat tampaknya akan menjadi peradaban universal yang sesuai dengan semua umat manusia. Pemikiran Hutttington yang dipengaruhi sejarahwan Prancis, Fernand Braudel, mendefinisikan peradaban secara lebih kompleks dan luas sebagai *the broadest cultural entity*. Maksudnya kebudayaan merupakan sebuah representasi dari wilayah yang lebih sempit dan karena itu bervariasi menurut tempat, misalnya; Jerman, Prancis dan Inggris adalah kebudayaan, sedangkan wilayah kesatuannya yang disebut Eropa adalah peradaban. Demikian pula Arab adalah kebudayaan, sedangkan Islam adalah peradaban, sementara Taiwan adalah kebudayaan, sedangkan Cina adalah peradaban, begitu seterusnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Sekalipun Huttington tidak memasukkan Indonesia sebagai salah satu dari tujuh atau delapan peradaban utama, namun kebudayaan Indonesia yang khas dan menjadi pusat dari peradaban maritim Austronesia adalah sebuah peradaban besar (lihat Sistem Ekonomi Pancasila, 2018). Sekalipun menurut Geertz, Indonesia sangat kompleks, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi etnis (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minang, Aceh, Flores, Ambon, dst), melainkan juga menjadi arena pengaruh multi mental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Confusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, Sosialisme, dst. “Indonesia adalah ‘sejumlah bangsa’ dengan ukuran, makna dan karakter berbeda-beda yang telah melalui narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama”. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri utama masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk (*plural societies*). Sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, suatu masyarakat yang terdiri atas dua elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.

Konsepsi diatas, saat ini telah diperluas oleh para ahli ilmu sosial. Masyarakat majemuk dianggap sebagai suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Menurut Nasikun (2004), suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural bersifat diverse. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif

murni, serta oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan diantara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Dalam istilah Geertz, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dimana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Kemajemukan masyarakat yang bersifat multidimensional itu akan dan telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi secara horizontal. Sementara stratifikasi sosial sebagaimana yang berhasil diwujudkan masyarakat Indonesia akan memberi bentuk pada integrasi nasional yang bersifat vertikal. Mengikuti pandangan penganut fungsionalisme struktural, suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas landasan dua hal berikut; *pertama*, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi diatas tumbuhnya konsensus diantara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental. *Kedua*, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (*cross-cutting affiliations*). Dengan demikian setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya loyalitas ganda (*cross-cutting loyalities*) dari para anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

Sedangkan menurut para penganut pendekatan konflik, konfik sangat potensial terjadi dalam masyarakat yang bersifat majemuk, mengingat konsensus hanya tumbuh dalam derajat yang terbatas. Karenanya, *pertama*; masyarakat majemuk hanya mungkin terintegrasi dalam waktu yang panjang di atas paksaan (*coercion*) dari suatu kelompok atau kesatuan soaial yang dominan atas kelompok-kelompok kesatuan sosial yang lain. *Kedua*, masyarakat majemuk dapat juga terintegrasi oleh karena adanya saling ketergantungan di antara berbagai kelompok atau kesatuan sosial tersebut di dalam lapangan ekonomi.

Tidak diragukan bahwa pengakuan bertumpah darah satu, berkebangsaan satu dan berbahasa satu, Indonesia, yang tumbuh sebagai hasil gerakan nasionalisme pada 1928 yang berjiwa anti kolonialisme, merupakan konsensus nasional awal yang memiliki daya tiada terkira di dalam mengintegrasikan masyarakat Indonesia sampai kini. Ia merupakan kesadaran nasional yang menjadikan penduduk kepulauan Nusantara merasa sebagai “satu” bangsa. Hingga puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika proklamasi kemerdekaan di deklarasikan, tidak saja di dalam artian hukum, melainkan lebih sebagai kenyataan psikologis yang membedakan apakah seseorang termasuk sebagai warga dari bangsa Indonesia atau tidak. Sekaligus sebagai

konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan. Suatu "sistem nilai" yang akan mendasari hubungan-hubungan sosial di antara para anggota suatu masyarakat bangsa. Sebagaimana dikatakan Max Weber, bahwa sistem nilai merupakan dasar pengesahan (*legitimacy*) dari struktur kekuasaan (*authority*) suatu masyarakat, sehingga konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai bangsa harus diwujudkan, pada akhirnya akan merupakan konsensus nasional terhadap suatu rezim tertentu yang sedang berkuasa.

Manusia Indonesia

Keberadaan Nusantara sebagai negeri maritim yang memiliki rangkaian pulau terbanyak di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis, sebagaimana digambarkan Lombard (1996) dalam "*Le Carrefour Javanais*" atau digambarkan Reid (1998) sebagai "*Tanah di Bawah Angin*". Tidak hanya membawa berbagai peradaban besar Timur merasuk ke jantung Nusantara, sebagaimana peradaban Hindu dan Budha dari India yang melakukan penetrasi hampir bersamaan (ditandai tumbuhnya Kerajaan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia hingga Kerajaan Taruma Negara, Majapahit, dan seterusnya). Selanjutnya peradaban Budha India dibawa pengaruh Kerajaan Kalingga, Mataram Budha hingga Sriwijaya. Hingga munculnya peradaban Islam yang dibawa masuk Kerajaan Perlak – Samudra Pasai, Goa, Demak hingga Mataram Islam dan seterusnya. Sementara peradaban China melalui ajaran Taoisme dan Confusianisme ikut mewarnai dihampir semua sendi kehidupan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Kekayaaan sumberdaya alam Nusantara pun menjadi daya pikat masuknya peradaban Barat melalui penetrasi perdagangan dan kolonialisme dengan semangat Gold, Glory and Gospel. Menjadikan Nusantara sebagai tempat yang paling subur diatas muka bumi ini, di dalam "proses pemberadaban" umat manusia (lihat Sistem Ekonomi Pancasila, 2018).

Disisi lain, peradaban Nusantara dengan segala keunikan-karakteristiknya pun, telah menempuh trajektori yang berbeda-beda secara geografis dan historis sejak masa lampau, hingga ikut mewarnai pertumbuhan peradaban lain di dunia. Dick-Read (2008), dengan sangat antusias mengungkapkan bukti-bukti mutakhir betapa pelaut Nusantara telah menaklukkan samudra jauh sebelum bangsa Eropa, Arab dan China memulai zaman penjelajahan bahari mereka. Sejak Abad ke-5 M, para pelaut Nusantara telah mampu menyebrangi Samudra Hindia hingga mencapai Afrika. Mereka bukan hanya singgah di Afrika, mereka juga meninggalkan banyak jejak pada kebudayaan di seluruh Afrika. Ketika pada abad ke-5 dan ke-7, kapal-kapal Nusantara mendominasi pelayaran dagang di Asia, terungkap betapa perdagangan bangsa China pun banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Jika mendasarkan pada sebaran *lingua-franca* Indo-

Melayu yang dituturkan masyarakat Austronesia yang tersebar dari Madagaskar hingga Easter Island, serta dari Taiwan hingga New Zealand, maka bisa dibayangkan betapa luasnya diaspora dan daya jelajah pelaut Nusantara pada masa lampau. Sebuah sejarah kolosal yang ikut membentuk manusia Indonesia yang tampak seperti sekarang.

Nusantara adalah suatu wilayah yang tidak hanya melingkupi NKRI saat ini, tapi juga wilayah negara lain di sekitar Lautan Pasifik dan Asia Tenggara yang masih mendapatkan pengaruh peradaban Melanesia (Papua) – Austro Asiatik – Austronesia. Penutur Melanesia yang memiliki ciri kulit hitam dan rambut keriting berasal dari Afrika, telah menghuni kepulauan Nusantara sejak 40.000 tahun silam. Orang Melanesia saat ini tersebar dari Nusa Tenggara Timur, pedalaman Papua, Kepulauan Solomon, New Caledonia, Fiji hingga Australia. Selanjutnya, mereka bercampur dengan Generasi Gelombang Kedua migrasi orang-orang Austro-Asiatik yang berasal dari Indo China sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sementara orang Austronesia merupakan migran Generasi Gelombang Ketiga yang bermigrasi melalui Formosa/Taiwan pada 6.000-5.000 tahun yang lalu. Bellwood (2000) memperkirakan jumlah rumpun bahasa Austronesia mencapai sekitar 1.200, menjadikannya sebagai rumpun bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia dan paling luas sebarannya, meliputi lebih dari separuh dunia.

Santos (1997) dan Oppenheimer (1998) bahkan berhasil menunjukkan bukti-bukti genetis yang kontroversial, bahwa orang-orang berbahasa Polynesia dan Indonesia masa kini (penutur Austronesia), dahulu tinggal di atas Benua Asia Tenggara yang tenggelam dan tidak berasal dari Tiongkok. Sebagaimana dikutip Hidayat (2004) dari N.J. Krom mengenai manusia Jawa primitif yang dapat merepresentasikan peradaban Austronesia, telah memproduksi banyak budaya asli sebelum dipengaruhi budaya Tiongkok dan India, tiga di antaranya yang terkenal ialah wayang kulit, orkestra gamelan, dan karya tekstil batik. Juga budaya tembikar-megalitikum dan perladangan berpindah hingga pertanian beririgasi yang dikembangkan peradaban Austro Asiatik. Sementara budaya tenun ikat, seni ukir dan pengolahan sagu dikembangkan masyarakat Papua yang merepresentasikan peradaban Melanesia. Semua budaya materiil itu dapat dikatakan sebagai upaya-upaya paling termula untuk membangun tradisi metafisika, etika, kosmologi, dan kosmogoni spekulatif yang kian kritis dan sistematis di kemudian hari. Lebih dari 400 bahasa dengan penutur dari beragam etnik yang sama banyaknya hidup di Nusantara, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah etnik terbesar di dunia, yang menetap di lebih dari 1.763 pulau dari 17.504 pulau yang membentuk negeri *archipelago* terluas di dunia.

Menariknya, kehidupan yang dipraktikkan oleh berbagai etnik di Nusantara yang majemuk tersebut, mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan saling menghargai karena adanya persamaan substansi nilai budaya. Realitas inilah yang selanjutnya melahirkan

pandangan bahwa suku-suku bangsa di Nusantara adalah manusia yang tidak bersifat individu dan berdiri sendiri, bebas dari ikatan kelompoknya dan hanya mencari manfaat bagi dirinya. Melainkan, manusia yang merupakan bagian dari kelompok dan baru mempunyai arti, jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. Sebagai perwujudan tersebut, sejak lama bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa mancanegara sebagai bangsa yang memiliki sifat khas dengan kepribadian (unik), diantaranya; ramah tamah, religius, suka membantu sesama (solidaritas – gotong-royong), dan mengutamakan musyawarah mufakat. Selalu menjaga keselarasan diantara tarikan partikularisme dengan universalisme, spiritualisme dengan materialisme dan individualism dengan kolektivisme.

Dari cara pandang manusia Indonesia seperti itulah, lahir paham kekeluargaan sebagai esensi dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa manusia Indonesia. Pandangan suku-suku bangsa di nusantara didasarkan atas pemikiran bahwa manusia terdiri atas; susunan kodrat jiwa dan raga, serta jasmani dan rokhani dan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia ditakdirkan untuk "hidup berkelompok" dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan kelompoknya, akan kehilangan arti jika hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya. Manusia Indonesia adalah mahluk *homo socius*, mahluk komunal sejati, sehingga akseptan dan terbuka pada yang lain, bahkan yang liyan bisa menjadi bagian integral dari eksistensinya. Atas dasar pandangan hakekat manusia yang sedemikian kuatnya dalam memaknai nilai-nilai kebersamaan, menjadi sebuah keniscayaan jika kemudian suku-suku bangsa di nusantara memandang manusia tidak hanya sekedar berpangkal tolak pada individu, tetapi pada "kedwitunggalan" antara individu dan kelompoknya.

Tipologi Masyarakat Indonesia dan Kebudayaannya

Koentjaraningrat (1979) telah membuat tipologi masyarakat Indonesia berdasarkan kriteria yang kompleks yaitu pola adaptasi ekologi, sistem dasar kemasyarakatan dan pengaruh luar. Hasilnya adalah enam tipe masyarakat yang berbeda sebagai berikut:

1. Masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, dengan padi dan ubi jalar sebagai tanaman pokoknya dalam kombinasi dengan berburu dan meramu. Penanaman padi tak dibiasakan. Sistem dasar kemasyarakatan sangat sederhana berupa desa terpencil (tanpa diferensiasi dan stratifikasi yang berarti). Gelombang pengaruh kebudayaan menanam padi, kebudayaan perunggu, kebudayaan Hindu dan agama Islam tidak dialami. Isolasi dibuka oleh zending atau missionaris. Contohnya, masyarakat dan kebudayaan Mentawai dan Papua;

2. Masyarakat pedesaaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok. Sistem kemasyarakatan dicirikan oleh diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang. Masyarakat merasakan diri sebagai bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu bagian lebih atas yang dianggap selalu lebih halus dan beradab di dalam masyarakat kota. Masyakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh pemerintah kolonial beserta zending dan missionaris atau oleh pemerintah Indonesia. Gelombang pengaruh agama Hindu dan Islam tidak dialami. Contohnya, masyarakat dan kebudayaan Nias dan Tapanuli (Batak);
3. Masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatan berupa desa komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang. Masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan berdagang dengan pengaruh yang kuat dari agama Islam, bercampur dengan suatu peradaban kepegawaian yang dibawa oleh sistem pemerintah kolonial. Gelombang pengaruh kebudayaan Hindu tidak pernah dialami, atau sedemikian kecilnya sehingga terhapus oleh agama Islam. Contohnya, masyarakat dan kebudayaan Minangkabau dan Bugis;
4. Masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatan berupa desa kompleks, yaitu komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Masyarakat kota yang menjadi arah orientasinya mewujudkan suatu peradaban bekas kerajaan pertanian bercampur dengan peradaban kepegawaian yang dibawa sistem pemerintah kolonial. Semua gelombang pengaruh kebudayaan asing dialami seperti halnya kebudayaan Bali. Gelombang pengaruh agama Islam dialami sejak setengah abad terakhir ini. Contohnya, pada masyarakat dan kebuadayaan Jawa dan Sunda;
5. Masyarakat kekotaan yang mempunya1 em-em pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Contohnya, masyarakat di kota-kota kabupaten di Indonesia; dan
6. Masyarakat metropolitan yang mulai mengembangkan suatu sektor perdagangan dan industri yang agak berarti, tetapi masih didominasi kehidupan pemerintahan, dengan suatu sektor kepegawaian yang luas, dan dengan kesibukan politik di tingkat daerah maupun nasional. Contohnya, masyarakat di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.

Selain masyarakat dan kebudayaan berdasarkan tipologi Koentjaraningrat (1979), penting untuk menelaah lebih lanjut ciri-ciri pokok apa saja yang melekat pada masyarakat dan kebudayaan agraris, yaitu:

a) Memiliki hubungan erat dengan tanah dalam kaitan dengan usahatani;
b) Usahatani keluarga merupakan satuan dasar pemilikan, produksi, dan konsumsi serta kehidupan sosial petani; dan
c) Kedudukan sosial dan peranan individu dalam kehidupan masyarakat antara lain ditentukan oleh luasan penguasan tanah pertanian.

Oleh karena itu, batasan masyarakat agraris dan petani perlu diletakkan dalam sifat yang relasional dan struktural, tidak hanya sekedar berdasarkan matapencarian. Masyarakat petani merupakan masyarakat pinggiran tetapi sekaligus merupakan bagian dari suatu peradaban. Ia menyangga kelas politik tertentu, penguasa agama, dan kaum berpendidikan di perkotaan.

Masyarakat agraris yang ada di desa-desa bukanlah pengusaha-pengusaha pertanian yang mengelola unit usahatani bisnis (farmer), melainkan secara ekonomi mengelola unit rumahtangga (peasant). Kendati demikian ia memiliki hubungan dengan sistem pasar di luar komunitasnya, misalnya pasar hasil produksi dan sarana produksi pertanian di perkotaan.

Menurut Redfield (1956) masyarakat agraris mengacu pada dan dipengaruhi oleh kaum bangsawan atau orang kota yang cara hidupnya "lebih berbudaya" (Redfield, 1956). Dalam kaitan ini Redfield selanjutnya memberi label "tradisi besar" (*great-tradition*) untuk kebudayaan kota dan "tradisi kecil" (*little-tradition*) untuk kebudayaan desa (agraris).

Menurut kekhasan ekologinya, masyarakat agraris di Indonesia dapat dibedakan atas tiga tipe yaitu: a) Masyarakat nelayan di pantai; b) Masyarakat petani sawah di dataran rendah; dan c) masyarakat petani peladang atau lahan kering di dataran tinggi. Jika tipe-tipe masyarakat agraris diurutkan berdasarkan evolusi masyarakat, maka terdapat tipe yaitu:

1. Masyarakat pemburu peramu, disebut sebagai masyarakat "pra-agraris"
2. Masyarakat peladang berpindah, disebut sebagai masyarakat "agraris awal", dan
3. Masyarakat petani sawah irigasi, disebut sebagai masyarakat "agraris maju".

Ketiga tipe masyarakat tersebut menunjuk pada perbedaan pola kebudayaan yang satu dengan lainnya. Masyarakat pemburu-peramu dan peladang berpindah disebut sebagai masyarakat dengan "kebudayaan tradisional". Sedangkan masyarakat petani sawah irigasi merupakan masyarakat dengan "kebudayaan modern". Ketiga tipe masyarakat tersebut menggambarkan suatu evolusi dari "pemburu peramu" ke "peladang berpindah" sampai petani sawah beririgasi.

Tetapi hal ini sebenarnya bukan suatu hukum yang mengikat. 'Peladang berpindah' misalnya tidak selalu harus "petani sawah berigasi", tetapi mungkin juga bergeser menjadi "petani kebun".

Rumusan Kebudayaan dan Unsur-Unsurnya

Mengapa kebiasaan antarorang atau kelompok masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan salah tafsir. Hal ini menurut Soetarto dan Agusta (2015), karena pola-pola perilaku kebudayaan yang melatarbelakangi masing-masing warga masyarakat itu memberikan nilai yang berbeda tentang kebiasaan tersebut. Pola-pola perilaku adalah cara-cara bertindak yang sama dari orang-orang yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat yang harus diikuti oleh semua warga kelompok masyarakat tersebut.

Kebudayaan yang dikembangkan oleh setiap kelompok masyarakat senantiasa akan mencari dan membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang fungsional untuk dirinya sehingga menghasilkan wujud yang sangat beraneka ragam antarkelompok masyarakat. Mudah kita lihat misalnya, masyarakat nelayan di kawasan pesisir memiliki seperangkat nilai dan norma budaya tertentu yang berbeda dengan nilai dan norma milik masyarakat petani di dataran tinggi, atau kelompok masyarakat petani dengan kepadatan penduduk yang tinggi di suatu hamparan lahan tertentu memiliki perangkat nilai dan norma budaya tertentu yang berbeda dengan kelompok masyarakat petani lainnya yang berkep adatan penduduk rendah.

Kita dapat mengidentifikasikan bahwa pada satu aspek, kebudayaan dimaksudkan sebagai hadirnya seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman atau acuan perilaku bagi warga pendukungnya. Perangkat normatif ini ditanamkan pada individu-individu (baru) pendukungnya melalui proses sosialisasi. Dengan cara demikian pada gilirannya mereka mampu menjalin dan mengembangkan interaksi sosial dengan orang-orang lain dalam suatu pola makna tertentu yang konstan.

Kita juga dapat melihat bahwa kebudayaan adalah suatu aspek material, dalam hal ini benda-benda fisik buatan manusia. Benda-benda tersebut dibuat orang dengan tujuan dan makna tertentu. Sebagai contoh; buku, artefak, pakaian, masjid, sekolah, komputer, senjata peluru kendali, dan sebagainya adalah sebutan-sebutan yang mempunyai makna khusus.

Obyek-obyek alam jelas bukanlah bagian dari produk kebudayaan material, misalnya gunung, danau, hutan, dan sebagainya. Akan tetapi cara orang memandang dan menggunakan obyek-obyek alam tersebut jelas dilandasi oleh kerangka normatif budaya. Sebagai contoh sebuah gunung bagi kalangan tertentu hanyalah sebuah pemandangan alam biasa. Namun bagi kalangan lain gunung yang sama ternyata dipandang sebagai tempat suci untuk memanjatkan doa.

Dalam konteks sebagai perangkat normatif, budaya memuat nilai, yaitu gagasan-gagasan orang tentang apa yang baik dan buruk, apa yang dianjurkan dan apa yang sewajarnya dihindarkan. Nilai mewarnai seluruh kehidupan masyarakat dan mengabstraksikan situasi-situasi tertentu. Gagasan-gagasan ini dipelajari individu-individu (baru) melalui proses sosialisasi (ajar) yang berlangsung di berbagai lingkungan, keluarga/rumahtangga, tetangga, ternan sepermainan, ruang-ruang kelas di sekolah, tempat kerja, dan sebagainya, mulai dari usia dini hingga menjelang akhir hayat.

Kadang-kadang salah satu nilai menguat dan mendesak atau bertentangan dengan nilai lainnya. Contohnya, ketika terjadi penguatan nilai demokrasi yang menggagas bahwa seseorang sederajat dengan lainnya, terdapat pertentangan dengan nilai yang menggagas bahwa orang yang berumur lebih tua memiliki derajat lebih tinggi daripada orang yang berumur lebih muda. Ketika konflik antarnilai meruncmg terus menerus, tumbuh tekanan untuk melakukan perubahan sosial.

Norma merupakan derivat (turunan) dari nilai yang memerinci lebih spesisifik tentang apa yang baik dan buruk pada suatu konteks siatuasi sosial tertentu, kelompok tertentu, dan masyarakat tertentu. Perlu ditegaskan bahwa norma hanya berlaku untuk konteks situasi yang terbatas yang dialami kelompok, sementara nilai bersifat lebih abstrak dan menjaring hampir seluruh aktivitas masyarakat. Contohnya, norma pergaulan yang berlaku di kalangan anak remaja di kota besar membolehkan laki-laki merangkul perempuan di mall. lni berbeda dari norma pergaulan yang biasa berlaku di kalangan remaja pedesaan yang melarang laki-laki menyentuh perempuan di muka umum.

Untuk menunjukkan arah kepada tingkah laku dan ide tentang yang "baik" atau "buruk", kebudayaan menciptakan simbol pada benda atau tindakan tertentu. Arti atau makna yang timbul dari simbol bersifat sewenang-wenang sesuai kesepakatan masyarakat tersebut. Contohnya, pada abad pertengahan warna ungu menyimbolkan kedukaan sementara saat ini menyimbolkan emansipasi wanita.

Simbol terpenting bagi manusia ialah bahasa, yaitu sistem percakapan atau simbol tulisan yang bisa menjaring banyak makna atau ide yang kompleks. Nilai hierarkis orang Jawa dan Sunda disimbolkan oleh bahasa yang membedakan penggunaan kata-kata tertentu bagi orang yang lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya. Sementara nilai pembedaan laki-laki dari perempuan (seksis) pada orang Arab disimbolkan dari penggunaan kata tertentu untuk laki- laki yang berbeda dari turunan kata tersebut untuk perempuan.

Ketika bahasa digunakan untuk menafsirkan situasi atau keadaan sosial, maka orang sedang membangun struktur sosial. Contohnya ketika orang menafsirkan negara sebagai keluarga

dalam bentuk terbesar, maka rakyat tidak bersedia memprotes pemerintah. Di balik tindakan tersebut terdapat nilai yang menggariskan bahwa pemerintah ibarat orang tua dan rakyat ibarat anaknya dan tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya, sebaliknya akan menyejahterakannya, sehingga anak yang membantah perkataan orang tuanya menjadi durhaka.

Dari uraian di atas tampak bahwa kebudayaan dapat kita pahami dalam beberapa rumusan. *Pertama* kebudayaan sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan lain kemampuan yang diperoleh manusia selaku anggota masyarakat, meliputi semua pola berpikir, merasakan, dan bertindak (Tylor, 1987 seperti dikutip Soekanto, 1990). *Kedua*, kebudayaan adalah sesuatu yang superorganik, artinya berada di atas sesuatu badan. Kebudayaan diturunkan dari generasi-generasi dan tetap akan hidup terus, walaupun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kelahiran atau kematian (Herskovits, 1955). *Ketiga*, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan cara mempelajarinya (Koentjaranigrat, 1979).

Tentu saja karena kelompok manusia itu berjumlah ribuan dan tersebar dalam lokasi yang berbeda-beda, maka kebudayaan yang berkembang pun menjadi sangat beraneka ragam. Namun dalam perbedaan tersebut pada tiap-tiap kebudayaan akan dijumpai unsur-unsur yang serupa, dan oleh Kluckhohn (1953) disebut sebagai unsur-unsur kebudayaan universal. Ada tujuh unsur kebudayaan universal mulai dari hal yang abstrak sampai paling konkret, yaitu: sistem religi, kesenian, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasa.

Sementara itu menurut Koentjaranigrat (1979) dan Redfield (1956) setiap unsur universal kebudayaan itu memiliki tiga wujud, yaitu:

1. Wujud idiil (pola bersikap), yaitu kompleks gagasan, dan nilai-nilai;
2. Wujud aktivitas (pola kelakuan), yaitu suatu kompleks tindakan berpola (terorganisasi, terstruktur) dari manusia dalam masyarakat; dan
3. Wujud fisik (pola saranajkebendaan) yaitu benda-benda hasil karya manusia.

Setiap unsur kebudayaan universal menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan. Dengan demikian sistem ekonomi misalnya mempunyai wujudnya sebagai konsep-konsep, rencana-rencana, kebijaksanaan, adat-istiadat yang berhubungan dengan ekonomi. Tetapi ia juga memiliki wujud berupa tindakan-tindakan dalam interaksi berpola antara produsen, tengkulak, pedagang, pengecer dengan konsumen. Selain itu dalam sistem ekonomi terdapat juga unsur-unsur berupa komoditas dan benda-benda ekonomi lainnya.

lntegrasi dan Diversitas Kebudayaan

Ketika seseorang berpindah dan ingin hidup bersama masyarakat baru, atau dua masyarakat yang berbeda kebudayaannya hendak disatukan dalam satu negara, terdapat dua kemungkinan gerak kebudayaan. *Pertama*, melakukan pembauran atau asimilasi untuk mewujudkan integrasi kebudayaan. Istilah terakhir ini merujuk pada pemahaman yang melihat kebudayaan sebagai suatu sistem fungsional yang terintegrasi, di mana seluruh bagian yang ada dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat berupaya untuk saling menyesuaikan kepentingannya satu sama lain. Pada derajat tertentu proses integrasi kebudayaan yang menghubungkan satu aspek dengan aspek kehidupan lain secara fungsional, terlihat dari wujud struktur sosial dan relasi-relasi kekuasaan (*power-relations*) yang berkembang di dalamnya. Sebagai contoh hal yang disebut *pertama* adalah asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam perkumpulan-perkumpulan dan lembaga-lembaga pada tingkat primer dari golongan mayoritas. Selanjutnya untuk contoh hal yang disebut *kedua*, misalnya adalah asimilasi *civic* yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai nilai-nilai dan pengertian kekuasaan (Gordon dikutip Tan, 1973).

Kedua, tetap mempertahankan jatidiri budayanya sehingga mewujudkan kemajemukan atau diversitas kebudayaan. lni dapat terjadi jika kebudayaan-kebudayaan tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbeda antara lain dari segi latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, umur dan sebagainya. Walaupun orang-orang dalam suatu kelompok masyarakat terintegrasikan oleh suatu kebudayaan, namun tak jarang terjadi kontradiksi antara tataran berpikir dan tindakan pada warga pendukungnya. Sebagai gambaran agama, ekonomi, dan keluarga adalah bidang-bidang kehidupan yang hadir dalam satu wadah. Pergeseran fungsi yang terjadi pada satu bidang kehidupan akan menggeser fungsi bidang kehidupan lainnya.

Kemajemukan budaya bisa muncul ketika budaya minoritas tidak bersedia berasimilasi ke dalam budaya dominan melalui hukum anti-diskriminasi, atau mempertahankan *privilege* dan kekuasaan melalui pembedaan kelompok. Budaya mayoritas ditunjukkan oleh seperangkat nilai, norma, tradisi dan pandangan hidup yang dianggap normal oleh masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan budaya minoritas mengembangkan perbedaan nilai, kebiasaan dan identitas kebudayaan yang disebut subkultur. Contohnya, ketika minoritas bangsa kulit putih Belanda menjajah Indonesia, mereka menetapkan kedudukan orang Eropa di atas pribumi, dan menguasai politik serta ekonomi nusantara.

Dalam pengertian kebudayaan pastilah tercakup juga unsur yang bersifat *imanen* atau dalam hal ini kita sebut saja sebagai tradisi. Tradisi dapat kita nyatakan lebih jauh sebagai "inti

kebudayaan" (*culture-core*), apabila "tradisi" kita terjemahkan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, dan kaidah-kaidah. Dengan pengertian ini bukan berarti kita mau mengatakan bahwa tradisi tidak dapat berubah atau tak dapat diubah. Di depan telah disinggung bahwa ketika bahasa digunakan untuk memaknai realitas maka masyarakat sedang membangun struktur atau membentuk dirinya. Tradisi dengan demikian berpadu dengan aneka ragam perbuatan manusia yang mengacu pada pengetahuan baru, perkembangan teknologi baru, dan lain-lain. Perpaduan antarunsur-unsur budaya lama dan baru yang saling menyesuaikan itu pada gilirannya dapat membentuk suatu "tradisi baru" yang mengubah acuan hidup manusia dengan ciri tertentu sebagai identitas kecenderungan zamannya dan begitulah seterusnya.

Itulah sebabnya mengapa kebudayaan, dalam tinjauan disiplin sosiologi, tak lain merupakan cerita tentang perubahan-perubahan riwayat manusia yang selalu memberi ciri baru kepada pola-pola kehidupan yang sudah ada. Akan tetapi apa pun juga ciri-ciri pokok yang melekat pada inti kebudayaan tentu saja sulit digeser atau tergeser begitu saja tanpa suatu hambatan dan sesungguhnya akan memakan waktu yang relatif panjang (antar-generasi).

Sebagai contoh adalah tradisi atau inti kebudayaan Jawa menurut Geertz (1976) yaitu "sawah". Tradisi bersawah memiliki sejarah yang sangat panjang dalam masyarakat Jawa. Dihitung sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu di masa silam, kebudayaan Jawa sudah mendapat pengaruh demi berbagai peradaban yaitu Islam dan Barat (*imperialism*, *colonialism*, dan *globalism*). Akan tetapi tradisi sawah tetap bertahan. Memang ada perubahan-perubahan di bidang teknologi dan hubungan-hubungan produksi, tetapi semua itu hanya menunjuk pada adanya perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, bukan pergeseran atau pemudaran suatu tradisi atau inti kebudayaan.

Karakteristik Wilayah Pedesaan

Berbicara mengenai karakteristik wilayah perdesaan sedikit banyak akan menyinggung tentang struktur fisik desa sebagai wilayah administratif. Hal tersebut berkaitan erat dengan keadaan lingkungan fisik desa dalam berbagai aspek. Rahardjo (1999) mengungkapkan bahwa secara khusus keadaan fisik tersebut berkaitan dengan lingkungan geografis dengan ciri-ciri yang mendukung, antara lain iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, tingkat kelembaban udara, topografi, dan lain

Di Indonesia, keadaan fisik tiap wilayah pedesaan berbeda-beda. Perbedaan ciri fisik tersebut akan menciptakan perbedaan pula pada jenis tanaman yang ditanam, sistem pertanian yang diterapkan dan pola kehidupan masyarakatnya. Sebagai contoh, masyarakat petani di daerah persawahan akan berbeda lingkungan geografisnya dengan masyarakat di wilayah

budidaya lahan kering. Tanah-tanah yang kurang subur cenderung akan menciptakan desa-desa, kecil yang terpencar, sedangkan tanah-tanah yang relatif subur akan membentuk desa desa yang berpenduduk padat dan berdekatan satu sama lain. Contoh lain adalah penanganan panen di daerah persawahan akan lebih mengakrabkan masyarakat daripada, di daerah dataran tinggi. Panen padi di sawah biasanya dilakukan dengan mengerahkan banyak tenaga yang bekerja bersama-sama, sedangkan panen di pegunungan dapat ditangani beberapa orang saja, karena itu panen hasil produksi dataran tinggi biasanya dirancang untuk dilakukan secara bertahap.

1. Struktur Fisik Wilayah Pedesaan

Secara umum struktur fisik wilayah perdesaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Adapun daerah dataran rendah terbagi menjadi dua pembagian wilayah pula, yaitu daerah pantai dan bukan pantai. Skema pembagian wilayah ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

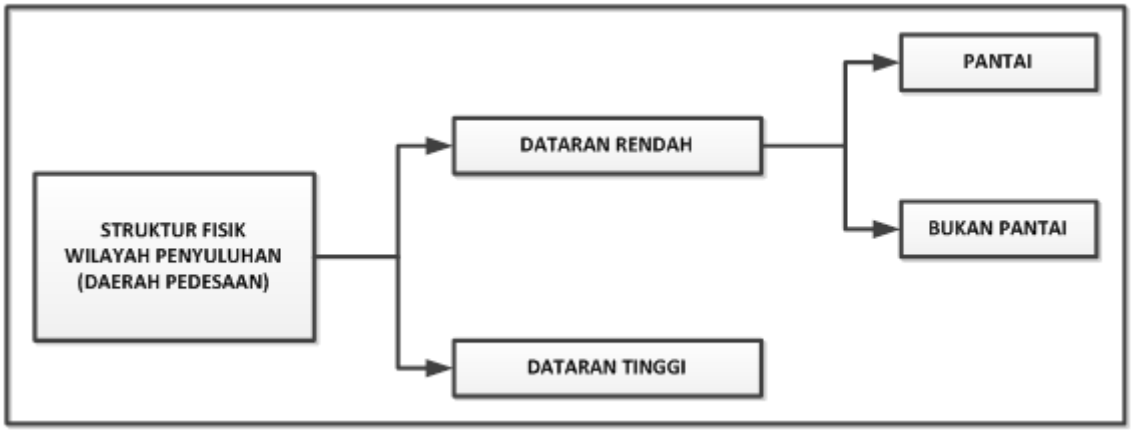

Gambar. Struktur Fisik Wilayah Penyuluhan Pertanian

Karakteristik yang umum terdapat pada wilayah perdesaan dapat dijabarkan berikut ini:

a. Wilayah Dataran Rendah

Daerah pantai

Pola pemukiman di daerah pantai dapat dikatakan seragam untuk wilayah pantai manapun di Indonesia. Dalam suatu desa pantai, penduduk biasanya hidup di pesisir secara berkelompok. Keseragaman mata pencaharian sebagai nelayan memungkinkan mereka untuk lebih mudah hidup bersama dalam satu kompleks perkampungan nelayan. Hal ini karena biasanya mereka pergi melaut bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu. Kondisi fisik rumah mereka biasanya sangat sederhana, bahkan tidak jarang hanya berlantai pasir. Begitu pula lahan pekarangannya memiliki tekstur tanah yang agak sulit untuk ditanami, sehingga menambah

kesederhanaan rumah yang ditinggalinya. Untuk menjangkau daerah ini tidaklah sulit, karena biasanya jalan menuju ke perkampungan nelayan tidak mempunyai sifat topografi yang beragam. Jarak antara satu perkampungan nelayan dengan perkampungan nelayan lain pun dapat dikatakan cukup berdekatan.

Daerah bukan pantai

Desa-desa yang terdapat di daerah bukan pantai pada umumnya memiliki tekstur tanah yang lebih baik dan bagus untuk bercocok tanam. Namun karena suhunya yang tinggi serta tingkat kelembaban udaranya yang rendah, tanaman yang cocok pada daerah ini adalah sejenis padi dan palawija. Karena hal inilah kebanyakan dataran rendah banyak ditanami padi dan mempunyai kontribusi tertinggi dalam pasokan padi. Kondisi jalan di daerah ini lebih bervariasia daripada di daerah pantai, yaitu mulai dari jalan tanah sampai jalan yang berbatu. Namun karena topografinya yang tidak terlalu sulit, tingkat kesulitan untuk nenjangkau daerah ini pun dapat dikatakan tidak berarti.

b. Wilayah Dataran Tinggi

Desa-desa yang terdapat di dataran tinggi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan desa-desa pantai atau desa-desa di dataran rendah. Suhu udara yang rendah dengan tingkat kelembaban yang tinggi memungkinkan wilayah ini untuk ditanami komoditas sayuran. Keadaan fisik yang paling menonjol adalah topografi wilayahnya. Curah hujan yang tinggi menambah sulitnya jangkauan sasaran karena jalanan menjadi licin dan berlumpur, yang kadang-kadang sulit dilalui oleh kendaraan.

2. Gambaran Umum Pola Pemukiman di Pedesaan

Pola pemukiman merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan dengan jelas tentang keterkaitan antara struktur desa dengan pola kehidupan di dalam masyarakatnya. Pola pemukiman (*type of settlement/settlement pattern*) ini didefmnisikan oleh Smith dan Zoph dalam Rahardjo (1999) sebagai kaitan/hubungan keruangan (*spatial*) antara pemukiman penduduk/petani yang satu dengan lainnya dan dengan lahan pertanian mereka.

Secara umum pola pemukiman terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pemukiman yang penduduknya berdekatan satu sama lain dengan lahan pertanian berada di luar/terpisah dengan pola pemukiman penduduknya.
2. Pemukiman yang penduduknya hidup dengan tempat tinggal yang terpencar dan terpisah satu sama lain, dan masing-masing berada di lahan pertanian mereka.

Namun secara lebih rinci lagi Paul H. Landis dalam Rahardjo (1999) membedakan pola pemukiman menjadi 4 (empat) pola umum yang terdapat di dunia, yaitu:

a. *The Farm Village Type* (FVT)

Tipe ini merupakan pola pemukiman yang penduduknya tinggal bersama-sama dan berdekatan dalam suatu tempat, namun lahan pertaniannya berada di luar lokasi pemukiman. Pola ini dapat digambarkan seperti Gambar berikut.

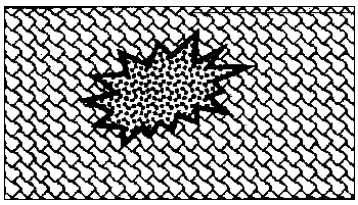

Gambar Pola Pemukiman *The Farm Village Type* (FVT)

b. *The Nebulous Farm Type* (NFT)

Tipe ini memiliki pola yang hampir sama dengan dengan tipe kesatu, namun perbedaannya di samping terdapat penduduk yang tinggal bersama-sama dalam satu lokasi pemukiman, juga terdapat penduduk yang tinggal di luar pemukiman penduduk secara umum. Penduduk yang tinggal di luar pola pemukiman ini bertempat tinggal di lahan pertanian mereka seperti contoh pada Gambar berikut.

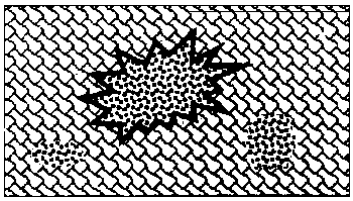

Gambar Pola Pemukiman *The Nebulous Farm Type* (NFT)

c. *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT)

Tipe ini merupakan pola pemukiman yang penduduknya tinggal di sekitar jalan desa, sedangkan lahan pertaniannya berada di belakang rumahnya (rumah berada di lahan pertanian).

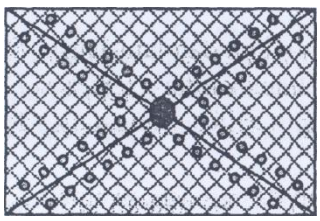

Gambar Pola Pemukiman *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT)

Di dalam pola ini terdapat pusat kegiatan perdagangan (*trade centre*) yang biasanya terletak di tengah-tengah pemukiman seperti pada Gambar berikut.

d. *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT)

Tipe ini merupakan pola pemukiman yang penduduknya tinggal dalam lahan pertanian masing-masing, namun satu sama lain saling berjauhan, seperti terlihat dalam Gambar berikut.

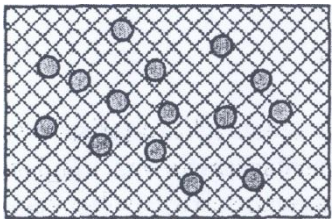

Gambar 5.6 Pola Pemukiman *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT)

Berdasarkan tipe-tipe di atas, pola pemukiman penduduk berpengaruh pula terhadap karakteristik sosial budaya penduduknya.

Tipe kesatu (FVT) mempunyai karakteristik penduduk yang tidak jauh berbeda. Pada tipe ini biasanya dicirikan dengan adanya hubungan yang erat antarwarga, adanya kedekatan warga dengan lembaga-lembaga sosial, mempunyai kemudahan dalam bekerja sama dan sosialisasi anak-anaknya, dan sebagainya. Namun karakteristik ini juga mempunyai kerugian-kerugian tertentu bila dilihat dari sudut pandang penerapan program-program pembangunan. Hubungan yang erat menyebabkan masyarakat sangat menjunjung tinggi adat istiadat atau tradisi yang dipegang teguh dan zaman nenek moyang mereka. Akibatnya pembaharuan sulit dilakukan. Demikian pula adanya sikap saling tolong-menolong sering menyebabkan terciptanya ketidakmandirian dan saling campur tangan antara urusan mereka sehingga segala sesuatu yang akan dilakukan harus menunggu kesepakatan sebagian besar warga. Tipe ini paling banyak terdapat pada negara-negara di Asia.

Tipe kedua (NFT) sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tipe kesatu, namun pada tipe kedua ini antarpenduduk tidak terlalu memiliki jarak yang dekat, sehingga keterikatan dengan adat istiadat pun tidak terlalu ketat seperti yang terdapat pada masyarakat pola pemukiman tipe kesatu. Pada tipe ini introduksi inovasi baru lebih mudah diterapkan bagi masyarakatnya.

Tipe ketiga (AIFT) masih merupakan pola pemukiman yang penduduknya saling berinteraksi satu sama lain. Hanya saja disini terdapat pusat interaksi manusia terutama untuk tempat memasarkan hasil pertanian, serta menukarkan uang mereka dengan barang-barang kebutuhan lain. Adanya *trade center* biasanya diikuti dengan terpusatnya kantor-kantor kelembagaan formal (seperti KUD, Dinas Pertanian dan lain-lain). Disini dapat terlihat siapa saja yang rajin mengunjungi kantor-kantor tersebut, yang menandakan adanya orang-orang aktif dan desa yang terlibat langsung dengan kelembagaan formal.

Yang paling berbeda dengan ketiga tipe pola pemukiman di atas adalah tipe keempat (PIFT). Tipe ini merupakan pola pemukiman yang sebagian besar didominasi oleh orang-orang yang "lapar tanah" atau lebih mementingkan tanah dibandingkan dengan teman. Di Indonesia tipe ini hampir tidak ada, namun sangat banyak terdapat di negara-negara Barat dan sangat dominan di Amerika Serikat. Pada umumnya penduduk di tempat ini memiliki lahan pertanian yang luas dengan pola usahatani yang bersifat diversifikasi. Petani biasanya mempunyai motiivasi usaha yang tinggi dan mau menggali potensi yang ada serta mudah mengadopsi teknologi baru yang lebih canggih untuk memakmurkan usaha mereka.

Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan

Dari uraian sebelumnya telah dibahas sekilas tentang karakteristrik sosial penduduk pedesaan yang tergambar dari pola pemukiman masyarakatnya.

1. Desa sebagai Kesatuan Wilayah Sosial

Selain tergambar dari pola pemukimannya, perkembangan suatu desa dapat pula menggambarkan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan desa tersebut merupakan, gejala perubahan sosial dari desa yang masih bersifat tradisional menjadi desa yang lebih modern. Perkembangan desa dari tradisional menjadi modern itu dijembatani oleh keadaan transisional, sehingga menciptakan desa transisi.

Adapun karakteristik sosial budaya masing-masing jenis desa tersebut oleh M. Francis Abraham dalam Rahardjo (1999) diuraikan sebagai berikut:

a. Desa tradisional, dengan ciri-ciri, sebagai berikut:
   1) Lahan pertanian berpindah-pindah.
   2) Teknologi pertarian masih bersifat primitif.
   3) Sistem pembagian kerja sederhana.
   4) Swasembada unit-unit sosial (misalnya pembangunan sarana jalan, peribadatan, dll).
   5) Produksi diarahkan pada produk-produk yang bersifat primer.
   6) Memegang teguh tradisi suci.
   7) Memiliki organisasi komunal (kerakyatan).
   8) Sistem status berdasarkan keturunan.
   9) Semangat kerakyatan (*folk spirit*) sangat tinggi.
b. Desa transisi, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   1) Terdapat dualisme struktural yang memungkinkan teknologi sederhana dan teknologi maju dipakai dalam satu waktu.

2) Terdapat perubahan budaya di mana norma-norma modernitas muncul dalam kerangka nilai-nilai tradisional.

3) Munculnya industr alisasi.

4) Adanya urbanisasi.

5) Adanya mobilisasi politik

6) Kerap terjadi rekayasa sosial.

c. Desa modern, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1) Industri telah menggunakan teknologi maju.

2) Pembagian kerja berdasarkan fungsi interdependensi unit-unit sosial.

3) Produksi diarahkan untuk produk-produk yang:bersifat sekunder.

4) Terdapat birokrasi impersonal.

5) Mengutamakan prestasi'dalam hal kerja.

6) Adanya urbanisasi yang cukup besar.

2. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan

Desa-desa tradisional tentu mempunyai karakteristik sosial budaya yang berbeda dengan desa-desa modern. Namun demikian, di Indonesia ragam desa di tiap-tiap daerah tidak mempunyai perbedaan yang berarti dengan kata lain desa-desa di wilayah Indonesia memiliki ciri yang hampir sama satu sama lain. Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat pedesaan sebagaimana diuraikan Marzuki (1999) memiliki karakteristi sebagai berikut:

a. Nilai-Nilai

Nilai didefinisikan sebagai sebuah konsep dari suatu keinginan, sebagai acuan dalam menilai sesuatu, sebagai pedoman dalam mengambil keputusan atau bertingkah laku, atau sebagai ungkapan perasaan terhadap sesuatu yang disukai. Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat biasanya sangat melekat dan dijadikan acuan bagi pola tingkah laku masyarakat pada umumnya. Adapun nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat pedesaan, diantaranya:

1) Familisme, dicirikan dengan adanya pengaturan individu secara kekeluargaan, tingginya keterikatan terhadap kerabat, serta tidak adanya keinginan untuk mengikat aktivitas dengan orang yang bukan kerabatnya.

2) Fatalisme, dengan sifat-sifat yang negatif seperti cepat menyerah, pasif, dan pesimis.

3) Tingkat empati yang rendah, yang dicirikann oleh ketidakmampuan seseorang dalam memandang orang lain yang mempunyai peranan yang berbeda atau mempunyai posisi yang lebih baik.

4) Tidak mau berisiko, yang umumnya ditandai dengan enggannya seseorang untuk memanfaatkan peluang yang ada, terlebih untuk mencoba hal-hal baru.

5) Tradisionalisme, yaitu cendemng lebih'berorientasi pada masa lalu.
6) Cepat merasa puas, artinya tidak ada keinginan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi dan tidak menginvestasikan hasil yang diperolehnya untuk masa depan
7) Cepat menyerah kepada nasib dan keadaan alam.

Di Indonesia, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terdahulu telah banyak mengalami pergeseran, terlebih setelah dewasa ini masyarakat berani menyampaikan aspirasi secara langsung terhadap pemegang kekuasaan. Terdapat dikotomi pergeseran nilai-nilai, di satu sisi tempaan hidup yang keras pada kurun waktu terakhir mengakibatkan masyarakat semakin apatis terhadap pemerintah, sehingga menjadi tidak mudah untuk melakukan perubahan perilaku dan pergeseran nilai-nilai ke arah yang lebih positif.

b. Kepercayaan/Norma Sosial

Kepercayaan/norma sosial sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Norma-norma sosial ini mendekati pola tingkah laku yang dianut, berupa tata cara, kebiasaan, adat istiadat, atau hukum yang berlaku. Kepercayaan atau norma sosial ini sangat sulit mengalami perubahan, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang memegang teguh ajaran nenek moyangnya (seperti acara pesta panen atau nyadran di laut untuk memohon keselamatan berusaha). Namun demikian, bisa saja norma-norma tersebut berubah, tergantung pada seberapa jauh norma-norma baru tersebut dapat diadaptasi masyarakatnya.

c. Pola Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial atau dikenal dengan istilah stratifikasi muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksamaan-ketidaksamaan atau pembagian-pembagian. Bermula dari pola pemilikan tanah yang dimiliki oleh perorangan, yang berkembang menjadi pola pemilikan kekayaan, kesejahteraan, tingkat pendidikan, jabatan dan lain-lain. Umumnya stratifikasi terdiri dari tiga tingkatan, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Kelas atas dicirikan dengan segala sesuatu yang *superior*, seperti status sosial yang tinggi, kepemilikan harta yang banyak, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Kelas bawah adalah kaum kebanyakan yang biasanya miskin, tidak berpendidikan, atau ciri lain yang bersifat marjinal, sedangkan kelas menengah adalah mereka yang berada di antara keduanya.

d. Struktur Kekuasaan dan Pengaruh

Berkaitan dengan stratifikasi tersebut di atas, kekuasaan dan pengaruh merupakan karakteristik sosial budaya sasaran yang juga mempengaruhi kegiatan penyuluhan. Kekuasaan dan pengaruh sosial seseorang dicirikan oleh individu-individu yang mempunyai cara-cara berpikir yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain, serta mempunyai sifat kerjasama yang dinilai

cukup penting dalam menyelesaikan berbagai hal. Individu tersebut juga mampu dan mempunyai peranan dalam menggerakkan orang lain.

e. Organisasi Sosial

Organisasi sosial sangat erat kaitannya dengan jaringan hubungan sosial masyarakat di tempatnya bermukim. Contoh dari jaringan hubungan sosial ini antara lain adanya hubungan keluarga, tetangga, kelompok-kelompok, wilayah kerja (misalnya hamparan lahan usahatani), pemasaran, dan sebagainya. Organisasi sosial sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena dalam organisasi sosial masyarakat-saling berinteraksi dan saling bertukar informasi, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengubah perilaku lama menjadi perilaku yang baru dalam kehidupan sosial budaya serta kehidupan perekonomiannya.

3. Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Melengkapi pembahasan mengenai keadaan sosial budaya, ada baiknya disinggung beberapa perilaku sosial masyarakat pedesaan yang umum terjadi yang menjadi ciri dari kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Perilaku tersebut antara lain: konflik dan persaingan, kegiatan bekerja, sistem tolong-menolong, gotong royong dan jiwa gotong royong, serta musyawarah dan jiwa musyawarah (Sajogjo, 1991).

a. Konflik dan Persaingan

Di dalam suatu desa tempat masyarakat hidup berdekatan secara terus-menerus, kesempatan untuk munculnya pertengkaran sangat banyak dan sering terjadi. Pertengkaran tersebut pada umumnya terjadi pada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dibesar-besarkan dan menjalar ke arah yang lebih hebat.

Dalam skala pedesaan yang cukup luas, sumber konflik dan persaingan biasanya berkisar sekitar, masalah tanah, kedudukan, kekuasaan, gengsi, perkawinan, antaretnis, atau antara dua keluarga yang berbeda status, perbedaan antara kaum tua dan muda, serta perbedaan antara pria dan wanita. Yang paling berbahaya apabila, konflik itu berkembang lebih besar lagi menjadi konflik antarbudaya. Namun pada umumnya hukum-hukum adat hanya memperhatikan masalah-masalah kecil terutama mengenai adat istiadat dan proses untuk memecahkan pertentangan dan pertengkaran tersebut.

b. Kegiatan Bekerja

Di beberapa desa di Indonesia, bekerja keras merupakan syarat penting untuk dapat bertahan hidup. Untuk membangun suatu masyarakat yang tingkat perekonomiannya belum berkembang, sebaiknya ada sistem perangsang bagi masyarakat untuk bekerja (Hoselitz dalam Sajogjo, 1991). Sistem perangsang tersebut harus mampu memperbesar kegiatan orang bekerja, memperbesar keinginan seseorang untuk menghemat atau menabung, serta memperbesar

motivasi seseorang untuk mau mengambil risiko dalam mengubah cara-cara lama yang dirasa masih belum memberikan hasil yang maksimal. Namun yang paling penting adalah bahwa perangsang tersebut dapat menggerakkan masyarakat dengan tanpa beban paksaan.

Di Indonesia yang kebanyakan penduduk desanya bercocok tanam, pola pekerjaan yang sering terlihat adalah adanya kebutuhan pekerja yang banyak pada saat-saat tertentu (misalnya pada saat penanaman padi atau panen) tetapi saat tertentu malah tidak memerlukan banyak orang. Dalam masa-masa yang paling sibuk umumnya diperlukan tenaga dari luar keluarga yang disewa dengan sistem tertentu atau meminta bantuan tenaga dari sesama warga desanya.

c. Sistem Tolong-Menolong

Tambahan tenaga bantuan tanpa upah adalah salah satu bentuk pertolongan pekerjaan. Kompensasi yang diharapkan oleh pemberi tenaga bantuan bukanlah bagian dari hasil pekerjaan atau upah melainkan tenaga bantuan lagi (apabila suatu saat orang tersebut membutuhkan bantuan). Selain, dalam hal pekerjaan, aktivitas tolong-menolong juga terlihat dalam hal lain seperti, aktivitas kehidupan rumah tangga, aktivitas pelaksanaan suatu hajatan/pesta, atau dalam hal terjadinya musibah. Koentjaraningrat dalam Sajogjo (1991) mengemukakan bahwa sikap dan kerelaan menolong pada tiap-tiap jenis pertolongan berbeda-beda. Orang-orang desa akan otomatis menolong warganya yang terkena musibah atau meninggal tanpa berpikir untuk meminta balasan. Namun dalam menolong kegiatan bertani, ada kecenderungan bagi, mereka untuk mendapatkan balasan tenaga.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang-orang sesama warga desa biasanya mempunyai sifat tolong-menolong yang berbeda ditinjau dari aktivitas sosial dan tipe tolong-menolong. Dalam hal kebutuhan keluarga, biasanya tolong-menolong terjadi diantara orang-orang yang ada di dalam rumah tangganya (misalkan membereskan rumah). Dalam hal penyelenggaraan pesta, tolong-menolong dilakukan dengan kaum kerabat dan dalam hal pekerjaan pertanian, tolong-menolong dilakukan dengan sesama warganya.

d. Gotong-royong dan Jiwa Gotong-royong

Sedikit berbeda dengan tolong-menolong, gotong royong adalah suatu bentuk kerja sama antara, sejumlah besar warga desa untuk mengerjakan proyek tertentu yang dianggap berguna bagi masyarakat umum. Istilah lain yang dipakai untuk hal seperti itu adalah kerja bakti. Gotong royong ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) kerja sama untuk melakukan kegiatan yang timbul dari inisiatif para warga desa dan (2) kerja sama yang dilakukan untuk mengerjakan proyek yang diintroduksikan dari atas Untuk jenis pertama kerelaan anggota masyarakat dalam melakukan gotong royong sangat tinggi, sedangkan untuk jenis kedua biasanya. sering dirasakan sebagai kewajiban yang tidak dapat dihindari. Untuk itu sebaiknya diberikan keyakinan tentang

kegunaan proyek-proyek pemerintah bagi masyarakat desa sehingga mereka merasa itu adalah proyek sendiri. Jiwa gotong royong ini dicirikan oleh sifat-sifat seperti; menilai kebutuhan umum lebih penting daripada kebutuhan individu, bekerja bakti adalah suatu hal yang terpuji, melakukan kerja secara bersama-sama mempunyai pahala yang lebih tinggi dibanding bekerja sendiri, dll.

e. Musyawarah dan Jiwa Musyawarah

Musyawarah merupakan satu gejala sosial yang umum terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu musyawarah tidak berdasarkan suara mayoritas, akan tetapi oleh seluruh peserta rapat dengan sistem rembug yang adil dan penuh pengertian. Pendapat-pendapat yang berbeda dalam musyawarah dilebur seluruhnya ke dalam suatu konsepsi bersama, sehingga timbul suatu kemufakatan. Jiwa musyawarah tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, warga-masyarakat bersedia berkompromi melepaskan sebagian pendapatnya agar bisa cocok dengan pendapat umum. Dalam jiwa musyawarah dituntut sikap arif yang menjunjung tinggi pendapat bersama dan tidak menitikbenarkan pendapat sendiri.

B. Latihan

1. Jelaskan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk!
2. Coba anda jelaskan secara singkat, 6 (enam) tipologi masyarakat Indonesia dan kebudayaannya menurut Koentjaraningrat!
3. Apa yang dimaksud integrasi dan diversitas kebudayaan?
4. Paul H. Landis dalam Rahardjo (1999), membedakan 4 (empat) pola pemukiman yang umum terdapat di dunia, coba anda diskripsikan!
5. Secara umum, seperti apakah karakteristik sosial budaya masyarakat pedesaan?

C. Rangkuman

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk dianggap sebagai suatu masyarakat dimana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa, sehingga para anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain..

Menariknya, kehidupan yang dipraktikkan oleh berbagai etnik di Nusantara yang majemuk, ternyata mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan saling menghargai karena adanya persamaan substansi nilai budaya. Realitas inilah yang selanjutnya melahirkan pandangan bahwa suku-suku bangsa di Nusantara adalah manusia yang tidak bersifat individu dan berdiri sendiri, bebas dari ikatan kelompoknya dan hanya mencari manfaat bagi dirinya.

Melainkan, manusia yang merupakan bagian dari kelompok dan baru mempunyai arti, jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. Sebagai perwujudan tersebut, sejak lama bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa mancanegara sebagai bangsa yang memiliki sifat khas dengan kepribadian (unik), diantaranya; ramah tamah, religius, suka membantu sesama (solidaritas – gotong-royong), dan mengutamakan musyawarah mufakat. Selalu menjaga keselarasan diantara tarikan partikularisme dengan universalisme, spiritualisme dengan materialisme dan individualism dengan kolektivisme.

Kebudayaan yang dikembangkan oleh setiap kelompok masyarakat senantiasa akan mencari dan membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang fungsional untuk dirinya sehingga menghasilkan wujud kebudayaan yang sangat beraneka ragam antarkelompok masyarakat. Kita dapat mengidentifikasikan bahwa pada satu aspek, kebudayaan dimaksudkan sebagai hadirnya seperangkat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman atau acuan perilaku bagi warga pendukungnya. Perangkat normatif ini ditanamkan pada individu-individu (baru) pendukungnya melalui proses sosialisasi. Dengan cara demikian pada gilirannya mereka mampu menjalin dan mengembangkan interaksi sosial dengan orang lain dalam suatu pola makna yang konstan.

Di kawasan pedesaan di Indonesia, keadaan fisik tiap wilayahnya berbeda-beda. Perbedaan ciri fisik tersebut akan menciptakan perbedaan pula pada jenis tanaman yang ditanam, sistem pertanian yang diterapkan dan pola kehidupan masyarakatnya. Secara umum struktur fisik wilayah perdesaan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Adapun daerah dataran rendah terbagi menjadi dua pembagian wilayah pula, yaitu daerah pantai dan bukan pantai.

Demikian halnya dengan pola pemukiman, merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan dengan jelas tentang keterkaitan antara struktur desa dengan pola kehidupan di dalam masyarakatnya. Setidaknya terdapat 4 (empat) pola umum pemukiman di dunia, yaitu; 1) *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT); 2) *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT); 3) *The Nebulous Farm Type* (NFT); dan *The Farm Village Type* (FVT).

Selain tergambar dari pola pemukimannya, perkembangan suatu desa dapat pula menggambarkan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan desa umumnya merupakan gejala perubahan sosial dari desa yang masih bersifat tradisional menjadi desa yang lebih modern. Perkembangan desa tradisional menjadi modern dijembatani oleh keadaan transisional, sehingga menciptakan desa transisi. Di Indonesia ragam desa di tiap-tiap daerah, ternyata cenderung tidak mempunyai perbedaan yang berarti dengan kata lain desa-desa di wilayah Indonesia memiliki ciri yang hampir sama satu sama lain. Sementara perilaku sosial masyarakat pedesaan yang umum terjadi dan menjadi ciri dari kehidupan masyarakat pedesaan di

Indonesia, adalah; konflik dan persaingan, kegiatan bekerja, sistem tolong-menolong, gotong royong dan jiwa gotong royong, serta musyawarah dan jiwa musyawarah

D. Tes Formatif

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Muchtar Lubis dalam buku “Manusia Indonesia”, menyebut ciri-ciri manusia Indonesia, yaitu?
   A. Hipokrit dan enggan bertanggungjawab
   B. Bebas dan mementingkan diri sendiri
   C. Percaya takhayul dan berwatak lemah
   D. A dan C benar
   E. Semua salah
2. Pandangan yang sedemikian kuatnya dalam memaknai nilai-nilai kebersamaan, menjadikan Manusia Indonesia sebagai mahluk?
   A. Majemuk
   B. Mandiri dan bebas
   C. Tidak terpisahkan dari kelompoknya
   D. Sosial sekaligus komunal
   E. Religius
3. Ciri-ciri pokok apa saja yang melekat pada masyarakat dan kebudayaan agraris?
   A. Memiliki sifat relasional dan struktural
   B. Memiliki hubungan erat dengan tanah
   C. Kedudukan sosial dan peranan individu ditentukan luasan penguasan tanah pertanian
   D. B dan C benar
   E. Semua benar
4. Berdasarkan evolusi masyarakat, urutkan tipe-tipe masyarakat agraris!
   A. Masayarakat pemburu-peramu, peladang berpindah dan petani sawah irigasi
   B. Masyarakat pantai, masyarakat dataran rendah dan masyarakat dataran tinggi
   C. Desa tradisional, desa transisi dan desa modern
   D. Masyarakat perdesaan (rural), masyarakat sub urban dan masyarakat perkotaan (urban)
   E. Semua salah
5. Mana yang bukan merupakan 7 (tujuh) unsur kebudayaan universal?
   A. Sistem religi
   B. Sistem kesenian
   C. Sistem pengetahuan
   D. Sistem pendidikan
   E. Sistem organisasi sosial
6. Jika "inti kebudayaan" dapat dinyatakan sebagai tradisi yang diwariskan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat dan kaidah-kaidah, apa yang menjadi inti kebudyaan Jawa?
   A. Ladang
   B. Kebun
   C. Sawah
   D. Lautan
   E. Semua salah

7. Tipe pemukiman ini biasanya dicirikan dengan adanya hubungan yang erat antarwarga, adanya kedekatan warga dengan lembaga-lembaga sosial, mempunyai kemudahan dalam bekerja sama dan sosialisasi anak-anaknya dan seterusnya.
   A. *The Pure Isolated Farm Type* (PIFT)
   B. *The Arranged Isolated Farm Type* (AIFT)
   C. *The Nebulous Farm Type* (NFT)
   D. *The Farm Village Type* (FVT)
   E. Semua benar
8. Desa tradisional memiliki ciri-ciri berikut ini:
   A. Lahan pertanian berpindah-pindah dan teknologi yang masih bersifat primitif
   B. Sistem pembagian kerja sederhana dan produksi pertanian bersifat primer
   C. Memegang teguh tradisi suci dan memiliki organisasi komunal
   D. Sistem status berdasarkan tingkat pendidikan dan semangat persaingan dalam berusaha
   E. A, B dan C benar
9. Pelapisan sosial atau dikenal dengan istilah stratifikasi, pada awal kemunculannya dalam masyarakat pedesaan merupakan akibat dari adanya ketidaksamaan dalam hal apa?
   A. Kepemilikan tanah
   B. Kepemilikan kekayaan
   C. Tingkat pendidikan
   D. Tingkat kesejahteraan
   E. Semua benar
10. Perilaku yang menjadi ciri umum masyarakat pedesaan adalah?
   A. Konflik dan persaingan
   B. Bersedia mengambil resiko
   C. Gotong-royong
   D. Musyawarah dengan suara terbanyak
   E. A dan C benar

Kegiatan Belajar 2 : Struktur dan Stratifikasi Sosial

A. Uraian Materi

Perubahan Sosial Dalam Masyarakat

Proses pembangunan pedesaan di daerah pertanian merupakan suatu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan perilaku sosial masyarakat dari suatu rekayasa sosial lewat upaya pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan industrialisasi menuju masyarakat modern. Menurut Giddens (1990) perubahan perilaku tersebut merupakan salah satu konsekuensi utama dari proses modernisasi yang dialami suatu masyarakat.

Perubahan sosial dapat disebabkan dari dalam masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat (eksternal). Menurut Rogers (1987) ada 3 kategori perubahan sosial, yaitu: a) *Immanent change*, yaitu suatu bentuk perubahan sosial yang berasal dari dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar; b) *Selective contact change*, yaitu outsider (pihak luar) secara tidak sadar dan spontan membawa ide-ide kepada anggota-anggota dari pada suatu sistem sosial; c) *Directed contact change*, yaitu apabila ide-ide baru atau cara-cara baru tersebut dibawa dengan sengaja oleh outsider.

Faktor eksternal saat ini lebih dominan memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial. Salah satunya datang dari unsur teknologi. Awalnya, teknologi hadir untuk memudahkan pekerjaan masyarakat akan tetapi nyatanya menyebabkan perubahan dimensi struktural. Teknologi memberikan dampak besar terhadap perubahan kultur desa, apalagi jika tidak disikapi dengan bijak.

Perubahan peranan yang awalnya dikerjakan oleh masyarakat menjadi dikerjakan oleh alat/mesin. Misalnya saja, masuknya teknologi traktor atau mesin penggiling padi ke pedesaan menyebabkan berkurangnya peranan buruh tani dalam pengolahan tanah. Hal tersebut juga berdampak pada berkurangnya peranan wanita dalam ekonomi keluarga di pedesaan.

Contoh lainnya, masuknya teknologi komunikasi. Dengan komunikasi, ide-ide baru dan informasi baru akan merubah penilaian masyarakat tentang berbagai kebutuhan yang selanjutnya akan mengubah tindakan yang ada ke arah tindakan yang baru. Akan

tetapi masuknya teknologi komunikasi ke desa juga dapat menyebabkan hubungan sosial tatap muka menjadi berkurang bahkan lama-kelamaan dapat hilang. Kegiatan tatap muka menjadi minim karena digantikan dengan *smartphone*, televisi, radio, dll.

Teknologi yang masuk ke desa tersebut umumnya banyak dikuasai oleh golongan ekonomi kelas menengah dan kelas atas sehingga golongan tersebutlah yang menentukan pasaran kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, struktur ekonomi desa dikuasai oleh pemegang modal kuat.

Struktur sosial

Masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia cenderung tergolong sebagai masyarakat yang tertinggal. Hal ini umumnya terjadi karena letaknya secara geografis jauh dari pusat perkotaan, pusat pembangunan dan pusat informasi. Tradisi yang terbentuk dalam pedesaan juga masih kuat dan kental dengan unsur kepercayaan nenek moyang sehingga sulit untuk menerima perubahan yang terjadi. Ketimpangan atau *gap* yang mengindikasikan hal tersebut diantaranya adalah tingkat kemiskinan dan minimnya pendidikan.

Masyarakat desa identik dengan sebutan masyarakat tradisional yang memiliki beberapa aspek seperti dalam aspek ekonomi menganggap uang bukanlah segalanya meskipun tetap membutuhkan uang tetapi tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memperoleh uang melainkan ada nilai syukur terhadap kepemilikan harta, aspek mata pencaharian yang umumnya tidak menentu karena tidak ada spesialisasi kerja, aspek budaya yang nilai-nilainya masih dipegang teguh, aspek politik yang masih bersifat subjektif bahkan kadang tidak rasional, aspek sosial yang sangat menonjolkan kedudukan/kehormatan serta aspek teknologi yang penggunaannya masih sangat rendah.

Konsep dasar masyarakat secara garis besar dapat ditelaah dalam dua sudut pandang yaitu: 1) masyarakat secara struktural dan 2) masyarakat secara dinamika. Secara struktural dikenal dengan struktur sosial yang merupakan jalinan unsur-unsur sosial yang pokok dalam sebuah masyarakat yang mencakup kelompok sosial, lapisan sosial, lembaga sosial dan kaidah atau norma sosial. Sementara secara dinamika, masyarakat lebih menekankan pada interaksi sosial, proses sosial yang merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama serta perubahan sosial.

Struktur sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Struktur sosial bersifat abstrak dan tidak dapat terlihat oleh mata. Selain itu, struktur sosial pada masyarakat bersifat sangat dinamis atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

Struktur sosial yang terjadi di pedesaan berkaitan dengan pola hubungan sosial, interaksi yang terjalin secara intens, dan menciptakan interdependensi yang berlangsung secara terus-menerus, yang kemudian akan membentuk pola yang terorganisasi serta fungsi dan peranan yang ada pada struktur sosial pedesaan. Pada umumnya struktur sosial di pedesaan adalah struktur sosial yang bersifat sederhana karena mata pencahariannya yang mayoritas sama atau seragam, aktivitas pedesaannya (*localite activities*) yang hanya terbatas pada persoalan cara mempertahankan hidup dan mencapai kebutuhan subsitemnya, dan mereka tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar dalam hal kebutuhan subsistemnya.

Dalam kehidupan kelompok pedesaan, struktur sosial terbagi menjadi dua yaitu: 1) struktur sosial statis secara vertikal dan horizontal serta 2) struktur sosial dinamis yang membentuk sebuah pola/*pattern*. Vertikal artinya berupa stratifikasi sosial kepemilikan tanah, kepemilikan hewan ternak, maupun kesalehan beragama. Adapun secara horizontal berbentuk kelompok sosial tertentu (kelompok ternak, kelompok nelayan, dll) yaitu *comunity of feeling* yang membentuk sebuah pola di dalamnya.

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa struktur sosial dalam pedesaan cenderung terbentuk lebih sederhana karena mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian yang sama. Mata pencaharian yang sama inilah yang membentuk aktivitas masyarakat menjadi cenderung terbatas yaitu sekadar untuk mempertahankan hidup dan mencapai kebutuhan sehingga umumnya mereka tidak ingin mengambil risiko tinggi terhadap sebuah perubahan yang terjadi.

Pada masyarakat pedesaan yang umumnya berada pada wilayah pertanian, tanah atau yang sejenisnya menjadi hal yang paling berharga. Tanah memiliki nilai tertinggi dari hal apapun di pedesaan seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto bahwa di lingkungan masyarakat pedesaan, tanah sewa dan hewan ternak sering dianggap jauh lebih berharga

daripada gelar akademis. Oleh karena itu, tanah bagi masyarakat petani menjadi simbol atau yang menentukan status seseorang di lingkungan masyarakatnya.

Peter L. Berger *dalam* Suyono (2008) menyatakan dalam konsepnya Simbolisme Status bahwa "*by the use of farious symbols one keep on showing the world where one has arrived"*yaitu orang senantiasa memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol status yang berfungsi untuk memberi tahu status yang diduduki seseorang. Pada masyarakat petani pedesaan, simbol status yang dimiliki petani akan menentukan status mereka. Aset berupa sepeda motor, kilang padi, *hand* traktor, dan alat perontok padi juga merupakan simbol status yang dapat dilihat pada petani padi.

Sementara pada kelompok masyarakat nelayan, penguasaan alat produksi menjadi pembeda kelas sosial diantara mereka. Kelompok sosial paling atas adalah mereka yang memiliki kapal motor lengkap dengan alat penangkapnya atau dikenal sebagai kelompok nelayan besar/modern yang bahkan tidak sedikit dari mereka juga merangkap sebagai pedagang pengumpul. Diikuti mereka yang memiliki perahu dan motor tempel sebagai kelas sosial kedua dan yang paling rendah adalah buruh nelayan yang umumnya tidak memiliki alat produksi selain tenaga mereka sendiri.

Stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial menunjukkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kata *stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya: strata) yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Menurut Pitirin A. Sorokin (1957) sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.

Soejono Soekanto (1982) mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki barang berharga seperti barang, uang, ternak dan sebagainya dalam jumlah yang sangat banyak dianggap berkedudukan dalam lapisan atas, sementara bagi mereka yang hanya memiliki sedikit sesuatu yang berharga dianggap tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan kedudukan manusia dalam masyarakat secara langsung menunjuk pada perbedaan pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat desa dipengaruhi oleh kekuasaan dan peran yang terdapat pada kedudukan sosial seseorang. Faktor tersebut dapat berupa unsur kekayaan, kekuasaan, wewenang, kehormatan hingga ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah desa biasanya terdapat orang-orang yang dihormati, berpendidikan, memiliki kekuasaan serta wewenang yang mengindikasikan adanya lapisan-lapisan yang disebut dengan stratifikasi sosial.

Setidaknya ada dua proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat: 1) terjadi dengan sendirinya seperti tingkat umur, kepandaian (intelegensi), kekerabatan, dll; 2) terjadi karena unsur kesengajaan yang disusun untuk suatu tujuan bersama.

Faktor umur. Untuk masyarakat-masyarakat tertentu, ada keistimewaan dari seorang anak sulung dimana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku mereka mendapat prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Azas senioritas yang ada dalam sistem pelapisan ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan, agaknya ada hubungan yang erat antara usia seseorang karyawan dengan pangkat atau kedudukan yang ditempatinya. Ini terjadi karena dalam organisasi tersebut pada asasnya karyawan hanya dapat memperoleh kenaikan pangkat setelah berselang suatu jangka waktu tertentu – misalnya telah berdedikasi selama lima tahun, 10 tahun atau lebih. Karyawan yang dipertimbangkan untuk mengisinya ialah mereka yang dianggap paling senior.

Faktor kepandaian. Kepandaian atau kecerdasan pada umumnya masih dipakai sebagai tolok ukur untuk membedakan orang dengan orang lainnya; dikatakan tidak mutlak benar karena dalam penelitian modern ternyata faktor kecerdasan ini tidak sekedar hanya bisa dibangkitkan, dikembangkan bahkan juga bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan tertentu. Faktor kepandaian atau kecerdasan seolah-olah memilah kelompok sekurangnya menjadi dua, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai kepandaian yang lebih dan orang-orang yang berkepandaian kurang. Kepandaian disini harus dibedakan dengan keterampilan, ada orang pandai tetapi tidak terampil, ada orang yang terampil tetapi tidak pandai, ada orang yang tidak pandai tetapi tidak terampil dan yang paling baik adalah orang yang pandai tetapi juga terampil.

Faktor kekerabatan. Kehidupan masyarakat pedesaan yang berbeda dengan masyarakat kota umumnya berasal dari keadaan lingkungan yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Desa terbentuk erat kaitannya dengan

naluri alamiah yang akan mempertahankan kelompoknya melalui kekerabatan. Kekerabatan dalam masyarakat pedesaan juga sangat kental pengaruhnya. Hal ini bisa terbentuk karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan keturunan.

Kekerabatan disini adalah kedudukan orang perorangan terhadap kedekatannya dengan sumber kekerabatan itu. Biasanya faktor kekerabatan berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga atau menyangkut sistem pewarisan. Semakin jauh hubungan kerabatnya maka semakin kecil kesempatan seseorang untuk menempati kedudukan tertentu dalam keluarga atau bahkan semakin kecil pula kesempatannya untuk memperoleh seperangkat fasilitas yang diwariskan oleh keluarganya.

Bentuk kekerabatan dapat bersifat matrilineal (penarikan dari garis keturunan ibu), patrilineal (penarikan dari garis keturunan ayah) maupun parental (penarikan dari garis keturunan ayah dan ibu). Kekerabatan dipedesaan masih terjalin karena adanya kebersamaan dan ikatan yang kuat. Mereka menyelesaikan banyak permasalahan dengan sistem musyawarah serta bergotong royong.

Proses yang ke-dua, yaitu sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, disamping dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu diantaranya adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan (*educational stratification*); bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih.

Sistem stratifikasi yang lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah stratifikasi pekerjaan (*occupational stratification*). Di bidang pekerjaan modern kita mengenal berbagai klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi pekerjaan, seperti misalnya perbedaan antara manager serta tenaga eksekutif dan tenaga administratif, buruh; antara tamtama, bintara,perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi.; Kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, kepala koordinator dan sebagainya.

Stratifikasi ekonomi (*economic stratification*), yaitu pembedaan warga masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi, pun merupakan suatu kenyataan sehari-hari. Dalam kaitan ini kita mengenal, antara lain, perbedaan warga masyarakat berdasarkan penghasilan dan kekayaan mereka menjadi kelas atas, kelas menengah, dan

kelas bawah. Dalam masyarakat kita terdapat sejumlah besar warga yang tidak mampu memenuhi keperluan minimum manusia untuk hidup layak karena penghasilan dan miliknya sangat terbatas, tetapi ada pula warga yang seluruh kekayaan pribadinya bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Di kalangan petani di pedesaan, kita menjumpai beberapa perbedaan antara petani pemilik tanah, petani penggarap dan buruh tani, yang mana masingmasing strata itu memiliki cara hidup tersendiri sesuai dengan kedudukan (ekonomi) nya dalam masyarakat.

Secara ekonomi, pelapisan sosial masyarakat pertanian terbagi menjadi tiga yakni: 1) kaum elite desa yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha; 2) mereka yang hanya memiliki cadangan pangan; 3) mereka yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha, serta mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang agar tetap hidup. Di pedesaan, secara umum stratifikasi tertinggi ditempati oleh mereka yang memiliki tanah luas dengan pengelolaan pertanian yang maju.

Esensi dari stratifikasi sosial adalah setiap individu memiliki beberapa posisi sosial dan tiap-tiap orang memerankan beberapa peran, sehingga memungkinkan terjadinya klasifikasi individu-individu tersebut ke dalam kategori status-peran. Klasifikasi tersebut, didasarkan atas posisi relatif dari peran yang mereka mainkan secara keseluruhan.

Contoh kasus atas kepemilikan tanah misalnya, dalam kelompok sebuah pedesaan dapat terbentuk tiga lapisan sosial yakni petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah, petani yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki pekarangan untuk rumah serta petani yang tidak memiliki tanah pertanian dan pekarangan untuk rumah.

Lain halnya berdasarkan kehormatan, dalam masyarakat pedesaan golongan peran pembuka tanah atau dikenal dengan sebutan cikal bakal (orang yang pertama kali membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggal) merupakan kelompok yang sangat dihormati. Jumlah kelompok ini umumnya sangat sedikit. Cikal bakal dan keturunannya dianggap sebagai golongan elite yang dituakan atau menjadi sesepuh dalam kelompok masyarakat. Golongan kedua ditempati pemilik tanah atau orang kaya yang dihormati karena keuletannya namun bukan dari keturunan cikal bakal, ketiga dari petani dengan tanah sedikit yang cukup untuk menghidupi kehidupannya sendiri serta keempat buruh tani yang bekerja pada sekitar pertanian namun tidak memiliki tanah. Kelompok inilah yang paling banyak dalam stratifikasi masyaarakat di Pulau Jawa.

B. Latihan

1. Jelaskan perubahan sosial yang berhubungan dengan gejala modernisasi yang terjadi di pedesaan!
2. Jelaskan bagaimana pengaruh struktur sosial dapat menyebabkan adanya lapisan-lapisan dalam masyarakat!

C. Rangkuman

1. Perubahan sosial sering dikaitkan dengan modernisasi, industrialisasi dan pembangunan, sehingga pengertiannya adalah perubahan perilaku yang diakibatkan karena terjadinya modernisasi, industrialisasi dan pembangunan tersebut.
2. Perubahan sosial dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1) perubahan sosial yang berasal dari dalam system itu sendiri, 2) perubahan akibat ide-ide baru yang dibawa secara spontan oleh orang luar kepada anggota dari suatu sistem social, 3) perubahan yang dibawa secara sengaja.
3. Struktur sosial merupakan pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.
4. Struktur sosial terbagi menjadi dua yaitu: 1) struktur sosial statis secara vertikal dan horizontal serta 2) struktur sosial dinamis yang membentuk sebuah pola/*pattern*.
5. Stratifikasi sosial menunjukkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat yang dalam masyarakat desa dipengaruhi oleh kekuasaan dan peran yang terdapat pada kedudukan sosial seseorang.
6. Proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat terbagi menjadi dua yaitu: 1) terjadi dengan sendirinya seperti tingkat umur, kepandaian (intelegensi), kekerabatan, dll; 2) terjadi karena unsur kesengajaan yang disusun untuk suatu tujuan bersama.

Daftar Pustaka

Geertz, C. 1976. Agricultural Involution: process of ecological change in Indonesia. Berkeley: University of California Press.

Herskovits, M.J. 1955. Cultural Anthropology. New York: Alfred A. Knop£ Koentjaraningrat (Ed.). 1979. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kluckhohn, F.R. 1961. "Dominant and variant value-orientation" in: FR Cluchohn & HA Murray (Eds.), Personality in Nature, Society and Culture. New York: Alfred A Knoff

Soetarto Endriatmo dan Agusta Ivanovic (2015). “Masyarakat dan Kebudayaan” dalam Sosiologi Umum. Editor Nasdian Fredian Toni. Jakarta: Buku Obor.

Redfield, R. 1956. Peasant Society and Culture. Chicago: University of Chicago Press.

Tan, M.G. 1973. "Masalah perencanaan penelitian" dalam Koentjaraningrat (Ed.), Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: LIPI.

Giddens, Antony. 1990. The Consequences of Modernity. London: UK Polity Press.

Rogers, Everet M. dan F.F. Shoemaker.1987. Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Surabaya: Usaha Nasional.

Sorokin, Pitirim A. 1957. Social and Cultural Dynamics. Sargent. Boston.

Soekanto, Soedjono. 1982. Pengantar Sosiologi. Jakarta : LP3ES.

Suyono. Skripsi 2008. Stratifikasi pada Masyarakat Transmigrasi Desa Rokan Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

MODUL 2 :
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

Kegiatan Belajar 1: Perkembangan Teori dan Paradigma Pembangunan

A. Uraian Materi

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istllah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change.* Identifikasi pembangunan dengan beberapa *term* tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa *term* lain yang berlainan arti. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Akan tetapi pada sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai perwujudan fisik.

Ukuran fisik itu menjadi ukuran bagaimana anggapan bahwa pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan di negeri ini, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Jalan-jalan lebar dan mulus telah dibangun, berbagai fasilitas publik seperti rumah sakit, pendidikan, PDAM, dan sebagainya. Tidak ketinggalan juga berbagai sarana kemudahan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi.

Oleh karena pembangunan pada dasarnya tidak hanya persoalan fisik maka pada modul ini, penting bagi kita untuk menyelaraskan makna pembangunan itu pada perspektif pertumbuhan kemajuan negara, meski makna pembangunan yang dipahami secara umum tersebut tidaklah salah. Pokok pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh berbagai bidang, yakni pertama ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materil. Kedua adalah tahap kesejahteraan sosial. Ketiga adalah tahap

keadilan sosial. Dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial", ditegaskan bahwa (sistem) perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, dalam hal ini sumber daya alam sebagai "pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, apabila kemakmuran bagi seluruh rakyat belum tercapai, maka Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

1. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Beberapa pakar memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda diantarnnya :

1) Easton (1985), pembangunan adalah Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. *Pertama*, adanya *input*, yaitu bahan masukan konservasi. *Kedua*, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. *Ketiga*, adanya *output*, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.
2) Emil Salim, pembangunan berkesinambungan (*sustainable development)* sebagai "suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah,investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.
3) Johan Galtung, pembangunan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan sosial.
4) Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
5) Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004 pembangunan merupakan upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
6) Riyadi dan Deddy Supriyadi. Bratakusumah, 2005 pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.
7) Siagian (1994) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

8) Ginanjar Kartasasmita (1994) pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
9) Deddy T. Tikson (2005) pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Mencermati hal itu, pembangunan merupakan suatu proses perencanaan untuk memciptakan suatu perubahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku Teori *Pembangunan Dunia Ketiga* Arief budiman (1995) menguraikan ada lima pendekatan yang digunakan untuk mengukur pembangunan. Berikut akan diuraikan ukuran keberhasilan pembangunan yang telah dihimpun oleh Arief budiman tersebut. Setalah uraian ini penulis akan menawarkan cara yang perlu dilakukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan menurut pendapat penulis.

a. Kekayaan rata-rata.

Menurut pendekatan ini sebuah masyarakat dikatakan berhasil membangun bila pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat tersebut cukup tinggi. Cara mengukurnya

adalah diukur dari Gross National Product (GNP) dan Gross Domestic Product (GDP) yang dibagi dengan Jumlah penduduk. Dengan demikian dapat diukur produksi rata-rata setiap orang dari sebuah negara.

b. Pemerataan

Pendekatan ini mengkrtik pendekatan pertama yang hanya mengukur kemakmuran sebuah negara hanya dari produksi rata-rata orang disetiap negara. Menurut pendekatan ini bisa jadi kekayaan rata-rata tersebut hanya dinikmati oleh sebagain kecil orang, dan sebagian besar orang yang lain yang tidak mendapat akses terhadap pertumbuhan ekonomi tetap hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu pendekatan ini

menekankan pada pentingnya pemerataan terhadap hasil-hasil dari pertumbuhan ekonomi. Cara yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah dengan melihat berapa prosen dari GNP di raih oleh 40% penduduk miskin, dan berapa persen dari 40% dinikmati pendudk menengah,serta berapa prosen dari 20% dinikmati penduduk kaya.Kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa maka pemerataan dalam negara tersebut dianggap tidak tercapai. Cara lain adalah dengan menggunakan indeks gini. Indeks ini diukur dengan angka antara 0-1. Bila indeks gini sama dengan satu maka terjadi ketimpangan maksimal,tapi bila maka ketimpangan tidak ada.Jadi semakin kecil indek gini maka semakin kecil pula ketimpangan yang terjadi dalam sebuah negara.

c. Kualitas Hidup

Pendekatan ini tidak hanya mengukur pembangunan dari sudut pandang ekonomi,melainkan menekanakn pada kesejahteraan penduduk. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah pendapat moris yang mengenalkan PQLI (Physical Quality Indeks), yang mengukur tiga indikator yaitu : (1) rata-rata harapan hidup (2) Rata-rata jumlah kemtian bayi (3) Rata-rata presentasi bauta huruf.Ketika indeks ini di dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ternyata di masyarakat negara berkembang terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk.

d. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pendekatan ini menekankan pada pentingnya aspek lingkungan hidup sebagai indikator dalam pembangunan. Pendekatan ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang didapat saat ini, bisa tidak berarti apa-apa bila harus

mengorbankan lingkungan hidup. Bagi pendekatan ini kerusakan lingkungan hidup agar berdampak buruk terhadap masyrakat tersebut dimasa depan. Sebab bila kemampuan lingkungan menurun untuk memenuhi kebutuhan manusia menurun,maka hal tersebut akan memiskinkan masyarakat tersebut di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan ini memasukan kemampuan untuk melakukan pelestarian terhadap lingkungan hidup sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.

e. Keadilan sosial dan kesinambungan

Pendekatan ini menggabungkan dua pendekatan yang sebelumnya sudah melakukan krtitik terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama, yaitu pendekatan pemerataan dan lingkungan hidup. Dalam pendekatan ini keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana pemerataan dapat terwujud, sekaligus lingkunagn hidup tetap lestari. Menurut pendapat saya kelima ukuran pembangunan tersebut bias sudut pandang orang luar dalam memandang sebuah indikator kehidupan yang lebih baik dalam sebuah masyarakat. Para teoritikus hanya mengukur dari sudut pandang mereka, tapi tidak memperhitungkan ukuran hidup yang lebih baik menurut Indikator masyarakat sendiri.

Pandangan seperti ini hanya menempatkan masyarakat sebagai objek dari pembangunan. Padaha yang paling mengerti tentang kebutuhan masyarakat sendiri tentunya hanya diri mereka sendiri.Posisi orang luar hanya dapat memperkirakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ditambah lagi kebutuhan masing-masing masyarakat tidak bisa disamakan, sebab kondisi lingkungan fisik, sosial dan budaya yang melatar belakangi sebuah masyarakat tidak seragam.

Oleh karena itu, cara mengukur Indikator keberhasilan pembangunan perlu ditambah dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Kondisi dapat dilakukan dengan memberikan ruang pada masyarakat untuk mengukur kerhasilan pembangunan menurut ukuran mereka sendiri. Bila pembangunan diperuntukan bagi masyarakat, maka rakyat harus dianggap mampu merumuskan kebutuhanya sendiri. Langkah yang perlu dilakukan untuk memahami kebutuhan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan kebutuhan sendiri dan menilai sendiri apakah kebutuhanya sudah terpenuhi atau tidak dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan mekanisme yang partisipatif seperti ini akan didapatkan ukuran-ukuran

dan kriteria-kriteria keberhasilan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat secara nyata dan tentunya hasilnyaa tidak seragam, melainkan sangat beragam tergantung pada kondisi fisik, sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat tersebut.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok: *pertama*, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan *kedua*, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material; pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreativitasnya (Budiman, 1995: 13-14).

Dalam praktek pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka *production centered development* (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, *link and match*, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai *people- centered development* atau *panting people first* (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya,

manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas dari pada sekedar membentuk manusia profesional dan terampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelomment*) (Kuncoro, 2003). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*.

a. *Economic growth* (model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan)

   Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

   1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan SDM;
   2. Peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas;
   3. Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional.

b. *Basic needs* (model pembangunan kebutuhan dasar/kesejahteraan)

   Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan

sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain.

Untuk itu, maka pemerintah dapat melakukan subsidi atau bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.

c. *People centered* (model pembangunan yang berpusat pada manusia)

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan sustainability sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan GNP atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah empowering/ pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

2. Teori Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Adapun Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan: 1) modernisasi; 2) keterbelakangan; dan 3) ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

1). Teori Modernisasi

Teori modernisasi berkembang pasca perang dunia kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda

seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu 'menolong' negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika.

Keberhasilan pembangunan yang diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana- sarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi (Budiman, dalam Frank,1984: ix). Berikut ini, asumsi dasar dari teori modernisasi.

a. Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikkan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat negara-negara berkembang;
b. Berangkat dari modernisasi tersebut maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal (traditional life);
c. Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

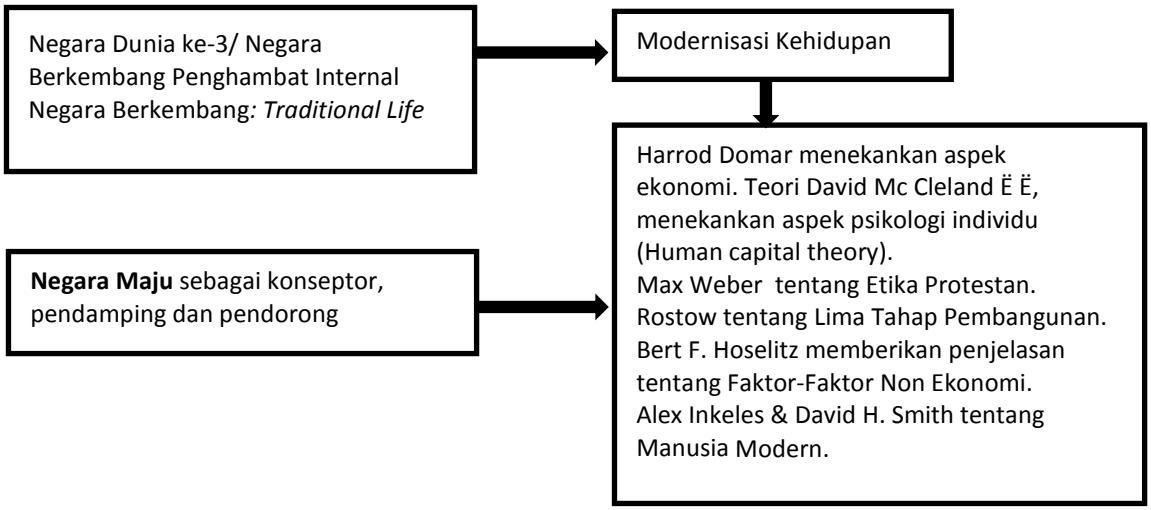

Gambar 1.2
Bagan Teori Modernisasi

1. Teori Harrod Domar tentang tabungan dan investasi menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi/*invest*/ penanaman modal.

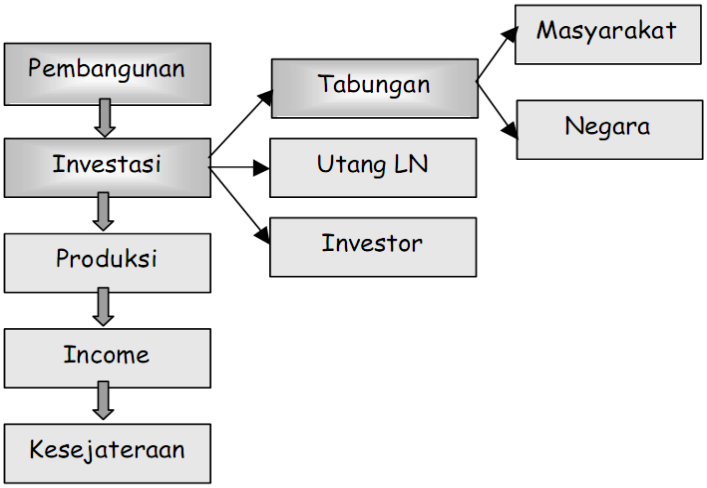

Gambar 1.2
Bagan Teori Harrod Domar

Pembangunan membutuhkan investasi sebagai pendorong produksi. Dari produktivitas ini maka akan menyerap tenaga kerja yang membentuk regulasi ketenagakerjaan sekaligus menyumbang negara dalam bentuk pajak. Persoalan kegagalan teori ini berlangsung karena kejadian *capital flight*, yakni larinya modal ke luar negeri. *Capital flight* ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal:

a. tuntutan buruh yang dianggap menghambat produktivitas dan surplus *value* investor;
b. perizinan;
c. pungutan liar.

Dengan demikian, untuk memecahkan persoalan keterbelakangan pada negara-negara dunia ketiga adalah dengan mencari tambahan modal dari dalam maupun luar melalui penanaman modal atau utang luar negeri.

2. *Human capital theory* David McCleland menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi maka mendorong tingginya tingkat pendapatan.

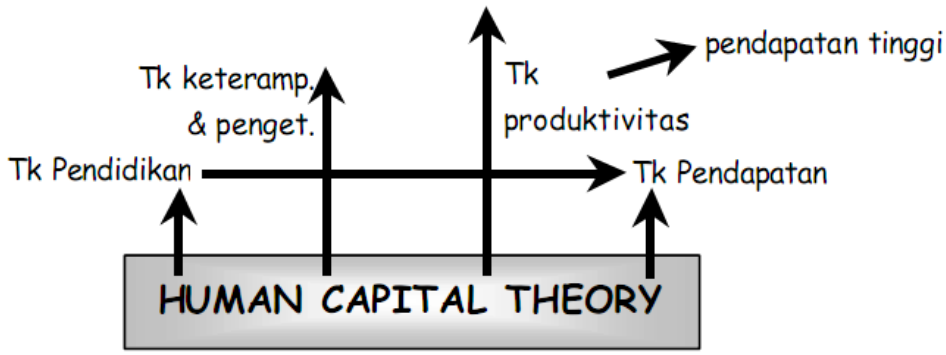

Gambar 1.3
Bagan Teori David McCleland

3. Teori Weber tentang peran agama khususnya Protestan dalam pembentukan kapitalisme merupakan sumber aliran ini. Apabila nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi maka proses pembangunan dalam masyarakat tersebut dapat terlaksana.

   Etika Protestan lahir di Eropa melalui agama Protestan oleh Calvin, mengatakan bahwa seseorang setelah mati akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi, manusia tidak mengetahui sehingga mereka menjadi tidak tenang, cemas karena ketidakjelasan nasibnya. Indikatornya dapat dilihat pada saat hidup di dunia, jika seseorang:

   a. sukses/berhasil di dunia Ë tanda-tanda masuk surga;
   b. gagal di dunia Ë tanda-tanda masuk neraka.

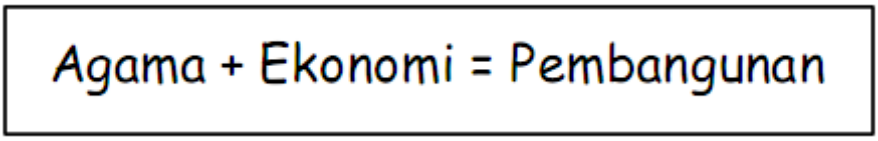

Gambar 1.4
Bagan Teori Weber

Dengan indikator tersebut maka pengikutnya belajar/berjuang untuk mencapai indikator masuk surga.

1. Rostow tentang **lima tahap pembangunan** menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

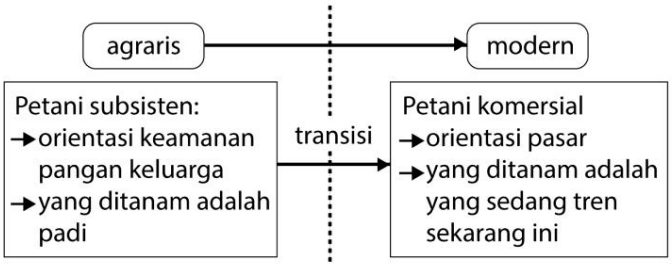

Gambar 1.5
Bagan Teori Rostrow

Lima tahap pembangunan:

a. masyarakat tradisional;
b. prakondisi untuk lepas landas;
c. lepas landas;
d. bergerak ke kedewasaan;
e. zaman konsumsi massal yang tinggi.

5. Bert F. Hoselitz tentang **faktor-faktor non-ekonomi** membahas faktor- faktor non-ekonomi yang ditinggalkan Rostow yang disebut sebagai faktor kondisi lingkungan yang dapat dicari dalam masyarakat x. Keterampilan tertentu menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas.

   Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi ini, adalah modernisasi seolah-olah tidak memberikan celah terhadap unsur luar yang dianggap modern sebagai sumber kegagalan, namun lebih menekankan sebagai akibat dari dalam masyarakat itu sendiri. Asumsi ini ternyata banyak menimbulkan komentar dari berbagai pihak, terutama dari kelompok pendukung teori Dependensi sehingga timbul paradigma baru yang dikenal sebagai teori Modernisasi Baru (Suwarsono-So, 1991: 58-61).

6. Alex Inkeles & David H. Smith tentang **manusia modern** menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun.

2). Teori Dependensi

Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili “suara negara-negara pinggiran” untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi.

Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai "musang berbulu domba" dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara-negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya, seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung.

Keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara berkembang yang telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara maju menyebabkan ketidakpuasan terhadap asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh teori modernisasi. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan), secara ekstrem dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (*the development of underdevelopment*); siapa sebenarnya yang menolong dan siapa yang ditolong ? Andre Gunter Frank (1967) dianggap sebagai salah seorang tokoh

pencetus teori Dependensi ini mengatakan bahwa keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju (Budiman, dalam Frank, 1984: xii-xiii).

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup: (1) keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga; (2) ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh 'faktor luar'; (3) permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju; (4)

situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global; dan (5) keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111).

Teori Dependensi ini bukannya tanpa kekurangan, bahkan kritik yang dilontarkan mungkin lebih banyak dari sanggahan terhadap teori Modernisasi (Suwarsono-So, 1991: 137). Salah satu persoalan yang luput dari perhatian teori dependensi adalah kurangnya pembahasan tentang kolonialisme yang pernah tumbuh subur di kebanyakan negara-negara berkembang. Menurut perspektif dependensi, pemerintahan kolonial didirikan dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan jajahan, dan pemerintahan ini tidak akan pernah dibentuk dengan tujuan untuk membangun negara pinggiran (Suwarsono-So, 1991: 121).

Teori ketergantungan ini lahir dari dua induk. Induk yang pertama adalah seorang ahli ekonomi liberal: Raul Prebisch. Induk yang kedua adalah teori- teori Marxis tentang imperialism dan kolonialisme, serta seorang pemikir Marxis yang merevisi pandangan Marxis tentang cara produksi Asia, yakni Paul Baran. Kedua induk ini adalah para pemikir pendahulu dari Teori Ketergantungan.

1) Raul Prebisch: Industri Substitusi Impor

Raul Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal, yang menjadi sekretaris eksekutif sebuah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1948 di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan nama ECLA atau Economic Commission for Latin America. Sebelumnya, antara tahun 1935 sampai 1943, Prebisch adalah Presiden Direktur Bank Sentral Argentina. Oleh karena itu, dia banyak bergumul dengan dampak masa depresi besar tahun 1930-an. Pada tahun 1950 Prebich menjadi Direktur ECLA. Perhatiannya tertuju pada persoalan yang diuraikan di atas: mengapa negara-negara yang melakukan spesialisasi di bidang industri menjadi negara-negara kaya, sedangkan mereka yang memilih bidang pertanian tetap saja miskin?

Menurut pendapat Prebisch yang paling terkenal: negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi, bila mau membangun dirinya.

Industrialisasi ini dimulai dengan industri substitusi impor. Barang-barang industri yang tadinya diimpor, harus diproduksi di dalam negeri. Tentunya ini berarti bahwa industri-industri yang masih bayi ini harus dilindungi dari industri-industri besar yang sudah sangat kuat di negara-negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi industri-industri bayi ini melalui kebijakan proteksi. Baru setelah industri bayi ini menjadi dewasa dan sanggup bersaing dengan industri-industri yang ada di negara pusat, proteksi ini ditarik kembali.

Ekspor barang-barang primer masih tetap penting peranannya, karena dari devisa yang dihasilkannya dapat diimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin industri, sementara itu diusahakan terus supaya barang-barang modal ini di kemudian hari bisa dibuat sendiri oleh negara-negara ini. Peran pemerintah dalam proses industrialisasi, seperti sudah diuraikan di atas, menjadi besar. Bagi Prebisch, campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangan.

2) Perdebatan tentang Imperialisme dan Kolonialisme

Pemikiran tentang imperialisme dan kolonialisme bergumul dengan pertanyaan: mengapa bangsa-bangsa di Eropa melakukan ekspansi keluar dan menguasai bangsa-bangsa lainnya, baik secara politis maupun secara ekonomis? Apa yang menjadi dorongan utamanya? Ada tiga kelompok teori yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, yakni kelompok teori yang menekankan:

a. idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan, untuk menciptakan dunia yang lebih baik;
b. kehausan manusia terhadap kekuasaan, untuk kebesaran pribadi maupun kebesaran masyarakat dan negaranya.
c. pada keserakahan manusia, yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan, yang didorong oleh kepentingan ekonomi.

Ketiga kelompok teori ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok teori God (Tuhan, yang melambangkan keinginan manusia untuk menyebarkan agama untuk menciptakan dunia yang lebih baik), teori Glory (kebesaran, yang melambangkan kehausan manusia akan kekuasaan), dan teori Gold (emas, yang melambangkan

keserakahan manusia terhadap harta). Marilah kita bahas kelompok-kelompok teori ini satu persatu.

a. **Teori God**

Kelompok teori yang pertama yang akan dibahas adalah kelompok teori God karena isinya yang lebih sederhana. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi utama dari orang-orang Eropa untuk mengarungi samudra dan bertulang di negara-negara lain adalah untuk menyebarkan agama. Mereka ingin membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar, yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka, karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di benak orang-orang Eropa ketika itu. Oleh karena itulah, dalam kapal-kapal yang mengarungi samudra ke benua Amerika, Afrika, dan Asia, di samping membawa tentara (yang katanya untuk melindungi diri bila diserang), mereka juga membawa para pendeta.

b. Teori Glory

Kelompok teori kedua yang akan dibahas adalah kelompok teori Glory, yang menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialism dan kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Salah satu pencetus teori ini yang terkenal adalah Joseph A. Schumpeter. Dia membantah bahwa imperialism dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberikan bukti-bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialis dan kolonialis.

Bagi Schumpeter, kapitalisme bertentangan dengan imperialisme. Kapitalisme dibangun atas dasar rasionalitas, sedangkan imperialism tidak. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk berperang, untuk membuktikan keperkasaan diri. Hal-hal seperti ini jauh dari pikiran seorang kapitalis yang rasional. “Karena itulah setiap perang selalu secara seksama diberi alasan sebagai perang untuk mempertahankan diri oleh semua pemerintah yang terlibat, dan oleh semua partai politik dalam pernyataan resmi mereka, ini berarti bahwa pernyataan perang dengan alasan lain merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima

secara politis…" demikian Schumpeter (dalam Budiman, 1996 : 51).

c. Teori Gold

Kelompok teori ketiga adalah teori Gold, atau teori yang menjelaskan imperialism dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Salah satu bukti klasik tentang imperialism yang termasuk dalam kategori ini ditulis oleh John A. Hobson, dengan judul *Imperialism: A Study*. Dimulai dengan buku ini, persiapan *imperialism* kemudian menjadi bahan diskusi.

Dalam karyanya yang lain, Hobson pada intinya menjelaskan, imperialism terjadi karena dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Imperialisme ada hubungannya dengan kapitalisme. Pada suatu saat, perkembangan kapitalisme mencapai sebuah keadaan di mana produktivitas menjadi semakin meningkat, tetapi pasar di dalam negeri terbatas. Buruh yang dibayar dengan upah yang rendah tidak bisa membeli kelebihan produksi yang ada. Oleh karena itu, hasil-hasil produksi ini harus dicarikan pasar di luar negeri.

Pada titik ini juga, investasi di dalam negeri menjadi kurang menguntungkan karena pasar dalam negeri sudah jenuh. Maka, modal yang ada diekspor keluar. Modal diinvestasikan di negara-negara lain yang pasarnya masih belum jenuh.

Demikianlah uraian serba singkat dari kelompok-kelompok teori God, Glory, dan Gold. Tampaknya, yang banyak dianut adalah teori imperialism jenis ketiga, yakni yang menjelaskan gejala ini dari motivasi ekonomi. Teori Marxis tentang imperialisme memang dimulai oleh Lenin, tetapi kemudian muncul teori-teori yang merupakan variasi lain dari teori yang dicetuskan Lenin. Jelas, teori Marxis semuanya tergolong pada kelompok teori di mana kepentingan ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya imperialisme.

3) Paul Baran: Sentuhan yang Mematikan dan Kretinisme

Seperti dikatakan sebelumnya, Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan di negara- negara Dunia Ketiga. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara pra-kapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara

yang terakhir ini untuk berkembang seperti negara-negara kapitalis di Eropa, Baran berpendapat lain. Baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara pra-kapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Pandangan atau teori Baran ini dituangkannya dalam bukunya yang terkenal, *The Political Economy of Growth*, sebuah studi tentang dampak kolonialisme di India yang diterbitkan pada tahun 1957.

Dengan pendapatnya ini, berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran (meminjam istilah Prebisch) berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalis seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit tetap kerdil dan tidak bisa besar.

Mengapa negara-negara yang menjadi korban imperialism tidak bisa mengembangkan dirinya, berbeda dengan kapitalisme yang menggejala di negara-negara pusat dulu? Menurut Baran kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga prasyarat:

a. meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dari pedesaan;
b. meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja
c. mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta;
d. mengumpulnya harta di tangan para pedagang dan tuan tanah.

Faktor ketiga itulah yang membuat kapitalisme dimungkinkan di Eropa. Surplus yang ada di tangan para pedagang dan tuan tanah kemudian diinvestasikan ke bidang industri. Sementara yang terjadi di negara-negara pinggiran justru sebaliknya. Munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat dari dunia Barat ke negara-negara Dunia ketiga membuat surplus. Surplus tersebut, diambil oleh kaum pendatang. Jadi, bukan akumulasi modal, melainkan penyusutan modal.

Bagaimana proses penyusutan modal di negara-negara Dunia Ketiga ini terjadi? Baran menjelaskan dengan melihat sifat kelas dari pemerintah yang berkuasa di negara-negara Dunia Ketiga. Di negara-negara ini, terdapat macam-macam kelas di

masyarakatnya. Pertama, adanya kelas tuan tanah yang kaya di pedesaan. Tuan tanah ini juga merupakan produsen dari hasil- hasil pertanian yang kemudian diekspor. Kedua, terdapat kelas pedagang. Mula-mula, kegiatan mereka terbatas di dalam negeri saja. Dengan masuknya kekuatan asing, mereka kemudian berhubungan dengan orang-orang asing ini. Ketiga, adanya kaum industrialis yang memproduksikan komoditi-komoditi industri. Keempat, orang asing dengan modalnya yang kuat merupakan komponen yang baru dalam dunia perekonomian negara ini. Orang asing ini datang terutama untuk mencari bahan mentah yang murah untuk dibawa pulang, mencari buruh murah untuk bekerja di pabrik-pabrik yang mereka dirikan, dan (kalau negara induknya sudah merupakan negara industri maju) menjual barang-barang industri mereka. Masuknya modal asing ini menimbulkan guncangan-guncangan baru terhadap kemapanan yang sudah ada. Demikianlah, beberapa pandangan dari teori Dependensi.

3. Teori Sistem Dunia: Immanuel Wellerstein

Munculnya Wellerstein dengan Teori Sistem Dunianya juga merupakan reaksi terhadap Teori Ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan Teori Artikulasi, reaksi ini muncul karena Teori Ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di Dunia Ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan.

Teori Sistem Dunia Wellerstein sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem mini yang saling terpisah.

Kemudian terjadi penggabungan-penggabungan, baik melalui penaklukan secara militer maupun secara sukarela. Sebuah kerajaan besar kemudian muncul. Meskipun tidak sampai menguasai seluruh dunia, tetapi karena besarnya yang luar biasa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelumnya, kerajaan ini disebut dengan kerajaan dunia, atau world empire. Kerajaan dunia ini mengendalikan kawasannya melalui sistem politik yang dipusatkan. Meskipun kerajaan dunia ini

sangat besar, kawasannya terbatas sampai sejauh mana kerajaan ini bisa menguasai secara politis daerahnya. Penguasaan juga tidak dalam bentuk pengendalian yang ketat, tetapi cukup dengan sistem upeti sebagai tanda takluk.

Semakin jauh dari pusat kekuasaan, semakin bebas daerah tersebut Perkembangan teknologi perhubungan dan perkembangan di bidang lain kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Berbeda dengan kerajaan besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik, sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Sejumlah kerajaan besar muncul dan menghilang, sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap sejak Abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada.

Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia. Kata Brewer, Sebuah sistem “dunia” tidaklah harus berarti bahwa dia menguasai seluruh dunia; sistem ini dirumuskan sebagai sebuah “unit dengan satu pembagian kerja dengan macam-macam sistem budaya”. Sebuah sistem dunia dengan demikian merupakan sebuah sistem dunia tanpa satu kekuasaan pusat. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme global. Wallerstein kemudian membagi tiga kelompok Negara: pusat, setengah pinggiran, dan pinggiran. Konsep ini jelas diambil dari teori ketergantungan. Wallerstein hanya menambah kelompok setengah pinggiran.

Perbedaan inti dari ketiga kelompok ini adalah kekuatan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Jelas, yang paling kuat adalah negara- negara pusat. Kelompok negara-negara kuat, yakni negara-negara pusat, mengambil keuntungan yang paling banyak karena kelompok ini bisa memanipulasikan sistem dunia sampai batas-batas tertentu. Selanjutnya, negara tengah pinggiran mengambil keuntungan dari negara-negara pinggiran yang merupakan pihak yang paling dieksploitir.

Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, “semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan; negara kebangsaan, dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup dan karena itu tidak bisa dianalisis seakan- akan mereka berdiri sendiri.’’

Selanjutnya, menurut Wallerstein, negara-negara bisa "naik atau turun kelas," misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran, dan sebaliknya. Naik dan turun kelasnya negara-negara ini ditentukan oleh dinamika sistem dunia. Pada suatu saat, Inggris, Belanda, dan Prancis adalah negara-negara pusat yang berperan dominan dalam sistem dunia. Akan tetapi kemudian, Amerika Serikat muncul menjadi negara terkuat setelah Negara-negara Eropa hancur dalam Perang Dunia II. Akan tetapi, pada saat ini muncul Jepang sebagai negara yang menantang kekuasaan hegemonik Amerika Serikat. Bangun dan jatuhnya kekuatan negara-negara ini oleh Wellerstein dijelaskan melalui sebuah analisis sejarah dari dinamika sistem dunia, yang dituangkan dalam dua bukunya (semuanya akan ada empat buku, menurut Wallerstein) yang terbit pada tahun 1974 dan 1980.

Di samping itu, teori Wallerstein dapat dipakai untuk menjelaskan naiknya negara-negara industri baru (Korea Selatan, Taiwn, Hong Kong, dan Singapura) dari posisinya pinggiran. Naiknya upah kerja di negara-negara pusat membuat negara-negara ini memberikan kesempatan pada beberapa negara yang sudah siap (dalam arti kesiapan teknologi, kestabilan politik, disiplin kerja, dan sebagainya) untuk mengambil alih produksi barang-barang industri yang lebih sederhana. Industri dengan teknologi canggih yang memberi keuntungan besar seperti komputer, tetap ada di tengah negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura ini naik kelas.

Wallerstein kemudian merumuskan tiga strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas ini.

a. Kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang. Karena dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali, dan barang-barang industri mahal. Akibatnya, negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk mulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri. Meskipun tindakan ini hanya membuat negara ini beralih dari satu jenis ketergantungan ke jenis ketergantungan yang lain, tetapi dalam kriteria ekonomi, ada kemungkinan negara ini naik kelas dari negara pinggiran menjadi negara tengah pinggiran.

b. Kenaikan kelas terjadi juga melalui undangan. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi keluar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena macam-macam alasan. analisis Peter Evan tentang lahirnya pembangunan dalam ketergantungan, yang sudah diuraikan sesudahnya.) Akibat dari perkembangan ini, muncullah industri-industri di negara-negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi setengah pinggiran.
c. Kenaikan kelas yang ketiga terjadi karena negara tersebut menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Wallerstein menunjuk Tanzania sebagai contoh. Negara itu melaksanakan konsep ujamaa untuk melepaskan dirinya dari eksploitasi negara-negara yang lebih maju. Kalau berhasil, tindakan melepaskan diri ini bisa membuat negara tersebut naik kelas menjadi negara setengah pinggiran. Akan tetapi, semua ini tergantung pada kondisi sistem dunia yang ada, apakah pada saat negara tersebut mencoba memandirikan dirinya, peluang dari sistem dunia memang ada. Kalau tidak, tentu saja usaha ini bisa gagal.

B. Latihan

1. Analisis pembangunan yang ada di daerah anda!
2. Jelasakan pembangunan yang ada di Indonesia, lalu amati apakah pembangunan tersebut sudah sesuai dengan model-model pembangunan seperti yang sudah Anda pelajari!
3. Menurut anda teori pembangunan manakah yang paling tepat bisa diterapkan Indonesia?
4. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar. Jelaskan masing-masing!

C. Rangkuman

Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan sangat berkaitan dengan nilai, dan acap kali bersifat transendental, suatu gejala meta-disiplin, atau bahkan sebuah ideologi *the ideology of developmentalisme*. Oleh karenanya, para perumus kebijakan, perencana pembangunan, serta para pakar selalu dihadapkan nilai (*value choice*), mulai pada pilihan epistimologis-ontologi sebagai kerangka filosofisnya, sampai pada derivasinya pada tingkat strategi, program atau proyek. Mengukur pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator utama, yakni kekayaan rata-rata, pemerataan, kualitas kehidupan, indeks pembangunan manusia (human development index), dan kerusakan lingkungan.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar: 1) modernisasi dan 2) ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994).

Teori ketergantungan membantah tesis Marx yang menyatakan bahwa kapitalisme akan menjadi cara produksi tunggal, dan menciptakan proses maupun

struktur masyarakat yang sama di semua negara yang ada di dunia ini. Seperti yang diuraikan mula-mula oleh Prebisch, kemudian oleh Baran, kapitalisme yang berkembang di negara-negara yang menjadi korban imperialism, tidak sama dengan perkembangan

kapitalisme dari negara-negara imperialisme yang menyentuhnya.

Munculnya Wellerstein dengan teori sistem dunianya juga merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan. Seperti juga teori Bill Warren dan teori artikulasi, reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan.

D. Tes Formatif

1) Pembangunan dapat dimaknai sebagai...
   A. *social problem*
   B. *social evaluation*
   C. *social networking*
   D. *social plan*
2) Berikut ini pengertian pembangunan, *kecuali...*
   A. upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis
   B. proses perubahan sosial berencana
   C. pembangunan berarti pembangunan fisik saja, seperti jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya
   D. pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan
3) Mengukur Pembangunan dapat dilihat dari berbagai indikator di bawah ini...
   A. kekayaan rata-rata, mobilitas sosial, dan pemerataan
   B. kualitas kehidupan, kemiskinan, dan mobilitas sosial
   C. kerusakan lingkungan, kekayaan rata-rata, dan pemerataan
   D. kekayaan rata-rata, kualitas kehidupan, dan pedesaan
4) Di bawah ini adalah isi Bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial" kecuali...
   A. perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan
   B. sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh Negara
   C. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
   D. perekonomian didasarkan pada perencanaan pusat

5) Pelaksanaan pembangunan berdasarkan nilai-nilai berikut, kecuali...

   A. bertumpu pada pembangunan manusia
   B. berorientasi pada masyarakat miskin
   C. partisipatif
   D. *top down*

6) Apa Asumsi dasar dari teori modernisasi?

   A. Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional.
   B. Negara maju memberikan modal dan menularkan nilai-nilai modern pada negara berkembang.
   C. Negara maju menawarkan resep pembangunan pada negara berkembang yang bersifat konsep matang.
   D. A, B, C benar.

7) *Human capital theory*, David McCleland menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Mengapa demikian?

   A. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan.
   B. Pendidikan merupakan alat untuk menguasai.
   C. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar gajinya.
   D. Orang berpendidikan merupakan para calon buruh.

8) Teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme (*spirit of capitalisme*) berisi....

   A. nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (agama) dapat diarahkan kepada sikap yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
   B. orang beragama adalah pendukung kapitalisme
   C. agama membuat kita memberikan makna yang positif terhadap keberadaan modernisasi
   D. agama adalah candu

9) Urutan lima tahap pembangunan menurut Rostow adalah....

   A. masyarakat tradisional, lepas landas, bergerak ke kedewasaan dan jaman konsumsi massal yang tinggi, dan prakondisi untuk lepas landas
   B. prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan, aman konsumsi massal yang tinggi dan masyarakat tradisional
   C. masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, bergerak ke kedewasaan dan jaman konsumsi massal yang tinggi
   D. bergerak ke kedewasaan, jaman konsumsi massal yang tinggi, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas

10) Yang dimaksud *Economic Growth* adalah pembangunan yang berorientasi....

A. pada pertumbuhan
B. pada elit
C. pada fisik
D. fasilitas jalan

Kegiatan Belajar 2 : Konsep pembangunan berbasis masyarakat

A. Uraian Materi

Pemberdayaan masyarakat merupakan hal utama dalam pembangunan suatu negara, dimana sebuah negara itu menjadi berkembang apabila masyarakatnya produktif. Indonesia sedang memulai program untuk pemberdayaan desa melalui pemanfaatan dana Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk membangun desa dalam bentuk infrastruktur atau pembangunan desa untuk mengembangkan potensi daerah yang belum *tereksplore.*

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community driven development*) merupakan pengembangan dari konsep pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) yang muncul sebagai reaksi atas konsep pendekatan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pada abad 19 (masa industrialisasi), konsep pembangunan yang ada di dunia berorientasi pada produksi yang maksimum (pertumbuhan ekonomi). Konsep ini tidak membawa masyarakat banyak pada kesejahteraan tetapi malah memperlebar ketimpangan ekonomi di antara mereka, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Efek *trickle down* yang diharapkan dari kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terhadap kawasan di sekitarnya tidak terjadi. Yang terjadi justru adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah pinggiran. Pada masa itu, perencanaan pembangunan menganut sistem *top-down*, yang didominasi otoritas, di mana kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengambilan keputusan dibatasi.

Diawali oleh pemikiran David C. Korten yang menyatakan pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah melihat inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama dan melihat kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan, selanjutnya konsep pembangunan tersebut berkembang untuk mengisi kekurangan di mana pasar gagal memenuhi kepentingan sosial masyarakat dan institusi politik atau pemerintah juga gagal untuk menjalankan mandatnya dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Perspektif berbasis masyarakat ini sebelumnya telah memperoleh legitimasi dengan adanya publikasi pada tahun 1974 oleh Bank Dunia, yang

merekomendasikan strategi pembangunan perdesaan difokuskan pada peningkatan akses bagi petani kecil dan pekerja pemilik lahan, air, pasar kredit dan fasilitas lain, yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.

Tabel 1. Dua Paradigma Pembangunan

Dimensi	Berbasis pada Produksi	Berbasis pada Masyarakat
Logika	Ekonomi produksi (eksploitasi & manipulasi sumber daya alam)	Ekologi manusia yang seimbang
Tujuan	Pertumbuhan arus barang & jasa (peningkatan jumlah & kualitas barang & jasa)	Pertumbuhan manusia (Peningkatan potensi manusia)
Sistem Ekonomi	Konvensional (skala besar, spesialisasi, investasi, keunggulan komparatif, interdependensi global)	Swadaya (skala lokal, sistem ekologi manusia, interdependensi teritorial)
Birokrasi	Birokrasi besar (masyarakat diorganisasikan dlm sistem produksi yg efisien dg pengawasan terpusat)	Sistem swaorganisasi (satuan-satuan organisasi berskala manusia & komunitas-komunitas swadaya)
Kriteria	Memperhatikan kebutuhan sistem produksi (efisiensi, memaksimalkan laju kenaikan produktivitas sistem)	Memperhatikan kebutuhan masyarakat (nilai produk, partisipasi & mutu kehidupan kerja)
Teknik Sosial	Struktur formal, bentuk organisasi sistem komando; metode analisis keputusan bebas nilai & positivistik; pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif fungsional; sistem produksi didefinsikan secara fungsional; perangkat analisis tidak mempertimbangkan	Informal, bentuk organisasi swadaya; peran individu dlm proses pembuatan keputusan dg nilai manusiawi sbg ukuran; pengetahuan dikembangkan berdasarkan perspektif teritorial; pilihan2 produksi & prestasi didasarkan pd kerangka ekologi, yaitu

	manusia & lingkungan	melibatkan manusia & menempatkannya sbg proses analisis
Proses pembuatan keputusan	Sentralistis; didominasi para ahli (teknokrat); tidak konsultatif; kendali pada pejabat yg tdk menanggung akibat keputusan	Desentralisasi; rakyat berhak memasukkan nilai2 kebutuhan lokal dlm proses pembuatan keputusan; kendali pd rakyat yg hidupnya dipengaruhi oleh keputusan itu

Karakteristik utama konsep pembangunan berbasis masyarakat adalah sebagai berikut (Soleh, 2014):

1. Penekanan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan maupun kultur.
2. Berimplikasi pada *transformatif and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative.*

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana, yaitu perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat agar menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Berbagai pendekatan perencanaan pembangunan mendahului lahirnya pemikiran pendekatan atau strategi yang sering digunakan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut, antara lain: perencanaan komunikatif dari Habermas, perencanaan transaktif dari Friedmann, perencanaan advokatif dari Davidoff, dan perencanaan kolaboratif dari Healey. Pendekatan-pendekatan perencanaan tersebut muncul untuk menjawab kebutuhan perencanaan yang diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat pada era pasca modernisasi/industrialisasi (*postmodern planning*). Berbagai pendekatan atau strategi pembangunan berbasis pemberdayaan yang dikenal saat ini antara lain pendekatan berbasis masyarakat (*people centre approach*) atau pendekatan partisipatif (*participatory approach*), dapat dikatakan sebagai pendekatan perencanaan pragmatik pasca modernisasi atau merupakan praktek dari teori-teori perencanaan

komunikatif, transaktif, advokatif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif terbaru menekankan akan pentingnya peran masyarakat sehingga para fasilitator pendamping masyarakat tersebut harus berperan sedemikian rupa, misalnya antara lain tidak menggurui, agar segala sesuatunya yang terkait dengan pembangunan harus berasal dari masyarakat itu sendiri (Kusnaka dan Hikmat, 2003). Peran yang sulit untuk dijalankan, khususnya pada komunitas adat, terlebih bila mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat tersebut akan pembangunan yang umumnya bersifat modern.

Clearly, dkk (2003) menunjukkan berbagai pendekatan yang disebutnya sebagai pendekatan berbasis masyarakat (*people-centered approaches*) yang dijalankan dalam program-program pendukung penghidupan (*Livelihood Support Programme*) oleh FAO-PBB pada berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah: *Sustainable Livelihood Approaches (SLA), Gestion de Terroirs (GT), Integral Rural Development (IRD), Farming System (FS),* dan *Latin America Approaches (LAA)*. Umumnya pendekatan-pendekatan tersebut lebih menyerupai pendekatan partisipatif pada awal perkembangannya.

Pendekatan-pendekatan lain sebagai strategi untuk melibatkan masyarakat atau yang dikenal sebagai pendekatan partisipatif, yaitu (Hikmat, 2001):

1. *Participatory Rural Appraisal* (PRA)
2. *Participatory Research and Development* (PRD)
3. *Participatory Rapid Appraisal*
4. *Parcipatory Assessment and Planning* (PAP)
5. *Participatory Technologi Development* (PTD)
6. *Participatory Learning Methods* (PLM)
7. *Participatory Action Research* (PAR)
8. *Participatory Learning and Action* (PLA).

Perkembangan pendekatan partisipatif dimulai dengan metode RRA (R*apid Rural Appraisal*), yaitu suatu pendekatan pembangunan di daerah perdesaan dengan memahami suatu permasalahan melalui wawancara mendalam atau menggunakan kuesioner semistruktural. Sampel dalam pengambilan data kurang diperhatikan, lebih menekankan pada realitas sosial dan ekonomi pada suatu masyarakat desa. Metode PRA, salah satu pengembangan dari pendekatan partisipatif, merumuskan permasalahan yang

dihadapi masyarakat dengan melakukan identifikasi permasalahan, merumuskan masalah, mencari penyebab masalah, merumuskan strategi pemecahan masalah dan menyusun rencana tindak secara bersama-sama lewat diskusi kelompok (*focus group discussion*), daripada penggalian pendapat individu. Pada RRA, peneliti merupakan orang luar sedangkan pada PRA, peneliti adalah bagian dari masyarakat atau fasilitator (Hikmat, 2001).

Pengembangan lain dari pendekatan partisipatif adalah PAR, yang dianggap sepaham dengan ajaran Paulo Freire tentang mengubah kesadaran masyarakat menjadi kritis, karena masyarakat diasumsikan perlu terlebih dahulu dibantu dengan transfer ilmu pengetahuan terpilih dan teknik unsur mengetahui bagaimana agar memiliki kapasitas menganalisis dan transformasi kebutuhan nyata (Clearly, dkk, 2003).

Pendekatan lain *Participatory Learning and Action* (PLA) juga merupakan pengembangan dari pendekatan-pendekatan partisipatif terdahulu yang tidak memiliki proses evaluasi yang konsisten atas apa yang selama ini telah dilaksanakan. PLA menekankan proses refleksi yang juga dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga metode ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode RRA dan PRA (Hikmat, 2001).

Keunggulan pembanguan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada: (1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan; (2) Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institutions* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi; (3) Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan; (4) Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru; (5) Lembaga swadaya masyarakat; (6) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah indifidunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan

masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Untuk mendorong masyarakat berdaya dengan cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangikitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada. Masyarakat menjadi pelaku utama pembanguan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi menejemen komunitas menuju kesejahteraan bersama. Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Pembangunan tanpa memperhatikan kharakteristik dan kebutuhan lokal akan banyak membuang sumberdaya secara sia-sia. Kharakteristik geografi seperti lokasi dekat laut, pinggir sungai, pinggir hutan, pedalaman sangat berpengaruh terhadap model pembangunan yang diimplementasikan. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian utama adalah kearifan lokal yang memerlukan inventarisasi, reorientasi, dan reinterpretasi maknanya. Model pemberdayaan yang sering dan mudah dilakukan yaitu dengan mengeneralisasi pemberdayaan masyarakat secara nasional. Pendekatan pemberdayaan secara nasional dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan masyarakat sama untuk seluruh daerah atau sama dengan kebutuhan penyusun kebijakan. Inilah penyebab utama pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (penghamburan sumber daya). Akhirnya dalam beberapa kasus, masyarakat tidak menghiraukan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Selain pembangunan yang telah dilaksanakan tidak bermanfaat, jeneralisasi seperti ini mereduksi kebudayaan lokal yang dapat menjadi modal sosial pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan yang disusun secara nasional patut direevaluasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayahnya masing-masing.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif–alternatif pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan inovasi. Kedua, dapat membuka akses kepada sumber daya pendukung lainnya, termasuk membuka jaringan kepada komunitas lainnya. Ketiga, kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat-alat produksi. Terakhir, memperkuat

masyarakat untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Pembangunan dengan model seperti ini menjadikan masyarakat subjek pembangunan (bukan objek pembangunan), sehingga masyarakat sudah mempertimbangkan kondisi dan budaya lokalnya masing-masing sebelum menentukan alternatif-alternatif pilihan.

Keberhasilan pemberdayaan bukan hanya secara administrasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, akan tetapi yang lebih substantif yaitu apakah kegiatan tersebut dapat bertahan lama setelah selesai proyek (kebanyakan selesai proyek selesai pula kegiatan). Kegiatan dapat bertahan lama apabila pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. Tugas pemerintah/ lembaga adalah mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan dikatakan sangat berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

A. Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Sumber Daya Masyarakat

Dalam kehidupan bernegara menjadi tugas pokok pemerintah adalah bagaimana merumuskan sebuah kebijakan pembangunan yang dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah seringkali disebut sebagai upaya pembangunan. Menurut Theresia Aprilila, dkk (2014) pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana diartikansebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu, pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh elit masyarakat yang merasa tau dan lebih pandai untuk merumuskan pembangunan yang lebih cocok bagi masyarakat.

Potensi sumberdaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi aktual.Pada dasarnya pemanfaatan potensi sumberdaya masyarakat ini harus diartikan sebagai usaha memanfaatkan atau memobilisasi sumberdaya yang sebelumnya belum

pernah disentuh, tetapi dapat juga berarti meningkatkan daya manfaat atau optimalisasi sumberdaya yang sebelumnya belum digarap.Untuk memanfaatkan potensi sumberdaya masyarakatdiperlukan kualitas manusia yang memiliki keterampilan yang inovatif.Sehingga sumberdaya manusia merupakan sumber daya pembangunan dalam mencapai kesejahteraan.Sumber daya manusia (human capital) menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai pengelola dan pelaku pembangunan yang dapat memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

1. Pelaksanaan Pembangaunan Berbasis Masyarakat

Pelaksanaan program Pembagunan Berbasis Masyarakat berperan sangat penting dan menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya yang ada, sehingga program pembangunan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrebangdes dan menjadi prioritas pembangunan. Beberapa program tersebut meliputi: Pembangunan Saluran Irigasi untuk Pertanian, Pembangunan Plesengan, Pembangunan Masjid, Pembangunan Gedung Sekolah PAUD, Pembangunan Pipanisasi untukPemenuhan Air Bersih,serta Pembangunan Pengembangan Desa Wisata. Dalam program tersebut peran serta masyarakat untuk ikut menyukseskan program pembangunan berbasis masyarakat sangat tinggi,masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan dari perencanaan dalam forum musyawarah masyarakatTahlilan, Kelompok Tani, Karang Taruna serta forum PKK, pelaksanaan Pembangunan Berbasis Masyarakatdilaksanakan secara antusias untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga, materi maupun pemikiran dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Partispasi masyarakat dalam proses pembangunan berbasis masyarakat memperhatikan kebutuhan masyarakat yang merupakan realisasi dari aspirasi masyarakat yang disampaikan ketika Musrebangdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta program ini pula telah memanfaatkan potensi lokal yang ada, khususnya potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia dijalankanmelalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengolahan tenaga untuk menjadi lebih baik dalam rangka mempersiapkan suatu tanggungjawab dimasa mendatang dalam mencapai tujuan dan

hasil yang optimal, program ini merupakan hasil integrasi program dari Pemerintah Desa berdasarkan hasil Musrebangdes dan program yang murni lahir dari kelompok masyarakat meliputi Kelompok Tani, Karang Taruna, dan PKK, sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan. Menurut Soetomo (2012), cara untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan.Kedua aspek ini dipercaya mampu meningkatkan sumber daya manusia, sehingga untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia di desa Selorejo dapat ditinjau melalui dua aspek tersebut yaitu pendidikan dan kesehatan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Bidang Pendidikan

Baiknya kualitas Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pembangunan ditandai dengan adanya unsur kreatifitas dan produktifitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan maupun kelompok. Persoalan ini dapat diatasi dengan kemampuan menampilkan hasil kerja produktif secara rasional yang diantanya adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan , baik pendidikan formal maupun non formal. Dampaknya pengetahuan masyarakat menjadi meningkat, wawasannya lebih luas, kemampuan antisipasi masalah lebih tinggi serta kemampuan skill yang lebih tinggi dan tentunya kualitas sumber daya menjadi lebih baik. Berhubungan dengan hal tersebut maka dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pemerintah desa berdasarkan hasil Musrebangdes telah memprioritaskan program pengembangan sumber daya manusia menjadikan agenda utama agar mampu berdikari dalam mengelolah potensi sumber daya masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan meliputi:

1) Pendidikan Formal yaitu berupa pendidikan pra sekolah seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK dan RA serta pendidikan keagamaan seperti Sekolah Minggu (SEKAMI) bagi yang beragama Katolik dan Daniah bagi yang beragama Islam.
2) Sekolah Lapang, untuk masyarakat umum yang dominan adalah petani berupa Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) serta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Program tersebut merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan pemandu lapang tentang budidaya yang baik suatu

komoditas yang diusahakan oleh petani agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, sesuai dengan permintaan pasar dan aman dikonsumsi.

3) Pelatihan untuk Karang Taruna, merupakan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat khususnya anggota KarangTaruna agar dapat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga tidak ketergantungan dan membebani orang tua.
4) Pelatihan Ibu PKK yaitu berupa pelatihan pembuatan sari jeruk, pelatihan pembuatan kripik jeruk, pelatihan pembuatan dodol jeruk, pelatihan masak-memasak, pelatihan kecantikan dan pelatihan menjahit, dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan khusus serta mengundang orang luar yang profesional dalam bidangnya untuk memberikan pelatihan sehingga ibu-ibu PKK dapat memiliki pengetahuan yang baru.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Bidang Kesehatan

Peran kesehatan dalam meningkatkan sumber daya manusia berdampak dan mampu mempengaruhi pendapatan ekonominya juga berpengaruh pada tingkat pendidikan maksudnya dapat dikatakan bahwa kesehatan merupakan harta yang paling berharga bagi seseorang dalam memperbaiki kualitas hidupnya sebab dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan produktifitas kerja seseorang. Berhubungan dengan hal tersebut pemerintah bersama masyarakat telah menfokuskan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang meliputi:

1) Penyediaan Posyandu, terdapat 4 (empat) posyandu baik posyandu ibu dan balita maupun posyandu Lansia. Dalam meningkatkan derajat kesehatan Posyandu telah memainkan peranan penting dalam melakukan mobilitasmasyarakat terutama dikalangan bawah untuk ikut serta dalam program-program kesehatan masyarakat selain itu Posyandu juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk tukar menukar informasi, pendapat dan pengalaman serta bermusyawarah untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi baik masalah keluarga ataupun masyarakat itu sendiri.
2) Penyuluhan tentang Kesehatan, yang difasilitasi oleh dinas kesehatan melalui puskesmas serta beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan pemerintahan seperti Poltekes, melalui program kegiatan PKL,

KKN, dan Baksos selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat.

5. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pendidikan

Keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia.Karena melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai langkah yang strategis dan berkesinambungan, strategi yang dilakukan meliputi penyuluhan dan pelatihan sesuai dengan profesinya masing-masing seperti halnya untuk masyarakat umum karena mayoritas bermata pencaharian petani strategi yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pertanian, penyuluhan pertanian oleh petugas PPL yang terprogram dalam sekolah lapang, seperti pelatihan membuat pupuk organik, pelatihan pembuatan pestisida organik, pelatihan budidaya partaniann jeruk yang baik dan pelatihan untuk manajemen pemasaran. Dan bagi ibu-ibu strategi yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan sebagai bentuk pemberdayaan ibu-ibu yang meliputi pelatihan membuat sari jeruk, pelatihan membuat dodol jeruk, pelatihan membuat kuetradisional, membuat Hantaran, pelatihan menjahit, pelatihan masak-memasak serta pelatihan untuk kecantikan, sedangkan untuk di Karang Taruna strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan membuat sablon, pelatihan perbengkelan, pelatihan di bidang IT, pelatihan menjadi pemandu wisata. Dalam pelaksanan strategi ini yang lebih berperan adalah kelompok tani, KarangTaruna dan kader PKK serta kerjasama pemerintahan desa dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta.

6. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kesehatan

Strategi yang dilakukan melalui posyandu dengn memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui forum-forum musyawarah rutin masyarakat, mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam mendukung dan mengikuti setiap program posyandu serta menjalin kerjasama kemitraan dengan instan-instansi baik pemerintah maupun swasta agar dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat termasuk penguatan sumber daya manusia tentang kesehatan kepada kader posyandu serta mendukung seluruh proses program posyandu yang terdiri dari posyandu balita dan lansia.

B. Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat Dalam Program Kkn (Kuliah Kerja Nyata)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program atau kurikulum wajib di perguruan tinggi. Pada umumnya orang melihat kegiatan KKN ini sebagai kegiatan latihan bermasyarakat bagi mahasiswa. Meski sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana sebenarnya hakikat kegiatan pemberdayaan ini menjadi penting untuk dipahami, terlebih oleh para pelaku KKN (mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan). Hal ini menjadi penting agar kegiatan KKN itu terlaksana tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi merupakan bentuk upaya (meski kecil) dari mahasiswa untuk berbuat bagi masyarakat. Tulisan ringkas ini berupaya memberikan gambaran seperti apa KKN sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Selamat membaca.

1. Filosofi Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Sebelum berbicara tentang pemberdayaan, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan dengan program KKN. Sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan, KKN merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa. Sebagai sebuah program, kegiatan KKN ini pada dasarnya mempunyai dua filosofi utama:

1) Pengabdian
2) Pemberdayaan

Dua komponen utama KKN di atas harus benar-benar dipahami oleh peserta KKN, dalam hal ini mahasiswa dan ditekankan oleh dosen pembimbing lapangan. Dalam konteks pengabdian, KKN merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengabdi pada masyarakat. Mengabdi berarti melakukan sesuatu tanpa pamrih. Inilah saatnya mahasiswa memberikan sesuatu atau berbuat untuk masyarakat. Setelah sekian tahun lamanya kuliah, inilah saatnya mahasiswa berbuat untuk masyarakat. Filosofi kedua adalah pemberdayaan. Ini yang akan dibahas lebih detail sesuai dengan judul tulisan ini.

Gotong royong diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam program kkn diperlukan kerjasama antara masyarakat desa dan mahasiswa untuk mengembangkan program yang akan dijalankan. Mahasiswa diajarkan untuk langsung terjun ke masyarakat dan kerja sesuai dengan program yang sudah disiapkan.

2. Permberdayaan atau Pembangunan?

KKN merupakan kegiatan **pemberdayaan** masyarakat yang dilakukan mahasiswa dan dosen. Karena ini merupakan kegiatan pemberdayaan, maka harus dipahami bahwa itu adalah proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena terkadang pada prakteknya yang terjadi bukanlah kegiatan pemberdayaan tetapi kegiatan "**pembangunan"**. Ada perbedaan yang sangat jelas antara pemberdayaan dan pembangunan. Kegiatan pemberdayaan berarti kegiatan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya sebagai suatu komunitas. Berdaya artinya bisa melakukan perannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu kesuksesan kegiatan pemberdayaan dilihat saat kegiatan KKN selesai apakah program yang dilaksanakan masih terus dilanjutkan sendiri oleh masyarakat atau berhenti seiring selesainya kegiatan KKN.

Pemahaman tentang PEMBERDAYAAN ini menjadi penting tidak hanya saat mahasiswa melakukan kegiatan KKN, tetapi juga mahasiswa menyusun program KKN. Pemahaman yang keliru akan proses pemberdayaan akan menyebabkan keliru juga dalam membuat program. Contoh misalnya yang banyak dilakukan, mahasiswa membuat program les bimbingan belajar untuk anak-anak. Alasan dari program ini adalah permintaan dari masyarakat. Namun demikian jika setelah KKN selesai program itu juga selesai atau tidak dilanjutkan oleh masyarakat, maka itu bukanlah pemberdayaan.

Hal yang terakhir ditemui tadi biasanya terjadi pada kegiatan PEMBANGUNAN. Kegiatan pembangunan pada umumnya adalah inisiatif dari pihak luar, misalnya pemerintah. Masyarakat hanya sebagai obyek yang terkena kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat tidak begitu banyak dalam kegiatan pembangunan. Karena dari proses perencanaan, pelaksanaan program semua dari pemerintah atau pihak luar.

3. Fasilitator dalam Permberdayaan Masyarakat

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa bertindak sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, mahasiswa bisa mengambil beberapa peran sesuai dengan kondisi masyarakat yang ditemui setelah melakukan observasi. Berikut ini beberapa kondisi masyarakat dan peran yang bisa diambil mahasiswa:

1) Peran MODERATOR (Aku tahu, kamu tahu)
2) Peran MOTIVATOR (Aku tidak tahu, kamu tahu)
3) Peran NARASUMBER (Aku tahu, kamu tidak tahu)

4) Peran MEDIATOR (Aku tahu, kamu tahu)

- Keterampilan Fasilitator

1) Kesiapan Diri
2) Penguasaan Metode Fasilitasi
3) Penguasan Materi
4) Penguasaan Forum dan Audiens

- Etika Fasilitator

Etika menjadi penting karena mahasiswa datang ke desa adalah sebagai orang luar, alias sebagai "tamu" bagi mahasiswa. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh mahasiswa di desa akan menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, persoalan etika menjadi penting dalam kegiatan KKN. Pemahaman etika bagi mahasiswa khususnya menjadi salah satu kunci sukses proses pemberdayaan masyarakat.

4. Teknik-teknik Pemberdayaan Masyarakat

Petama, PEMBAURAN

- fasilitator berbaur dengan masyarakat yang akan diberdayakan
- tidur di tempat yang sama, makan dengan menu yang sama

Kedua, OBSERVASI

- Menggunakan seluruh indra untuk menangkap seluruh fenomena yang ada di wilayah pemberdayaan

Ketiga, NEED ASSESMENT

Keempat, PERENCANAAN PROGRAM

- Idealnya perencanaan dilakukan sendiri oleh masyarakat
- Namun pada program KKN karena waktu terbatas maka program disusun oleh mahasiswa. Disebut Asumsi program, karena masyarakat belum tentu setuju

Kelima, PELAKSANAAN PROGRAM

Keenam, EVALUASI

5. Participatory Rural Appraisal (PRA)

PRA merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kunci utama dari metode pendekatan PRA adalah pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Berikut ini beberapa prinsip dalam metode PRA

1) Prinsip Saling Belajar
2) Prinsip Keterlibatan (termasuk kelompok marjinal/minoritas)
3) Orang luar sebagai FASILITATOR, masyarakat sebagai PELAKU
4) Konsep TRIANGULASI (pengelompokan masyarakat sesuai komunitas masing-masing)
5) Prinsip Keberlanjutan Program

B. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan berbasis masyarakat?
2. Bagaimana langkah-langkah pembangunan yang dimulai dari masyarakat?
3. Sebutkan dan Jelaskan analisis pembanguan berbasis masyarakat yang anda pahami!
4. Kaitkan program kerja yang sesuai untuk mendukung program pembangunan berbasis masyarakat!

C. Rangkuman

Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial dengan tujuan melakukan perubahan sosial yang terencana, yaitu perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat agar menjadi berdaya atau mampu melakukan pembangunan di lingkungannya dengan usaha sendiri secara kolektif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah pertama, memilih prioritas, menyusun alternatif–alternatif pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan inovasi. Kedua, dapat membuka akses kepada sumber daya pendukung lainnya, termasuk membuka jaringan kepada komunitas lainnya. Ketiga, kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat-alat produksi. Terakhir, memperkuat masyarakat untuk ikut secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Pemberdayaan dikatakan sangat berhasil apabila kegiatan tersebut dapat berkembang dan dicontoh oleh masyarakat lainnya.

Potensi sumberdaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi aktual. Serta kegiatan KKN merupakan kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan program pembangunan berbasis masyarakat ini. Beberapa kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat merupakan kegiatan utama pembelajaran Praktek KKN.

D. Tes Formatif

1. Pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) adalah melihat inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan utama dan melihat kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat merupakan pernyataan teori dari....
   A. David C. Korten
   B. Bank Dunia
   C. Davidoff
   D. Clearly
2. Tujuan Konsep pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perencanaan sosial....
   A. Pendekatan atau strategi pembangunan berbasis pemberdayaan
   B. Melakukan perubahan sosial yang terencana
   C. Pembangunan yang umumnya bersifat modern.
   D. Pembangunan di daerah perdesaan
3. Pelaku utama pembangunan berbasis masyarakat adalah...
   A. Pengusaha
   B. Investor
   C. Masyarakat
   D. Pemerintah
4. Langkah utama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah....
   A. Memilih prioritas
   B. Membuka akses
   C. Kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat produksi
   D. Memperkuat Masyarakat
5. Langkah terakhir yang dilakukan oleh masyarakat dalam pemberdayaan adalah....
   A. Memilih prioritas
   B. Membuka akses
   C. Kebersamaan dalam pemanfaatan dan kepemilikan alat produksi
   D. Memperkuat Masyarakat
6. Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh masyarakat merupakan pernyataan ...
   A. Morrison Roberth
   B. Thomas A
   C. Roberth Hendrick
   D. Theresia Aprilila, dkk.
7. Potensi sumberdaya masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan....
   A. Meningkatkan daya manfaat
   B. Usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi aktual
   C. Memperbaiki kualitas manusia
   D. Menguntunkan kaum elit

8. Program prioritas pembanguan diantaranya adalah...
   A. Pembangunan Pusat Perbelanjaan Elit
   B. Pembangunan Kawasan Elit
   C. Pembangunan Desa Wisata
   D. Pembangunan Cafe
9. Target forum masyarakat yang dijadikan kelompok pengembangan program pembangunan pemberdayaan masyarakat.....
   A. Kelompok genk motor
   B. Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna
   C. Kelompok mahasiswa
   D. Kelompok seagama
10. Filosofi utama KKN adalah...
    A. Kewajiban mahasiswa
    B. Bekerja
    C. Bersenang-senang
    D. Pengabdian dan pemberdayaan

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

[*Tuliskan petunjuk/cara mengukur capaian pembelajaran dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pemahaman tentang bahan modul dan capaian pembelajaraannya. Tindak lanjut merupakan petunjuk bagi mahasiswa apakah perlu mengulang atau menambah materi pembelajaran tertentu*]

Kegiatan Belajar 3 : Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat

A. Uraian Materi

1. Dasar Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Selanjutnya pemberdayaan masyarakat yang diterjemahkan dari kata "*empowerment*", diartikan sebagai berikut "*Empowerment is a process trough which those excluded are able to participate more fully in decision about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product* (Bebbington, 2010)*",* yang didefinisikan sebagai sebuah proses dimana orang-orang (masyarakat) tanpa terkecuali dapat berpartisipasi penuh dalam keputusan tentang bentuk pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sampai pada distribusi produk masyarakat itu sendiri. Pada dunia bisnis, pengertian *power* dikaitkan dengan kemampuan atau produktivitas. Oleh karena itu, pemberdayaan atau *empowerment* diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas, individu, organisasi, ataupun sistem. *Power* juga dapat diartikan sebagai keunggulan bersaing atau posisi-tawar (*bargaining position*). Karena itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai penguatan atau peningkatan keunggulan bersaing atau posisi tawar.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Berikut beberapa pengertian masyarakat menurut pada ahli:

1. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri (Alit, 2005)
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
3. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons dalam Suharto, 2005)

Sejalan dengan pengertian di atas, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan- gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice)* sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. dapat

diartikan sebagai upaya memenuhi, kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

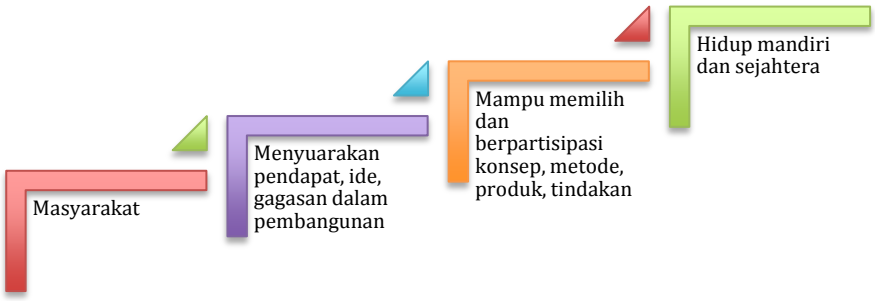

Gambar 1. Diagram Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan juga mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, antara lain dalam arti :

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan;
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan);
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan;
4. Terjaminnya keamanan;
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Sedangkan pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Terdapat 3 kriteria pemberdayaan masyarakat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. **Swadiri** : yaitu mampu mengurusi diri sendiri
2. **Swadana** : yaitu mampu membiayai keperluan sendiri
3. **Swasembada** :yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan

Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Berikut adalah konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan :

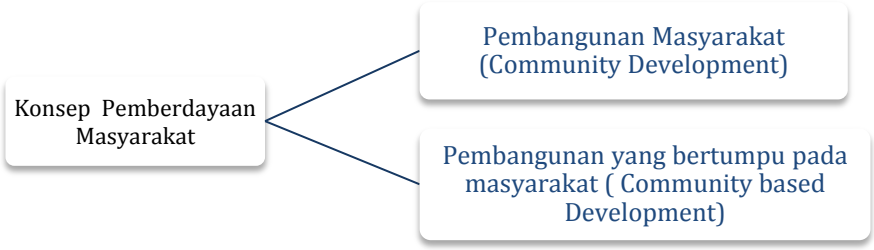

Gambar 2. Diagram Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pada Proses Pembangunan

Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu 1) pembangunan masyarakat dan 2) pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Terjadi pergeseran paradigma pembangunan di era reformasi, yaitu dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai "*provider*" (penyedia) tetapi sebagai "*enabler*" (fasilitator). Peran sebagai *enabler* berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai penggguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional.

Untuk pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (individu/kelompok) merupakan suatu pola pendekatan yang mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pembangunan, sehingga semua keputusan dan tindakan pembangunan didasarkan pada aspirasi, kepentingan/kebutuhan, kemampuan dan upaya masyarakat. (Handrianto, 1996). Aplikasi dari pembangunan bertumpu pada masyarakat dalam kegiatan pembangunan diwujudkan melalui pembangunan partisipatif dimana tiap tahapan pembangunan mulai dari pengenalan permasalahan dan perumusan kebutuhan, perencanaan dan pemrograman, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kesepakatan bersama antar pelaku yang terliba (Parwoto,1997). Dilihat dari 2 jenis pemberdayaan di atas maka dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan **subyek** dari upaya pembangunannya sendiri

Komponen Pemberdayaan

Terdapat komponen pokok yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1) **Penelitian** untuk penggalian data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan rencana strategis (strategic plan) sesuai kebutuhan (needs). Metodologi yang dapat digunakan antara lain *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Participatory Action Research* (PAR), *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark (Baseline Study*),
2) **Pelatihan** dengan fokus pengembangan kapasitas (capacity building) terhadap target pemberdayaan,
3) **Kerjasama dan inovasi**: Pelatihan akan berjalan efektif apabila dilengkapi jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepakaran dan komitmen, serta mengandung muatan inovasi spesifik lokasi. Sinkronisasi semua komponen tersebut diwujudkan dari hasil penelitian,
4) **Pemangku kepentingan** dan tenaga pendamping ini seyogianya gabungan dari petugas instansi pemerintah dan unsur LSM yang tinggal dan kontak langsung dengan masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi pemberdayaan. Disamping itu, tenaga pendamping juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program pemberdayaan,
5) **Pengawasan dan evaluasi** merupakan masukan untuk modifikasi dan penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Semua komponen tersebut diimplementasikan dalam konsepsi "partisipatif". Nugroho (2014)

Untuk pelaksanaan pemberdayaan memiliki 11 (sebelas) dimensi, yaitu :

1) ***Structure***, penekanan pada struktur pembentukan yang dilatar belakangi adanya kesamaaan tujuan,
2) ***Setting time***, penggunaan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan,
3) ***Rule of learner***, tugas warga belajar dan fasilitator kerja sama dalam menentukan dan membuat keputusan secara bersama,
4) ***Role of facilitator***, tugas fasilitator membantu warga belajar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi,
5) ***Relationship*** between learners and fasilitator, hubungan diantara warga belajar dan fasilitator,
6) ***Need assessment***, asesmen kebutuhan diidentifikasikan dari warga belajar beserta fasilitator,
7) ***Curriculum development***, tujuan yang inin dikembangan,
8) ***Subject matter***, menunjukkan pada isi pemberdayaan, fasilitator membantu warga belajar dalam menyelesaikan masalahnya,
9) ***Material***, bahan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan,
10) ***Methods***, metode yang digunakan,
11) ***Evaluation***, tindakan evaluasi sebagai wujud keberhasilan pemberdayaan.

Pengertian Partisipasi Masyarakat

WHO mendefinisikan pengertian partisipasi masyarakat adalah proses di mana masyarakat dimungkinkan menjadi aktif dan terlibat dalam mendefinisikan isu-isu di masyarakat, pengambilan keputusan tentang faktor yang berdampak pada kehidupan, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, merencanakan, mengembangkan dan memberikan pelayanan dan mengambil tindakan untuk mencapai perubahan. (WHO dalam Heritage, 2009). Terdapat beberapa konsep partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat mengimplikasikan perbedaan tipe dan tingkatan partisipasi (contoh konsultasi dan pemberdayaan)
2) Partisipasi masyarakat mempresentasikan metode kerja dan prioritasnya agar memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi (membangun kapasitas masyarakat dan pengembangan masyarakat)
3) Ketiga, partisipasi masyarakat menjelaskan atau memetakan intraksi dan hubungan dengan masyarakat yang dipengaruhi oleh partisipasi dan hubungannya dengan kesehatan dan kesejahteraan (contoh *social* dan *community cohesion*)

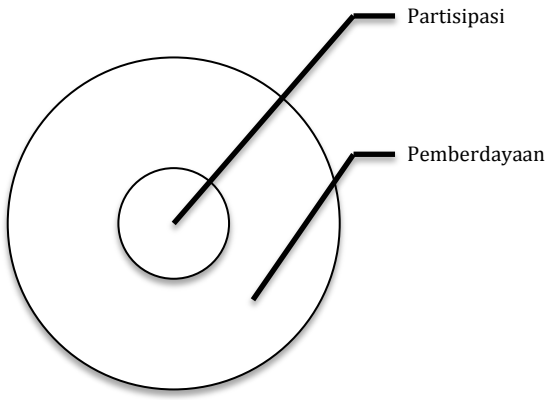

Gambar 3. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk menyadarkan, mengembangkan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dan perlibatan anggota masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. masyarakat dan semua pihak yang terlibat perlu memahami bahwa keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaanya. Terdapat beberapa bentuk dan tipe partisipasi yang diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi uang, yaitu bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
2) Patisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas

3) Partisipasi tenaga, adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
4) Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya
5) Partisipasi buah pikiran, merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya
6) Partisipasi social, diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi
7) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersam
8) Partisipasi representative, dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.
9) Partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “partisipasi non fisik dan partisipasi fisik”. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah

Pada negara-negara kurang berkembang untuk partisipasi masyarakat terbagi atas 8 tingkatan, seperti terlihat dalam gambar berikut ini:

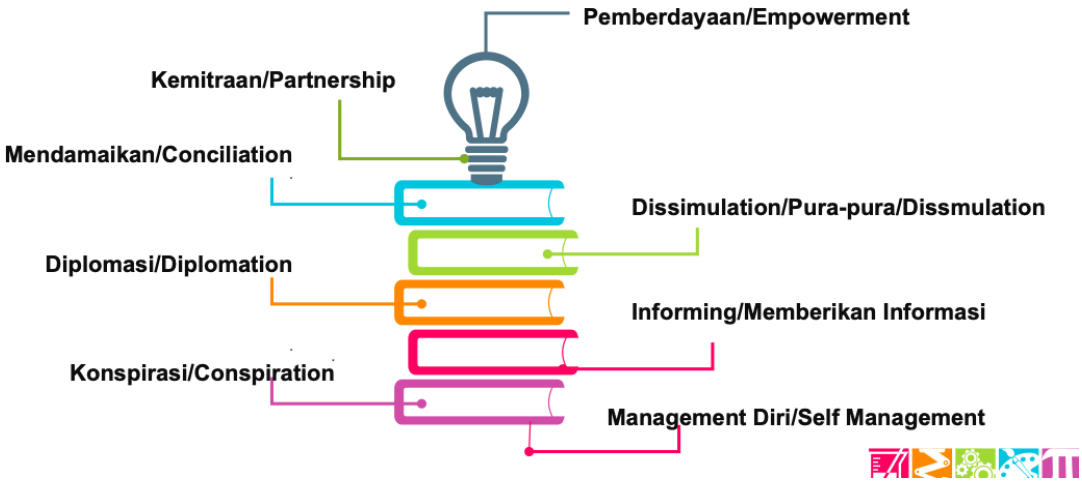

Gambar 4. Delapan Level Partisipasi Masyarakat

Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi adalah:

1) Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
2) Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.
3) Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
4) Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
5) Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan. (Pariatra Westra dalam Widi Astuti, 2008)

Pendapat lain dikemukakan oleh Burt K. Schalan dan Roger (Widi Astuti, 2008:14) bahwa manfaat dari partisipasi adalah:

1) Lebih banyak komunikasi dua arah.
2) Lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan.
3) Manajer dan partisipasi kurang bersikap agresif.
4) Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, diakui dalam derajat lebih tinggi (Burt K. Schalan dan Roger dalam Widi Astuti, 2008)

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

1) **Faktor internal**, merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi masyarakat. Faktor internal juga mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat pendidikan, etnis, agama, bahasa, pekerjaan, tingkat pendapatan, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan atau aktivitas dan kepemilikan tanah (Cohen, J. and Uphoff, 1977). Berdasarkan hal ini, sejalan

dengan pernyataan Slamet (1994(, yang menyatakan bahwa karakteristik individu dapat mempengaruhi aktivitas kelompok, mobilitas individu dan kemampuan finasial. Sedangkan faktor yang sangat significant memberikan pengaruh pada tingkat partisipasi adalah variable pendidikan dan usia (Wijayanti, 2011). Karena dianggap faktor pendidikan akan menjadikan seseorang lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan akan cepat tanggap terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi. Semakin tinggi pendidikannya, semakin luas pengetahuannyaterhadap pembangunan dan akan membantu berperan serta dalam pembangunan tersebut (Y.Slamet, 1994)

2) **Faktor eksternal**, faktor eksternal berasal dari luar komunitas. Faktor eksternal adalah semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus Desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Daerah, NGO, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial, Perguruan Tinggi) (Sunarti, 2003). faktor eksternal berupa kesempatan yang mendorong individu untuk ikut berpartisipasi dalam program, berupa pemberian akses (Lokita, 2011) dan (Mardikanto & Soebiato, 2013). Sejalan dengan pernyataan ini, ditambahkan bawah terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi partisiasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan atau eksternal, yaitu : 1) komunikasi sesama warga, 2) iklim social, 3) kesempatan untuk berpartisipasi, 4) kebebasan untuk berkreasi (Holil, 1980)

Bentuk, Tingkatan dan Derajat Kesukarelaan Partisipasi dalam Pembangunan

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan atau pemberdayaan ialah bentuk ambil bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan ataupun pemberdayaan guna mencapai tujuanpembangunan maupun pemberdayaan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

1) **Partisipasi non fisik** adalah partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.dan
2) **Partisipasi fisik**. Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usahausaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya

Proses Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Proses pemberdayaan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan guna mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program/kegiatan pembangunan, aspek-aspek dimaksud adalah:

1) Program/kegiatan harus disusun oleh masyarakat itu sendiri
2) Program/kegiatan tersebut diyakini dapat memecahkan masalah yang dihadapi
3) Pemberdayaan baik pihak pemerintah maupun pihak luar lainnya harus mendukung sebesar mungkin partisipasi masyarakat, baik kelompok miskin, perempuan, buta huruf dan masyarakat tuna daya lainnya
4) Penggunaan sumberdaya sumberdaya lokal
5) Program/kegiatan disusun haruslah memperhatikan nilai-nilai budaya setempat dan memperhitungkan dampak lingkungan yang terjadi
6) Tidak berakibat terciptanya ketergantungan (mampu memandirikan)
7) Dilakukan secara bersama-sama dalam posisi kesetaraan
8) Harus mampu dilanjutkan sendiri oleh masyarakat tanpa campur-tangan pihak luar.

Terdapat kelemahan yang mempengaruhi kualitas dan efektifitas partisipasi warga desa, yaitu :

1) Belum meratanya kemauan politik maupun pemahaman di jajaran pemerintahan (desa) tentang pentingnya dan keuntungan konkrit dari proses partisipasi.
2) Kebijakan dan peraturan yang mengatur proses partisipasi dalam tata pemerintahan tidak cukup mengikat dan tidak memberikan insentif yang cukup berarti untuk diterapkan secara serius dan berkelanjutan
3) Forum-forum warga atau forum multi-pihak yang berpotensi menjadi media penyalur suara seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan diri menjadi lembaga yang demokratis dan kuat
4) Para perencana, pelaksana dan fasilitator program partisipatif sering menghadapi kesulitan untuk menjawab pertanyaan “bagaiamana caranya” menjalankan suatu mekannisme atau prosedur baru yang partisipatif? Bagaimana agar warga bisa berpartisipasi secara efektif dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan tertentu dalam suatu forum partisipatif.?

2. Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Di Desa Mandiri Lestari (DML)

Desa sebagai satu kesatuan pemerintahan terkecil, berdasarkan Undang-undang tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI (UU no 6 Tahun 2014). Apabila kita ingin membangun negara akan sangat tepat apabila dimulai dari desa.

Yayasan Damandiri sejak tahun 2017 sudah mengembangkan Desa Mandiri Lestari (DML) di wilayah Jawa. Desa Mandiri Lestari adalah desa yang mampu bekerja secara gotong royong, dan modern dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menjaga kelestariannya guna menghapus kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan serta kemandirian dengan bersendikan nilai-nilai Pancasila. Universitas Trilogi aktif mendukung pelaksanaan program-program di DML di bidang ekonomi, pendidikan dan pertanian sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, sebagian kelompok KKN mulai melaksanakannya di salah satu DML yaitu desa Pasarean dan 7 desa di sekitarnya. Sejak tahun 2018 seluruh kelompok KKN melaksanakannya di desa Pasarean dan 9 desa di sekitarnya.

Jumlah DML dikembangkan secara bertahap selama 3 tahun, pada tahun 2017 dikembangkan 5 DML di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yaitu: (1) Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, (2) Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, (3) Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, (4) Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dan (5) Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pada tahun 2018 dikembangkan 11 DML, 5 DML yang sudah ada ditambah 6 DML baru di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu: (1) Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, (2) Desa Krambil Sawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, (3) Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, (3) Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, (4) Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, (5) Desa Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dan (6) Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Pada 2019 akan dikembangkan di wilayah Provinsi Banten.

Program Pemberdayaan masyarakat ditujukan terutama pada keluarga Pra-sejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS 1) dengan melibatkan partisipasi total seluruh masyarakat melalui Koperasi dan Posdaya dengan kearifan lokal gotong royong yang merupakan saripati dari Pancasila. Harapannya KPS dan KS 1 kesejahteraannya meningkat dan mandiri, tidak menjadi beban tetapi justru dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Sebelumnya pola pemberdayaan dan partisipasi masyarakat hanya dikembangkan melalui Posdaya, sejak akhir 2016 mulai dikembangkan pola pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui Koperasi dan Posdaya. Koperasi tidak sekedar untuk ekonomi tetapi juga bisa menjadi pintu masuk untuk mengorganisasikan

masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dll. Koperasi juga dapat membuka akses pasar bagi produk pertanian dan produk lokal di desa yang bersangkutan.

Arah Program Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat di DML

1. Penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan. Pengembangan program di perdesaan harus sejauh mungkin melibatkan partisipasi total seluruh masyarakat berbasiskan gotong royong.
2. Komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki dan secara ekonomi layak untuk dikembangkan oleh Desa.
3. Wilayah pengembangan Desa lebih mengacu pada kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah administrasi.

Strategi dan Program Pemberdayaan Desa Mandiri Lestari (DML)

Pembangunan desa miskin dilakukan oleh pemerintah, didukung juga oleh perusahaan dan yayasan. Program pemberdayaan desa miskin dilakukan di bidang agama dan budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana dan tata kelola desa. Program dilaksanakan dengan dana desa baik berupa dana hibah atau bantuan sosial (bansos) atau *block grant*. Yayasan khususnya Yayasan Damandiri melakukan program pemberdayaan masyarakat Desa Mandiri Lestari terutama KPS dan KS 1 melalui perkuatan dan pemberian modal untuk Koperasi berupa fasilitasi dan advokasi untuk program pemberdayaan masyarakat. Perkuatan dan modal di koperasi digunakan untuk simpan pinjam, revitalisasi pasar rakyat dan inovasi usaha produktif.

Strategi pemberdayaan masyarakat miskin menurut Suharto ada 5 strategi atau 5 P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan yang dipilih adalah penguatan (*empowering*) yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Harapannya pemberdayaan masyarakat mampu menumbuh kembangkan seluruh kemampuan rasa percaya diri masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri (Suharto, 2006).

Gambar 5. Strategi Pembangunan Desa Mandiri Lestari

Program pemberdayaan masyarakat DML oleh Yayasan Damandiri dilakukan melalui koperasi, sumber dana berupa dana pokok dan surplus yang merupakan hasil dari dana pokok. Pada awal berdiri koperasi diberikan perkuatan dana pokok, dana pokok dikembangkan melalui kredit lunak dan sangat lunak tabur puja sehingga diperoleh modal dan hasil. Hasil dana pokok atau surplus digunakan untuk operasional rutin dan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat berupa program langsung dan tidak langsung, program tidak langsung seperti pelatihan, pendampingan, advokasi dan inisiasi. Program pemberdayaan masyarakat dan modal ditujukan untuk keluarga miskin (KPS dan KS 1) agar menjadi kelompok keluarga usaha produktif dan inovatif sehingga dapat menjadi keluarga mandiri dan sejahtera. Berikut ini adalah diagram strategi pembangunan Desa Mandiri Lestari.

Program pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung berupa pelatihan, pendampingan, advokasi dan inisiasi. Pelatihan merupakan pendekatan mezzo dalam pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Dalam hal ini masyarakat tidak sekedar menjadi obyek tetapi diberi ruang gerak yang sangat luas untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat memperkuat kapasistas masyarakat (*capacity building*). Pendampingan merupakan kegiatan yang bermakna pembinaan, dan pengarahan suatu kelompok agar dapat dikontrol menjadi lebih baik. Pendampingan merupakan upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya agar kondisi menjadi lebih baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll (Abdur Rozaki, 2016). Advokasi merupakan sejumlah tindakan yang dirancang untuk

menarik perhatian masyarakat pada suatu isu, dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Sehingga pendampingan dan advokasi dapat dikategorikan sebagai pendekatan mikro pemberdayaan masyarakat karena bertujuan memberikan bimbingan pada klien untuk menjalankan tugasnya.

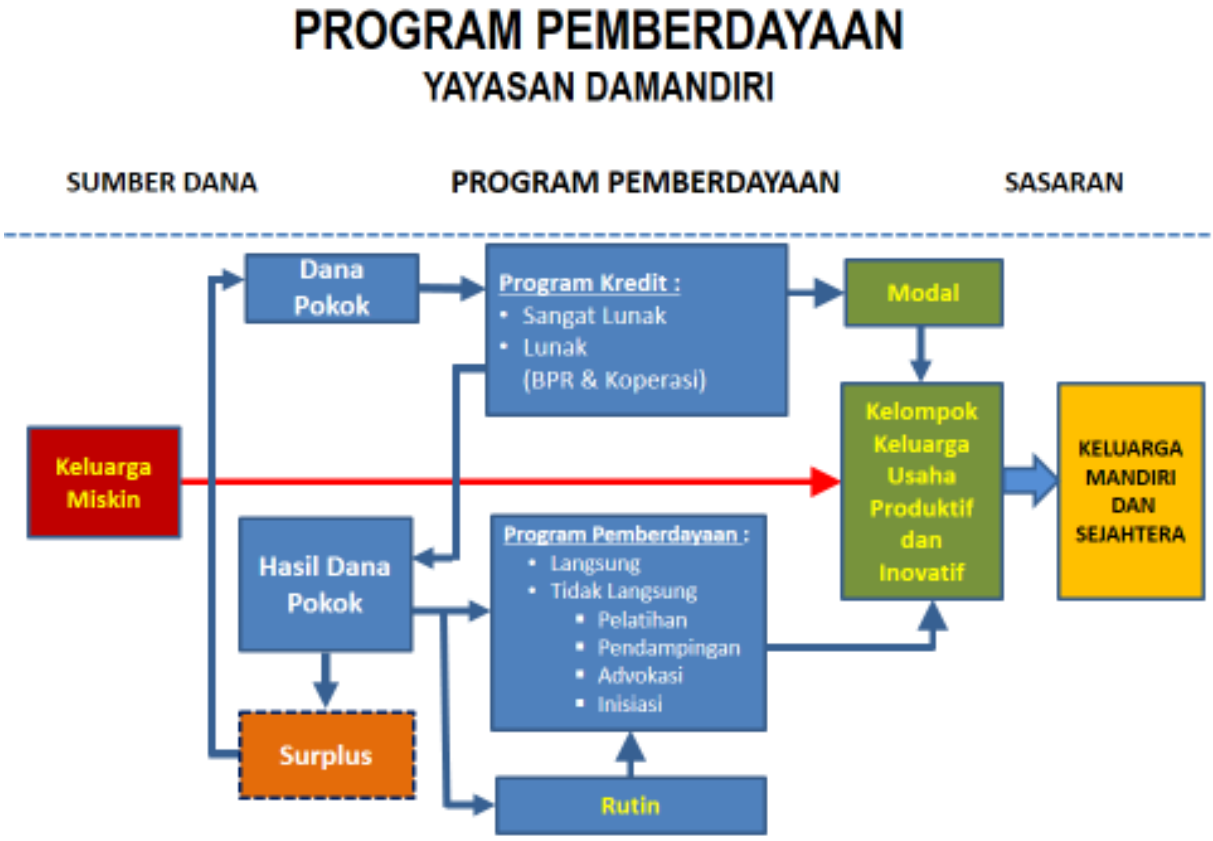

Gambar 6. Program Pemberdayaan Yayasan Damandiri

Alur Perencanaan Program Desa Mandiri Lestari (DML)

Alur Perencanaan Program DML dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Sosialisasi, Pengumpulan data basis, Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA).

1. Sosialisasi

   Sosialisasi dilakukan dengan pihak terkait seperti: Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintahan Desa. Selain itu juga dilakukan Memorandum of Understanding (MoU).

2. Survey dan Observasi Kondisi DML

   Survey dan observasi kondisi desa secara langsung di lapangan untuk identifikasi potensi desa, seperti potensi sumber daya alam, potensi usaha kecil dan menengah, potensi SDM, potensi perekonomian desa dan potensi sosial-budaya masyarakat desa. Pada saat survey dapat dilakukan perkenalan dan dialog langsung dengan tokoh

masyarakat/agama/pemuda/ perempuan, kelompok usaha di desa, kelompok tani/ternak/nelayan, dll.

3. Pengumpulan Data Basis

   Pengumpulan data basis atau data primer langsung ke lokasi desa dengan menggunakan instrumen pengumpulan data. Instrumen dapat diisi oleh pemerintahan desa, posdaya dan kelompok lain non posdaya. Data yang dikumpulkan diantaranya data-data berikut ini:

   a. Data desa, seperti: Jumlah Dusun/dukuh. Jumlah RW/RT, jumlah Posdaya, jumlah Posdaya, jumlah Posyandu, jumlah PAUD/SD/sekolah di desa, jumlah guru di jenjang pendidikan yang ada, jumlah kelompok pengrajin, jumlah pasar tradisional, jumlah pabrik, jumlah warung, jumlah minimarket.
   b. Sarana desa, seperti: sarana kesehatan, ibadah, pendidikan dan pendukung lainnya.
   c. Kondisi Demografi, seperti: jumlah penduduk menurut jenis kelamin, pekerjaan, umur, tahapan keluarga (Prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan Sejahtera III plus).
   d. Bidang usaha di masyarakat (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kewirausahaan), perdagangan, jasa, koperasi/pra-koperasi, pariwisata dan lainnya
   e. Potensi desa, seperti: sumber bahan baku, pabrik pengolahan, dan pemasaran.

4. *Focus Group Discussion* (FGD), FGD adalah media bagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara lebih mendalam. FGD merupakan bentuk penelitian kualitatif untuk menanyakan sikap sekelompok orang terhadap konsep, layanan, produk, ide atau kemasan. Dalam FGD terdapat suatu topik yang dibahas dan didiskusikan bersama. Peserta FGD diantaranya adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kelompok usaha (pertanian, nelayan, peternakan, wirausahawan, dll), Posdaya, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok marginal di desa. Materi yang dibahas di FGD seperti:

   a. Alternatif-alternatif program pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa
   b. Mendorong kemandirian warga agar memiliki potensi yang berkelanjutan dan tidak ketergantungan.
   c. Potensi-potensi yang ada di desa mengacu pada *Suistainable livelihood approach* (SLA) yang terdiri dari 5 modal yaitu *natural, physical, human, financial* dan *social capital* yang diarahkan untuk terbentuknya *One Village One Product* (OVOP).

5. Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA)

   RPKA disusun berdasarkan hasil survei dan observasi, hasil analisis data basis dan Forum Group Discussion (FGD). RPKA terdiri dari bidang/kegiatan, Program kerja dan anggaran. Bidang/kegiatan meliputi:

a. Sosial Budaya, meliputi: pendidikan (PAUD/BKB/Kejar paket), kesehatan (Posyandu, Posbindu, jamban keluarga, penyediaan air bersih, rumah sehat), keagamaan (Masjid, Mushola, kelompok remaja masjid, kelompok pengajian), Budaya/olahraga (grup kesenian dan olahraga), Pembinaan kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, Kepramukaan, Posdaya, Desa Siaga Bencana, Balai Latihan Masyarakat).
b. Ekonomi, meliputi: Produksi (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Perindustrian), Lingkungan (Pengelolaan limbah, pemanfaatan lahan/pekarangan), Jasa (Pariwisata, transportasi, travel, jasa lainnya), Perdagangan (Warung/Kios Makanan, pedagang sembako, pedagang pasar, Koperasi, Bumdes
c. Sarana dan Prasarana
d. Dana Operasional pengelola lapangan

Contoh Alur Perencanaan Program DML untuk bidang Sosial Budaya/Pendidikan untuk kegiatan “Pelatihan Peningkatan SDM Guru PAUD”

1. Sosialisasi dan Koordinasi dengan pihak terkait pelatihan:
   a. Koordinasi dengan Perangkat desa (Kepala desa dan Carik) untuk ijin dan dukungan pelatihan, misal berupa penyediaan tempat pelatihan di balai desa, koordinasi dengan warga desa peserta pelatihan.
   b. Koordinasi dengan Koperasi untuk pelaksanaan pelatihan berupa penyaluran dana pelatihan.
   c. Koordinasi dengan dinas pendidikan setempat (Dinas pendidikan Kabupaten, UPTD Pendidikan Kecamatan) untuk ijin pelatihan dan sertifikat pelatihan.
   d. Sosialisasi pelatihan dan koordinasi dengan IGTK (Ikatan Guru TK) dan Himpaudi (Himpunan Pendidik AUD) yang membantu koordinasi dan pemetaan peserta pelatihan
2. Survey lokasi pelatihan
   Survey Lokasi dan pemetaan materi pelatihan sesuai dengan potensi lokal desa (potensi alam dan potensi budaya serta kearifan lokal desa). Potensi alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan wisata alam. Potensi budaya seperti: tradisi, kearifan lokal dan budaya lokal.
3. Pengumpulan data peserta pelatihan, meliputi: jumlah peserta, nama peserta, asal lembaga PAUD dan asal desa, serta latar belakang pendidikan.
4. Penyusunan Rencana Program Pelatihan
   Penyusunan proposal atau Term of Reference/TOR untuk waktu, tempat, materi, nara sumber dan Jadwal Pelatihan

B. Latihan

1. Sebutkan 3 kriteria pemberdayaan masyarakat !
2. Buatlah “Alur Perencanaan Program KKN Swadesa” untuk salah satu bidang berikut, yaitu: Sosial Budaya, Ekonomi, Sarana dan prasarana.

C. Rangkuman

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dengan masyarakat untuk menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam dan berbagai pengontrolan atas dan yang mempengaruhi kehidupannya didalam masyarakat tersebut. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan.

Desa Mandiri Lestari adalah desa yang mampu bekerja secara gotong royong, dan modern dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menjaga kelestariannya guna menghapus kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan serta kemandirian dengan bersendikan nilai-nilai Pancasila.

Program pemberdayaan masyarakat DML oleh Yayasan Damandiri dilakukan melalui koperasi, sumber dana berupa dana pokok dan surplus yang merupakan hasil dari dana pokok, yang kemudian dikembangkan melalui kredit lunak dan sangat lunak tabur puja sehingga diperoleh modal dan hasil. Hasil tersebut digunakan untuk operasional rutin dan program pemberdayaan masyarakat baik berupa program langsung dan program tidak langsung seperti pelatihan, pendampingan, advokasi dan inisiasi yang ditujukan untuk keluarga miskin (KPS dan KS 1) agar menjadi kelompok keluarga usaha produktif dan inovatif sehingga dapat menjadi keluarga mandiri dan sejahtera.

Alur Perencanaan Program DML dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Sosialisasi, Pengumpulan data basis, Focus Group Discussion (FGD), Penyusunan Rencana Program Kerja dan Anggaran (RPKA).

D. Tes Formatif

1. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dibawah ini kecuali …
   A. Jenis Kelamin
   B. Umur
   C. Kesempatan
   D. Status
2. ***Structure*** yang merupakan penekanan pada struktur pembentukan yang di latar belakangi adanya kesamaaan tujuan serta ***Setting time*** yang berarti penggunaan waktu

yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, merupakan bagian dari pemberdayaan berikut ini :

A. Pengertian Partisipasi
B. Bentuk Partisipasi
C. Dimensi Partisipasi
D. Faktor Partisipasi

3. Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah
   A. Keputusan yang menyatakan kehendak, tujuan, prinsip atau maksud sebagai pedoman dalam mencapai sasaran dan bersifat mengikat pihakpihak yang terkait
   B. Aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat
   C. Dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya
   D. Proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
4. Metodologi yang dapat dilakukan untuk penggalian data dan informasi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan rencana strategis (strategic plan) sesuai kebutuhan (needs) dalam pemberdayaan masyarakat
   A. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Participatory Action Research* (PAR), *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*),
   B. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Action Research*, *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*),
   C. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Participatory Action Research* (PAR), Arisan, *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*),
   D. *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), Angket, *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*)
5. Bentuk-bentuk partisipasi, kecuali:
   A. Partisipasi uang
   B. Partisipasi keterampilan
   C. Partisipasi buah pikiran
   D. Partisipasi keluarga

6. Sasaran pemberdayaan masyarakat miskin adalah kelompok keluarga?
   A. Keluarga Sejahtera 1 dan Keluarga Sejahtera 2
   B. Keluarga Sejahtera 2 dan Keluarga Sejahtera 3
   C. Keluarga Sejahtera 3 dan Kelurga Pra-Sejahtera
   D. Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1

7. Program pemberdayaan masyarakat Desa Mandiri Lestari (DML) oleh Yayasan Damandiri dilakukan melalui:
   A. Posdaya
   B. Koperasi
   C. Posdaya dan Koperasi
   D. Koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

8. Mengapa koperasi menjadi salah satu strategi program pemberdayaan masyarakat?
   A. Karena koperasi dapat membuka akses pasar bagi produk lokal desa
   B. Karena koperasi dapat menjadi pintu masuk untuk mengorganisasikan masyarakat.
   C. Jawaban a benar
   D. Jawaban a dan b benar

9. Bagaimana alur perencanaan program di desa ?
   A. Koordinasi dan sosialisasi, Pengumpulan data dan Penyusunan anggaran
   B. Sosialisasi, Pengumpulan data basis, FGD dan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran.
   C. Survey lokasi, pengumpulan data dan penyusunan program kerja.
   D. Survey lokasi, sosialisasi, pengumpulan data, FGD dan penyusunan anggaran.

10. Pemberdayaan masyarakat dengan dana terbatas dapat dilakukan dengan strategi berikut ini:
   A. pelatihan
   B. pendampingan
   C. advokasi dan inisiasi
   D. Semua benar

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Capaian pembelajaran dan tindakan yang perlu dilakukan pada modul 5 untuk mengembangkan pemahaman tentang bahan modul dan capaian pembelajarannya, apabila minimal 6 soal dari 10 soal dari tes formatif dapat dikerjakan (pengetahuan) dan dapat mengerjakan latihan (keterampilan). Tindak lanjut untuk mahasiswa yang perlu mengulang atau menambah materi pembelajaran tertentu apabila lebih dari 4 soal salah dan tidak dapat mengerjakan soal latihan.

Kunci Jawaban

Latihan Kegiatan Belajar 1:

a. **Swadiri** : yaitu mampu mengurusi diri sendiri
b. **Swadana** : yaitu mampu membiayai keperluan sendiri
c. **Swasembada** : yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan

Kegiatan Belajar4: Tahapan Dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

A. Uraian Materi

Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community driven development*) adalah bentuk pengembangan konsep pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) yang bersumber pada pendekatan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi pada abad 19 menjelaskan orientasi pembangunan dunia berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan dihasilkannya produk (*output*) maksimum. Konsep pertumbuhan ekonomi pada masa industrialisasi ini tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat namun semakin melebarnya ketimpangan ekonomi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. *Trickle down effect* yang diharapkan berdasarkan terciptanya Kawasan-kawasan pusat pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan sekitar tidak mampu terbentuk. Fenomena tersebut mendorong adanya ketimpangan kesejahteraan antara daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan daerah pinggiran. Sistem *top-down* merupakan acuan dalam perencanaan pembangunan yang didominasi otoritas, kapasitas dan kapabilitas masyarakat pada masa itu dibatasi.

Pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) menggerakkan unsur inisiatif kreatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan beorientasi pada kesejahteraan mental dan spiritual masyarakat dalam proses pembangunan. *People centered development* merupakan bentuk strategi pembangunan dalam menciptakan kesejahateraan masyarakat, dimana mekanisme pasar tidak mampu memenuhi kepentingan sosial masyarakat. Konsep pembangunan berbasis masyarakat memiliki ciri – ciri sebagai berikut (Soleh, 2014): (1) Menekankan pada lokalitas baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan maupun kultur. (2) Berimplikasi pada *transformatif and transactive planning, bottom up, community empowerment and participative.* Bentuk pendekatan atau strategi pembangunan berbasis pemberdayaan yang dapat digunakan antara lain; pendekatan berbasis masyarakat (*people centre approach*) atau pendekatan partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan partisipatif menjelaskan peran peran masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan, oleh sebab itu para fasilitator

pendamping masyarakat harus mampu membantu masyarakat dalam menginisiasi, merencakan dan melaksanakan, segala sesuatunya yang terkait dengan pembangunan (Laurer, 2003). Masyarakat dalam hal ini berperan utama dalam keberhasilan pemberdayaan, oleh sebab itu respon, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat, atau tingkat partisipasi masyarakatnya merupakan penentu utama keberhasilan. Kondisi-kondisi sebagai prasarat terciptanya peran partisipatif seluruh masyarakat setempat (Dasgupta, 2007) adalah sebagai berikut: (1) adanya desentralisasi, (2) adanya demokrasi, dan (3) adanya tindakan kolektif.

Tahapan dan Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

1. Tahapan Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pada umumnya pembangunan berbasis masyarakat meliputi tiga tahapan mendasar yang saling terkait: (a) perumusan dan penentuan tujuan; (b) pengujian atau analisis opsi-opsi atau pilihan pilihan yang tersedia serta (c) pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Syachroni, 2002). Dalam konteks perencanaan daerah, siklus tersebut berputar sebagai berikut (a) Dimulal dari pemahaman daerah atas konteks masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat; (b) penetapan visi-misi daerah; (c) perumusan tujuan-tujuan; (d) mengidentifikasi strategistrategi alternatif; (e) pengujian alternatif strategi atau program; (f) seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program; (g) penganggaran; (h) implementasi, dan (I) monitoring dan evaluasi, dimana hasil-hasil monev ini merupakan input untuk pemahaman daerah pada periode berikutnya (Syachroni, 2002).

2. Metode Pembangunan Berbasis Masyarakat

a. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktek, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat. Metode RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Komunikasi dan kerjasama

diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah hal yang sangat penting dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di perdesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Metode RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*). Sebagai suatu teknik penilaian, RRA menggabungkan beberapa teknik yang terdiri dari:

1) Review/telaahan data sekunder, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
2) Oservasi/pengamatan lapang secara langsung.
3) Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.
4) Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.
5) Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.
6) Kecenderungan-kecenderungan.
7) Pembuatan kuesioner sederhana yang singkat.
8) Pembuatan laporan lapang secara cepat.

b. PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA. PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stakeholders dengan difasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang menggurui. PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan bertindak. Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metode PRA bertujuan menjadikan

warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan:

1. Pemetaan-wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian keadaan
2. Analisis keadaan yang berupa:
    a) Keadaan masa lalu, sekarang, dan kecenderungan di masa depan.
    b) Identifikasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi, alasan-alasan atau penyebabnya.
    c) Identifikasi masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
    d) Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau analisis SWOT terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
3. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
4. Rincian tentang stakeholders dan peran yang diharapkan dari para pihak, serta jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang dapat diharapkan untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan diusulkan/ direkomendasikan.

Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa dengan yang digunakan dalam metode RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar.

3. Action Research

Dalam rangka program pengembangan masyarakat, salah satunya melalui suatu pendekatan *Action Research* (penelitian tindak), atau sering disebut *participatory research* (penelitian partisipatif). Pemilihan pendekatan ini dimulai dari suatu keyakinan bahwa komunitas suatu masyarakat mampu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Dengan pendekatan ini, masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dalam aksi pengembangan masyarakat. Peneliti luar mempunyai fungsi ganda sebagai pengamat terhadap proses sosial yang berjalan dan sekaligus masuk dalam sistem lokal. Untuk

melakukan analisa dengan masyarakat peneliti bertumpu pada kegiatan “aksi-refleksi”. Seluruh tindakan, pengetahuan dan pengalaman masyarakat merupakan realitas sosial yang dikaji/direfleksi kembali. Hasil refleksi berupa problem mereka. Pemahaman terhadap realitas sosial ini kemudian melahirkan “aksi-aksi pemecahan masalah” menurut cara mereka. Demikian seterusnya masyarakat akan melakukan refleksi kembali terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan. Hasil refleksi yang kedua akan melahirkan realitas/masalah baru yang berlainan dengan masalah yang pertama. Oleh karena itu proses aksi refleksi bukanlah merupakan siklus (*cyclus proses)* karena masalah kedua sebenarnya berlainan dengan masalah pertama.

Berbagai pendekatan yang disebutnya sebagai pendekatan berbasis masyarakat (*people-centered approaches*) yang dijalankan dalam program-program pendukung penghidupan (*Livelihood Support Programme*) oleh FAO-PBB pada berbagai wilayah dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Metode-metode tersebut yaitu: *Sustainable Livelihood Approaches (SLA), Gestion de Terroirs (GT), Integral Rural Development (IRD), Farming System (FS),* dan *Latin America Approaches (LAA)*. Umumnya pendekatan-pendekatan tersebut lebih menyerupai pendekatan partisipatif pada awal perkembangannya (Clearly dkk, 2003).

Metode sebagai strategi untuk melibatkan masyarakat atau yang dikenal sebagai pendekatan partisipatif, yaitu: (1) *Participatory Research and Development* (PRD), (2) *Parcipatory Assessment and Planning* (PAP), (3) *Participatory Technologi Development* (PTD), (4) *Participatory Learning Methods* (PLM), (5) *Participatory Action Research* (PAR), & (6) *Participatory Learning and Action* (PLA) (Hikmat, 2001).

B. Latihan

1. Jelaskan kesimpulan pembangunan berbasis masyarakat menurut anda !
2. Buatlah rangkuman metode pembangunan berbasis masyarakat !
3. Buatlah *mapping* tentang tahapan dan metode pembangunan berbasis masyarakat !

C. Rangkuman

Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (*community driven development*) adalah bentuk pengembangan konsep pembangunan berbasis masyarakat (*people centered development*) yang bersumber pada pendekatan pembangunan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia

dalam pembangunan masyarakat adalah karena pada dasarnya peran individu itu sendiri penting dalam suatu komunitas maupun lingkungannya. Peran individu dalam masyarakat terkait pembangunan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik lagi. Pertumbuhan kesejahteraan masyarakat juga harus sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

D. Tes Formatif 4

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah bentuk pengembangan konsep pembangunan berbasis masyarakat.
   (A) Benar (B) Salah
2. Dalam pembangunan berbasis masyarakat penting adanya peran individu
   (A) Benar (B) Salah
3. Peran individu dalam masyarakat terkait pembangunan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan lingkungan dan masyarakat
   (A) Benar (B) Salah
4. Metode-metode sebagai strategi untuk melibatkan masyarakat guna mendapatkan informasi yang valid
   (A) Benar (B) Salah
5. Perencanaan merupakan tahapan awal yang dibutuhkan dalam pembangunan berbasis masyarakat
   (A) Benar (B) Salah

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. D social plan
2. A pembangunan berarti pembangunan fisik saja, seperti jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya
3. D kekayaan rata-rata, kualitas kehidupan, dan pedesaan
4. D perekonomian didasarkan pada perencanaan pusat
5. D top down
6. E Berangkat dari dua kutub dikotomis, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional.
7. A Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan
8. D agama adalah candu
9. D bergerak ke kedewasaan, jaman konsumsi massal yang tinggi, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas
10. D fasilitas jalan

Kunci Jawaban Tes Formatif 2

1. A David C. Korten
2. B. Melakukan perubahan sosial yang terencana
3. C. Masyarakat
4. A. Memilih prioritas
5. D. Memperkuat Masyarakat
6. D. Theresia Aprilila, dkk.
7. B. Usaha mengubah sumberdaya yang bersifat potensial menjadi aktual
8. C. Pembangunan Desa Wisata
9. B. Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna
10. D. Pengabdian dan pemberdayaan

Kunci Jawaban Tes Formatif 3

1. C Kesempatan
2. C Dimensi Partisipasi
3. D Proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya
4. A *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Participatory Learning Action Planning* (PLAP), *Participatory Action Research* (PAR), *Participatory Rapid Community Appraisal* (PARCA), *Focused Group Discussion* (FGD), dan *Benchmark* (*Baseline Study*),
5. D Partisipasi keluarga
6. D Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
7. C Posdaya dan Koperasi
8. D Jawaban a dan b benar

9. B Sosialisasi, Pengumpulan data basis, FGD dan Penyusunan Program Kerja dan Anggaran
10. D Semua benar

Kunci Jawaban Tes Formatif 4

1. (A) Benar
2. (A) Benar
3. (A) Benar
4. (A) Benar
5. (A) Benar

Daftar Pustaka

Alatas, S.H. 1988. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu Dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES.

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1988. *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Budiman, Arief. 1996. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiman, Arif Frank dan Andre Gunder. 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi.* terj. Jakarta: Pustaka Pulsar.

Boelaars, Y. 1984. *Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.

Budhisantoso, S. 1989. *Petani dan Pembangunan, dalam Berita Antropologi,* Tahun xiii, No.46, April-Juni 1989. Jurusan Antropologi FISIP UI.

Garna, Yudistira K. ed. 1993. *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara. Bandung*: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Garna, Yudistira K.1999. *Teori Sosial dan Pembangunan Indonesia: Suatu Kajian Melalui Diskusi*. Bandung: Primaco Academika.

Harjanto, N. Teguh Budi. 1998. *Memajukan Demokrasi Mencegah Disintegrasi sebuah Wacana Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1992. *Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta:* Gadjah Mada University Press.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Tantangan dan Agenda Pembangunan. Makalah Disampaikan Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar* Bandung, 30 Oktober 1996

Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Moeis, Drs. Syarif. 2009. *Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori Dependensi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Myron, Weiner (ed). 1994. *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan.* terj. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Oszaer, R. T.T. *Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat.*

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rogers, Everett M.-Schumaker, Floyd F. 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru.* terj. Surabaya: Usaha Nasional.

Stalker, Peter. Oktober 2008. *Millenium Development Goal's*. Jakarta: Setneg. RI.

So, Alvin Y dan Suwarsono. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia, Teori-Teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*; Jakarta: LP3ES.

S, Soedjito. 1991. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan.* Bandung: PT. Bina Cipta.

Saifullah. 2006. *Paradigma Pembangunan Lingkungan Hidup di Indonesia*.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan, Dilema, dan Tantangan.*

Jakarta: Pustaka Pelajar.

Van den Bos, K., Vermunt, R. & Wilke, A.M. 1997b. *Procedural and Distributive Justice: What is Fair Depends More on What Comes First Than on What Comes.* Next. Journal of Personality and Social Psychology.

Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwijowijoto. 2006. *Manajemen Indonesia Membangun, Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elex

Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Nurkholis, Hanif. Kartono, Tri Djarot. Aisyah, Siti. *Pembangunan masyarakat Desa dan Kota.* Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka

Abdur Rozaki, dkk, Napak Tilas Pendampingan Masyarakat Desa di 7 Kabupaten di Indonesia (Yogyakarta: Laporan Hasil Riset IRE, KSI) 2016

A. Mahendra, SE, MSi, Pendekatan dan Strategi Pembangunan Masyarakat, Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINIS" Vol. 1 No. 1 Januari 2015

M. J. Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial, Univeristas Kristren Indonesia Maluku, 2014

Shahnaz Natasya Yaumil Haqqie, Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan (Studi Kasus Kegiatan Pembuatan Pupuk Organik di Desa Blagung, Boyolali), Universitas Negeri Semarang, 2016

Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial (Bandung: Rafika Aditama), 2006

Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Theressia, Aprillia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

https://aldisyar.weebly.com/pembangunan-berbasis-masyarakat.html

Cleary, Dervla, Pari Baunmann, Marta Bruno, Ximena Flores and Patrizio Warren. (2003). People-Centred Approaches, A Brief Literature Review and Comparison Types. *LSP Working Paper*, FAO-UN.

Hikmat, Harry. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Korten, D.C. & Sjahrir. (1988) Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soleh, Chabib. (2014). Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan.Bandung: Fokusmedia.

Cleary, Dervla, Pari Baunmann, Marta Bruno, Ximena Flores and Patrizio Warren (2003) *People-Centred Approaches, A Brief Literature Review and Comparison Types. LSP Working Paper*, FAO-UN.

Dasgupta, Aniruddha and Victoria A. Beard (2007) Community Driven Development, Collective Action and Elite Capture in Indonesia, *Community Driven Development in Indonesia, World Bank,* 229-249

Hikmat, Harry (2001) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat.* Bandung: Humaniora Utama Press

Lauer, Robert H. (2003) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soleh, Chabib (2014) *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan.* Bandung: Fokus media.

Syahroni. 2002. Pengertian dasar dan generik tentang perencanaan pembangunan daerah, Jakarta: GTZ SfDM.

MODUL 3: KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Kewirausahaan sosial telah menjadi perhatian publik selama dua dekade terakhir. Di Asia, konsep ini berkembang pesat selama sepuluh tahun belakangan. Dengan berbagai kebutuhan sosial yang kian berkembang, kebijakan yang silih berganti, stagnasi pada status quo, serta lanskap teknologi dan akses informasi, wirausaha sosial bangkit sebagai upaya inovatif dalam menyikapi problematika sosial dewasa ini. Sebagai entitas yang mengawinkan inovasi, aktivisme, keberlanjutan, dan dampak positif, wirausaha sosial menjadi game changers yang sesungguhnya. Wirausaha sosial yang telah sukses berkiprah di Indonesia dan dunia amatlah menginspirasi dan memberikan motivasi bagi masyarakat luas untuk bergabung dalam gerakan kewirausahaan sosial itu sendiri. Semangat para pendiri, disertai dengan komitmen mitra pendukung untuk menciptakan dampak sosial, patut dihargai. Namun, kesabaran, kerja keras, dan kemauan keras dalam menyeimbangkan keberlanjutan dan dampak sosial seringkali terlupakan. Tidak sedikit wirausaha sosial yang harus melalui banyak tantangan dan mendapatkan banyak pelajaran sebelum akhirnya menuai kesuksesan. Menciptakan keseimbangan antara "nurani" untuk menciptakan dampak sosial dan "rasio" dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan tentu tidak mudah. Wirausahawan sosial di berbagai tahapan perkembangannya seringkali menemukan kesulitan ini. Di satu sisi, rencana bisnis yang matang dan realistis untuk dijalankan memang krusial. Namun, model sosial sekaligus teori perubahan yang tepat juga diperlukan untuk dapat meraih dampak sosial yang diinginkan.

Modul 3 ini mendalami kewirausahaan sosial. Kewirausaha sosial juga terbantu oleh jejaring yang terbentuk oleh identifikasi yang tepat atas para pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang turut membantu berjalannya usaha tersebut—bukan hanya berkeinginan untuk berkegiatan sosial, tetapi juga mengembangkan bisnisnya dengan merangkul wirausaha sosial yang ada. Bagi wirausaha sosial yang sedang berada di tahap pertumbuhan awal, menemukan sumber daya yang tepat dalam perjalanan itu amatlah penting. Sama seperti bisnis lain yang baru bertumbuh.

Modul 3 ini diharapkan dapat mendukung wirausaha sosial untuk mengenal berbagai pemangku kepentingan sekaligus sumber daya yang dibutuhkan pada masa-masa awal pengembangan usaha. Modul 3 ini juga menawarkan panduan awal tentang model bisnis yang dapat membantu meraih dampak sosial melalui operasi yang berkelanjutan, sekaligus gambaran atas kesuksesan sebuah wirausaha sosial. Pembaca diharapkan mendapat inspirasi tentang bagaimana wirausaha sosial yang sukses menjalankan operasinya, sebagai panduan untuk mengambil langkah awal dalam mengenal ekosistem wirausaha sosial. Tanpa diragukan, menjalankan wirausaha sosial memberikan tantangan tersendiri dan perasaan bangga itu mewujudkan bangsa ini.

Kegiatan Belajar 1: Konsep Sosiologi dan Manusia Serta Aspek Kultural di Masyarakat Desa

A. Uraian Materi

Social Enterprise di Indonesia memiliki 4 corak utama, yaitu Community Based, Not-for-profit, Hybrid, dan Profit for Benefit. Penjabaran di buku ini tidak untuk menunjukkan tipe mana yang lebih baik, melainkan untuk memberi gambaran praktis kepada pembaca, sehingga pembaca dapat menentukan sendiri tipe mana yang paling sesuai untuk misi dan kegiatan SE-nya.

SOCIAL ENTERPRISE?

Hingga kini belum ada kesepakatan di dunia terkait definisi ataupun kriterianya. Perbedaan tersebut kelihatannya dipengaruhi oleh perbedaan mazhab atau *school of thought* yang dianut, serta karakteristik unik social enterprise di masyarakat yang berbeda-beda. Karena tidak adanya kesepakatan tersebut, akhirnya setiap negara menyusun kriteria dan definisinya masing-masing seperti di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Korea Selatan, dan Thailand. Salah satu tujuan dilakukannya penelitian dan penyusunan buku ini adalah untuk menyusun kriteria dan definisi yang mencerminkan karakteristik social enterprise di Indonesia. Perjalanan kami dimulai dengan melakukan desk research mengumpulkan kriteria-kriteria yang muncul dalam kajian-kajian terkait social enterprise (SE). Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari studi literatur, kami menyusun sebuah interview guide yang menjadi pedoman untuk mewawancarai responden praktisi dan penggiat social enterprise di Indonesia. Draf interview guide tersebut kemudian didiskusikan bersama praktisi dan penggiat SE dalam sebuah forum Focus Group Discussion (FGD). Setelah mendapatkan masukan dari peserta FGD dan melakukan beberapa penyesuaian, tersusunlah sebuah interview guide yang kami gunakan untuk turun ke lapangan. Di dalam interview guide itu sudah ada pertanyaan seputar kriteria SE di Indonesia. Para peserta FGD tersebut sebenarnya juga merupakan narasumber yang kami kunjungi untuk diwawancarai lebih mendalam. Kami mewawancarai 18 orang praktisi social enterprise dan 6 orang dari institusi penggiat sebagai narasumber. Seluruh hasil wawancara itu dianalisis, kemudian hasilnya kembali

didiskusikan dengan praktisi dan penggiat SE yang sudah kami wawancarai sekaligus juga merupakan peserta forum FGD pertama di dalam forum FGD kedua. Setelah melewati masa perenungan hasil wawancara dan hasil diskusi selama FGD yang cukup panjang, akhirnya tersusunlah lima kriteria dasar social enterprise Indonesia (lihat gambar berikut). Kami sebut dengan "kriteria dasar" karena sebuah organisasi baru bisa dikatakan sebagai sebuah social enterprise jika memenuhi kelima kriteria tersebut.

***SOCIAL MISSION/GOAL* (MISI SOSIAL)**

Kriteria pertama dan paling penting yang harus dimiliki oleh sebuah SE adalah misi sosial, yaitu ada masalah sosial yang ingin dituntaskan. Bisa dikatakan bahwa kriteria ini menjadi "the reason and purpose to live" atau motivasi pendirian sekaligus tujuan bagi sebuah organisasi SE untuk terus ada di tengah masyarakat. Meski belum ada definisi dan kriteria SE yang disepakati dalam literatur social enterprise, misi sosial selalu muncul sebagai kriteria utama dalam setiap literatur yang kami temui. Kebanyakan misi sosial terkait dengan kemiskinan/ekonomi. Akan tetapi, ada juga social enterprise yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Greeneration (www.greeneration.org) yang misi sosialnya adalah membantu dunia untuk mencapai green attitude (perilaku hijau) dan green enviroment (konservasi lingkungan), serta perkumpulan Telapak yang misi

sosialnya adalah melakukan transformasi dari praktik illegal logging menuju community logging.

EMPOWERMENT (PEMBERDAYAAN)

Kriteria kedua adalah pemberdayaan. Masyarakat atau komunitas baik yang memiliki masalah sosial secara langsung maupun tidak langsung diedukasi dan didorong untuk ikut membantu diri mereka sendiri dengan terlibat dalam proses penyelesaian masalah sosial tersebut. Hal ini krusial karena masalah sosial yang ada perlu ditangani secara holistik dan menyentuh akar permasalahan. Perubahan perilaku dan transformasi kehidupan masyarakat yang diberdayakan perlu menjadi tujuan akhir. Dengan demikian, penyelesaian masalah sosial dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mandiri oleh masyarakat sendiri. Sebuah SE dapat mulai beranjak dan berfokus memberdayakan masyarakat di daerah lain. Aspek pemberdayaan inilah yang membedakan seorang wirausaha sosial dengan dermawan (filantropis) biasa. Wirausaha sosial mengajarkan cara memancing atau menangkap ikan agar kelak masyarakat bisa mendapatkan ikan sendiri, sedangkan dermawan memberi ikan. Unsur pemberdayaan tidak saja terletak pada target misi sosialnya, tetapi juga bisa dilakukan sebagai bagian dari proses kegiatan sosial dan bisnis sebuah SE sekaligus. Misalnya cerita tentang Aravind Eye Care Hospital (AECH) yang untuk mencapai target sosialnya memberantas kebutaan di India, merekrut perempuan-perempuan muda dari kampung-kampung untuk dididik dan dilatih menjadi tenaga kesehatan di AECH. Di sini jelas terlihat bagaimana AECH melakukan pemberdayaan bagi perempuanperempuan yang merupakan bagian penting dari proses pencapaian target misi sosial sekaligus misi bisnisnya. Tanpa perawat andal, unit komersial AECH tidak akan dirundungi pasien. Dengan modal pendidikan yang mereka peroleh, perempuan-perempuan tersebut mengalami perubahan hidup dan mampu mengubah nasib mereka. Mereka yang terlahir dalam keluarga dan lingkungan yang miskin dan terbelakang, menjadi individu yang memiliki pekerjaan bermartabat dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

TOMS: Sepatu untuk Masa Depan Jutaan Anak Tidak Mampu

Saat ini berkembang satu istilah baru, yaitu Socially Responsible Business or Enterprise (SRE). Istilah ini cukup menambah kebingungan di kalangan gerakan kewirausahaan sosial yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan mengenai definisi dan kriteria SE. Ada yang pernah mendengar merk sepatu TOMS? Atau mungkin memakainya? Berikut adalah kisah TOMS untuk memberi kamu gambaran mengenai perbedaan SRE dengan SE. TOMS: Sepatu untuk Masa Depan Jutaan Anak Tidak Mampu Ide brilian memang sering muncul secara tidak diduga-duga. Setidaknya hal tersebut terjadi pada Blake MyCoskie, seorang wirausaha muda kreatif. Pada usia sekitar 25 tahun ia sudah mengelola usaha di bidang edukasi melalui TV kabel dengan nilai sekitar USD25 juta atau sekitar Rp250 miliar. Semangat kerja keras, kreativitas, dan keberanian Blake sepertinya di atas rata-rata anak muda seusianya. Hal itu juga terlihat dari hobinya berpetualang menjelajahi negara lain dengan cara backpacking, padahal sebenarnya dia seorang miliuner yang sudah pasti mampu berwisata ke luar negeri dengan agen travel dan menginap di hotel berbintang. Ide brilian Blake berawal dari keputusan untuk berlibur ke Argentina dan meninggalkan gemerlap kota Los Angeles, Amerika Serikat, selama beberapa minggu. Saat itu tahun 2006 dan usia Blake hampir 30 tahun. Jiwanya sedang sangat ingin menikmati kehidupan sehari-hari masyarakat Argentina. Jadi, bukannya menikmati keindahan kelas bintang lima yang ditawarkan Argentina, Blake justru menghabiskan waktunya di Argentina dengan menikmati makanan dan minuman rakyat, memakai sepatu alpargata yang umum dipakai masyarakat di sana, dan berkeliling dari desa ke desa. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan relawan asal Amerika Serikat yang bertugas membagikan sepatu kepada anak-anak Argentina yang kurang mampu. Relawan tersebut— melalui organisasinya— mengumpulkan donasi sepatu dan dana untuk menjalankan kegiatan pembagian sepatu tersebut. Relawan itu bercerita bahwa tidak jarang ukuran sepatu yang mereka bawa tidak pas dengan ukuran kaki masyarakat penerima.

Setelah perbincangan itu, Blake melanjutkan perjalanannya dengan perhatian yang lebih terhadap kaki-kaki masyarakat miskin Argentina. Ia menyaksikan sendiri bahwa banyak sekali yang tidak memakai sepatu. Wajah kemiskinan tampak nyata baginya setelah melihat kaki anak-anak di sana banyak yang mengalami memar, lecet, bahkan

infeksi. Pengalaman tersebut terus membayanginya. Mungkin karena semiskin-miskinnya warga Amerika Serikat, pasti masih mampu mempunyai sepatu. Orang bijak bilang, “life starts at thirty” atau hidup dimulai pada usia 30. Mungkin itulah yang dialami Blake. Walaupun sudah menjadi miliuner, Blake ingin merasakan hidup yang lebih bermakna, yaitu dengan membantu orang lain. Pada masa liburannya di Argentina, ia tidak bisa berhenti berpikir soal bagaimana membantu anak-anak tersebut melalui sepatu. Walau di hati kecilnya ada suara berbisik, “Hei, Blake, kamu sekarang sedang liburan, jangan terlalu serius berpikir”, ia tidak mampu menahan diri. Otaknya terus berputar memikirkan cara yang mandiri dan berkelanjutan untuk membantu anak-anak di dunia yang belum memiliki sepatu. Contoh penyajian dampak sosial dalam rangka menjawab kritik dan menunjukkan pengembangan operasi TOMS menuju “beyond one for one”.
Sumber: http://www.toms.com/production

Jiwa kewirausahaan membuatnya tidak ingin membantu seperti cara relawan yang ia temui, yang harus bergantung pada donasi. Ketergantungan seperti itu bisa menjadikan misi sosial terhenti jika para donatur berhenti menyumbang atau memindahkan sumbangannya untuk mendukung kegiatan lain. Setelah berpikir cukup keras, akhirnya Blake berhasil memanggil ide briliannya, yaitu mendirikan usaha sepatu dengan model bisnis one for one, yaitu untuk setiap pasang sepatu yang terjual, ia akan memberikan sepasang sepatu untuk anak-anak yang kurang beruntung. Tidak ada persentase, tidak ada pula formula alokasi dana sosial tertentu. Hanya ada komitmen membagikan sepasang sepatu untuk setiap pasang yang terjual. Satu untuk satu, sederhana. Usaha tersebut ia beri nama Shoes for Better Tomorrow atau Tomorrow’s Shows sehingga merek utama yang diangkat pun menjadi TOMS. Tak pakai menunggu, Blake menggunakan sisa masa liburannya untuk mencari mitra usaha yang dapat membantunya memproduksi sepatu. Blake ingin memproduksi sepatu seperti sepatu alpargata khas masyarakat Argentina, namun dimodifikasi agar lebih gaya, kuat, dan nyaman dipakai. Blake ingin membawa contoh sepatu ketika ia pulang ke Los Angeles untuk segera dipakai dan ditunjukkan kepada banyak orang sehingga ia bisa mengamati respons pasarnya. Sebuah ide tidak mungkin disebut brilian jika tidak berhasil mencuri perhatian pasar. Sepatu alpargata versi TOMS disukai banyak orang sehingga Blake berani meneruskan

idenya dengan memproduksi lebih banyak sepatu di Argentina. Sebagai pendiri dan pemilik, Blake juga sangat rajin mempromosikan sepatunya. Salah satunya dengan memakai sepatu TOMS yang berbeda warna untuk mencuri perhatian orang agar bertanya atau mengingatkan dia soal sepatunya yang salah pasangan. Dengan demikian, ia memiliki kesempatan untuk menjawab sekaligus menceritakan misi TOMS dan sejarah munculnya ide usahanya. Strategi tersebut ternyata cukup berhasil. Blake mempelajari bahwa melalui cerita atau brand story yang kuat, ia tidak hanya dapat menggaet pembeli tetapi juga pendukung (supporter). Pendukung inilah yang rajin menceritakan kembali kisah dan misi TOMS. Para pendukung itu mungkin saja ada yang bekerja di majalah atau memiliki teman yang bekerja di majalah. Hal ini terlihat dari fakta bahwa hanya dalam hitungan bulan, kisah TOMS sudah diangkat oleh beberapa majalah terkemuka seperti Vogue, Elle, Los Angeles Times, Time, O, dan People. Cerita tentang TOMS merebak layaknya virus. Tak lama kemudian, beberapa artis papan atas seperti Scarlett Johansson, Tobey Maguire, dan Keira Knightley terlihat berjalan-jalan dengan TOMS. Tak heran, pada tahun yang sama Blake berhasil mencapai target awal penjualannya yaitu 10.000 sepatu. Sesuai janjinya, ia segera mengatur rencana dan melaksanakan misinya untuk membagikan 10.000 sepatu TOMS pertama untuk anak-anak yang belum beruntung di Argentina.

Perjalanan membagikan sepatu perdananya diselesaikan selama 10 hari dengan berkeliling ke sekolah-sekolah, klinik, dan pusat-pusat perkumpulan masyarakat. Anak-anak dan bahkan orang-orang dewasa di sana tampak begitu bahagia dengan sepatu baru yang dibagikan. Ada anak-anak yang melompat-lompat kegirangan, ada pula yang menghampiri Blake untuk memeluk sebagai ungkapan terima kasih. Dari pengalaman berbagi sepatu perdana tersebut, Blake baru memahami bahwa seseorang dapat menjadi sangat bahagia hanya karena sepasang sepatu. Ia juga menyadari betapa membuat orang lain bahagia dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi dirinya sendiri. Bisa memberi membuat Blake merasa hidupnya lebih bermakna. Ia tak pernah merasa dirinya seutuh hari itu. Ia menjadi sadar soal apa tujuan hidupnya. Ia ingin dapat terus memberi karena memberi membuatnya merasa utuh sebagai manusia. Jadi, ya, di usia 30 tahun Blake menemukan tujuan hidupnya dan sejak itu hariharinya terasa lebih bergairah. Sekembalinya di Los Angeles, Blake langsung menghubungi mitra bisnisnya di usaha

edukasi menyetir mobil melalui saluran TV kabel yang masih dimilikinya. Blake meminta agar seluruh sahamnya dibeli karena ia ingin berfokus di TOMS.

Bagi Blake, TOMS bukan sekadar bisnis seperti bisnis bisnis lain yang pernah dimilikinya. TOMS dapat menjadi wadah Blake mengekspresikan dan mengaktualisasikan sisi profesional (wirausaha), personal, dan dermawannya. Buah dari kerja kreatif yang dilaksanakan dengan berfokus memang sering berbuah manis. Seperti TOMS. Dalam waktu sekitar delapan tahun perkembangannya, TOMS sudah tersebar secara global melalui lebih dari 500 gerai, sudah membagikan lebih dari 35 juta sepatu baru bagi anak-anak kurang mampu di lebih dari 40 negara, dan sudah memiliki varian baru yang juga dikembangkan dengan model one for one, yaitu TOMS eyewear dan TOMS coffee. Melalui TOMS eyewear kini TOMS sudah membantu mengembalikan penglihatan bagi lebih dari 250.000 orang. Sepertinya Blake sudah kecanduan memberi sehingga ia tidak tahu kapan akan berhenti. Perjalanan TOMS tampak berjalan mulus, namun bukan berarti bebas kritik. Beberapa aktivis dan akademisi memberi kritik tajam dengan mengatakan bahwa aksi memberi TOMS hanyalah suatu gimmick dalam strategi pemasaran produkproduk TOMS. Blake dianggap belum menyentuh akar masalah kemiskinan berupa rendahnya tingkat pendapatan karena TOMS hanya memberikan sepatu dan tidak ada proses pemberdayaan lain yang bersifat life transforming bagi masyarakat yang menerima sepatu. Hal inilah yang membuat beberapa pengamat dan akademisi memandang TOMS bukanlah social enterprise. Ada yang mengatakan bahwa TOMS adalah contoh dari caring capitalism, ada juga yang mengatakan TOMS sebagai socially responsible business, ada juga yang menyebut for profit business with philantropic component. Reaksi Blake atas kritik tersebut cukup di luar dugaan. Walaupun pada awalnya sempat tersinggung, setelah merenungkan substansi dari kritik tersebut Blake mengaku bahwa kritik tersebut ada benarnya. Jika ingin benar-benar membantu menanggulangi masalah kemiskinan, kontribusi yang benar-benar dibutuhkan adalah penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pada tahun 2015 TOMS direncanakan akan membangun pabrik sepatu di negara-negara utama yang menjadi target lokasi pembagian sepatu, dimulai dari Kenya, kemudian disusul dengan Ethiopia dan Haiti. Sebagai pemilik, Blake kini telah menjual 50% sahamnya kepada sebuah perusahaan modal ventura bernama Bain Capital dengan nilai transaksi USD300 juta atau sekitar Rp3,6 triliun! Blake

tetap menjadi Direktur Utama TOMS (dengan nama jabatan di kartu namanya adalah Chief Shoe Giver) sehingga misi TOMS terjaga. Pada saat yang sama, dengan kekayaan pribadi yang meningkat tajam tersebut, Blake ingin menambah kontribusinya untuk mendukung inisiatif-inisiatif bisnis yang memiliki tujuan sosial melalui "Start something that matter fund". Sementara itu, organisasi Friends of TOMS tetap ada untuk mengelola relawan yang berminat membantu TOMS membagikan dan memasangkan sepatu kepada anak-anak di berbagai negara berkembang.

-@@@-

***ETHICAL BUSINESS PRINCIPLES* (PRINSIP BISNIS YANG SESUAI DENGAN ETIKA)**

Sebuah SE harus menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya, yang otomatis juga berarti untuk mendukung perluasan dampak sosialnya. Walaupun misalnya sebuah SE tidak memiliki orientasi laba dan mengandalkan donasi untuk mendanai kegiatannya, jika SE tersebut tidak mengamalkan prinsip-prinsip bisnis yang baik, para donatur mungkin kehilangan kepercayaan dan memilih untuk memberikan donasi pada lembaga lain. Perlu pula digarisbawahi bahwa prinsip bisnis yang dianut SE bukanlah untuk memaksimalkan profit, melainkan untuk memaksimalkan benefit atau manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat. Empat prinsip bisnis yang harus diamalkan oleh sebuah SE adalah ethical, responsible, accountable, dan transparent (ERAT). Ethical Etika bisnis (business ethics) dalam suatu organisasi dideskripsikan sebagai suatu nilai/ norma yang memengaruhi persepsi benar/salah terkait perilaku dalam hubungan antara anggota, karyawan, pimpinan, mitra kerja, pelanggan, dan masyarakat. Etika bersifat lebih universal daripada hukum karena seseorang bisa saja berperilaku tidak etis tanpa melanggar hukum. Misalnya, jika seorang pimpinan tidak mau mendengarkan berbagai masukan dari karyawan untuk kebaikan organisasi, pimpinan tersebut tidak melanggar hukum apa pun. Namun, dalam kacamata SE pimpinan tersebut telah berperilaku tidak etis karena sudah tidak memandang penting masukan dari karyawannya. (Socially) Responsible Tanggung jawab sosial (social responsibility) adalah konsep di mana suatu organisasi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan seperti konsumen, anggota/karyawan, komunitas, dan

lingkungan dalam segala aspek operasional organisasi yang mencakup proses pemilihan bahan baku, proses produksi, pengelolaan SDM, sampai proses distribusi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Tanggung jawab ini bisa bersifat pasif (meminimalkan perilaku yang merusak) dan aktif (melakukan aktivitas yang secara langsung menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan).

Accountable

Dalam tata kelola organisasi, akuntabilitas (accountability) dideskripsikan sebagai sebuah hubungan pertanggungjawaban. Misalnya A bertanggung jawab kepada B, artinya A berkewajiban memberikan informasi terkait keputusan dan tindakan yang dilakukannya, memberikan justifikasi, dan menanggung konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Akuntabilitas ini terkait erat dengan sistem akuntansi atau pencatatan keuangan sesuai dengan kaidah akuntasi yang benar. Selain itu, akuntabilitas juga mencakup pengelolaan organisasi secara jujur dan profesional, tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok, dan tidak mudah diintervensi pihak lain yang dapat merusak profesionalismenya.

Transparent

Transparansi (transparency) dalam pengelolaan organisasi menyangkut keterbukaan, kejelasan, dan akurasi informasi untuk para stakeholder terkait, khususnya dalam hal kondisi keuangan, kepemilikan, dan pelaksanaan manajemen organisasi. Keempat aspek ERAT ini sangat esensial bagi social enterprise demi membangun kepercayaan masyarakat (social trust) yang merupakan modal sosial yang menjadi sumber daya kunci bagi kegiatan social enterprise. Mengapa? Hal ini karena social entrepreneurs atau wirausaha sosial harus memperkenalkan perubahan struktural kepada masyarakat melalui edukasi. Masyarakat diajak untuk mengubah hal-hal (kurang baik) yang biasa mereka lakukan. Jika wirausaha sosial tidak menunjukkan perilaku etis, bertanggung jawab, dan amanah (akuntabilitas dan transparansi), bagaimana mungkin ia akan sukses mengajak dan memberdayakan masyarakat untuk berubah? Selain itu, mengingat bahwa motivasi pembangunan SE adalah untuk menyelesaikan masalah sosial, sangatlah penting bagi organisasi untuk beraktivitas dan berperilaku dengan menjunjung tinggi empat aspek ERAT tersebut. Jika tidak, bisa diibaratkan seperti orang yang bersedekah tapi dengan

uang rampokan, atau bisa dikatakan kegiatannya hanya dilakukan untuk tujuan pencitraan. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik juga.

SOCIAL IMPACT (DAMPAK SOSIAL)

Sebuah SE berawal dari niat mulia untuk membantu sesama secara mandiri dan berkelanjutan melalui kegiatan bisnis. Jadi, sangat jelas terlihat bahwa yang memotivasi SE berbisnis adalah misi sosialnya. Oleh karena itu, sebuah organisasi baru bisa dikatakan sebagai SE hanya jika mayoritas surplus/profit yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya diinvestasikan kembali dalam rangka memperbesar dampak sosial dari misi tersebut. Dalam konteks SE, dampak sosial juga merupakan suatu tujuan yang perlu ditargetkan, selain target-target bisnis pada umumnya seperti target penjualan atau target pertumbuhan laba. Jadi, bukan hanya indikator pencapaian bisnis yang perlu dimiliki oleh SE, tetapi juga indikator pencapaian dampak sosial. Keduanya sama pentingnya untuk dimonitor secara periodik dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Dampak sosial dapat diperbesar melalui dua cara. Pertama, memanfaatkan surplus untuk ekspansi ini bisnis sekaligus menjangkau lebih banyak konsumen (consumers) yang juga merupakan individu penerima manfaat (beneficiaries). Misalnya RUMA (www.ruma.co.id) yang salah satu kegiatannya adalah menjaring pengusaha mikro dan para pemimpin komunitas di Indonesia serta memberikan mereka akses ke layanan berbasis teknologi yang dapat memberdayakan komunitas di sekitar mereka untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, melalui ekspansi usaha RUMA dapat menjangkau lebih banyak usaha mikro yang diberdayakan melalui edukasi perencanaan keuangan dengan teknologi sehingga pada akhirnya tercipta dampak sosial yang lebih besar. Sejak pendirian hingga saat ini, Misalnya RUMA (www.ruma.co.id) yang kegiatan utamanya adalah memperkenalkan teknologi bagi pengusaha mikro agar dapat menjalankan usahanya dengan lebih efisien, sehingga konsumennya sama dengan pemanfaat pemberdayaannya.

Cara kedua adalah memanfaatkan surplus untuk ekspansi lini kegiatan sosial yang tidak berhubungan dengan kegiatan bisnisnya. Hal ini berlaku bagi SE yang konsumennya berbeda dengan penerima manfaatnya. Contohnya Nara Kreatif (www.narakreatif.co.id) yang berbisnis dengan menjual produk-produk kertas daur ulang dan memiliki unit sosial

yang berfokus mendidik anak-anak jalanan untuk mendapatkan ijazah Paket A, B, dan C. Untuk konteks ini, ekspansi usaha tidak serta-merta berarti ekspansi dampak. Jika Nara Kreatif melakukan ekspansi usaha produk daur ulangnya sehingga memperoleh omzet dan laba usaha yang lebih besar, perlu ada komitmen untuk secara rutin mengalokasikan sebagian laba usaha tersebut guna mendanai unit sosial SE-nya. Selama komitmen itu ada misalnya 20% laba usaha setiap tahun akan digunakan untuk pendidikan anak jalanan maka investasi kembali laba usaha untuk ekspansi usaha secara tidak langsung dapat memacu ekspansi dampak sosial. Jika tidak ada komitmen tersebut, penanaman kembali sebagian besar laba usaha untuk ekspansi usaha belum tentu bertujuan memperluas dampak, sehingga belum memenuhi kriteria dasar SE di aspek dampak sosial. Menurut literatur, khususnya mazhab yang dianut Inggris, sebuah organisasi dikatakan SE hanya jika sebagian besar (≥51%) dari surplus/ profitnya diinvestasikan kembali ke misi sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meski sebagian besar praktisi dan penggiat setuju bahwa surplus/profit harus diinvestasikan kembali ke misi sosial, namun mereka tidak setuju dengan persentase 51% karena dinilai terlalu berat dan melemahkan keberlanjutan organisasi SE. Hal ini karena tipe SE bermacam-macam. Seperti dua contoh di atas, RUMA dan Nara Kreatif saja sudah berbeda jika dilihat dari sisi segmen pengguna atau konsumennya. Untuk konteks RUMA, ekspansi bisnis sama dengan ekspansi dampak sosial sehingga batas 51% tersebut tidak terasa berat. Dalam kenyataannya, mereka bahkan menginvestasikan kembali 100% laba untuk ekspansi dampak. Namun, untuk SE seperti Nara Kreatif, 51% bisa sangat memberatkan dan dapat mengancam keberlanjutan lini bisnisnya, yang otomatis juga akan mengancam lini sosialnya. Kami meyakini bahwa niat, motivasi, dan komitmen terhadap misi sosial merupakan hal yang harus diapresiasi. Oleh karena itu, bagi SE dengan tipe seperti Nara Kreatif, indikator proporsi laba yang dialokasikan untuk misi sosial tidak perlu dipaksakan minimal 51% tetapi dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing SE.

SUSTAINABILITY (ORIENTASI BERKELANJUTAN)

Sebuah organisasi baru bisa disebut sebagai SE jika organisasi tersebut berorientasi jangka panjang atau berkelanjutan. Artinya, jika kegiatannya sebatas proyek

atau program yang dijalankan selama beberapa tahun saja, maka organisasi tersebut bukanlah SE.

Aspek keberlanjutan (sustainability) mencakup dua hal yaitu keberlanjutan organisasi dan keberlanjutan finansial. Yang kami maksud keberlanjutan organisasi adalah organisasi tetap terus berdiri dan berjalan secara mandiri tanpa bergantung pada tokoh pendirinya. Artinya, sebuah SE perlu memiliki perencanaan sumber daya manusia yang disertai dengan mekanisme kaderisasinya. Mekanisme kaderisasi tidak harus bersifat formal, tapi bisa juga bersifat nonformal. Yang penting, jangan sampai SE berhenti beroperasi hanya karena pendirinya sudah tidak bisa lagi secara langsung memimpin SE tersebut.

Terkait dengan keberlanjutan finansial, kalau SE bersifat nonprofit maka idealnya organisasi tersebut memiliki fanbase berupa daftar donatur setia yang senang menyalurkan dana bantuannya melalui SE tersebut. SE nonprofit yang mengamalkan prinsip bisnis ERAT umumnya mempertahankan fan-base ini dengan secara rutin mengirimkan laporan perkembangan kegiatan kepada masing-masing donatur. SE nonprofit juga dapat mulai mendirikan unit bisnis untuk mendukung keberlanjutan kegiatannya. Contohnya adalah perkumpulan Telapak yang nonprofit namun memiliki kafe, stasiun TV, dan unit bisnis lainnya yang menghasilkan laba untuk mendukung kegiatan Telapak yang nonprofit. Model Yayasan Bina Swadaya juga seperti ini. Untuk SE yang bersifat forprofit, organisasi harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan laba untuk memaksimalkan benefit atau manfaat yang dapat diberikan sehingga dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar lagi. Selain itu, pimpinan organisasi sebaiknya bersedia membuka informasi terkait besaran margin laba dan bagaimana organisasi memanfaatkan laba. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Kampung Kearifan Indonesia (KKI) yang selalu terbuka dengan petani terkait margin keuntungan perdagangan yang ditargetkan oleh KKI.

GAMBARAN OPERASIONAL SOCIAL ENTERPRISE: KANVAS MODEL BISNIS

Lima kriteria SE yang sudah dibahas di atas diharapkan dapat membantu kita dalam mengembangkan ide menjadi suatu konsep organisasi berupa social enterprise (SE). Seperti yang sudah dibahas di bagian food for thought tentang model bisnis tadi,

metode perancangan model bisnis yang digunakan di dalam buku ini adalah Kanvas Model Bisnis (KMB) atau Business Model Canvas ala Osterwalder dan Oigneur (2012). Metode ini menggunakan kata “kanvas” karena keseluruhan operasional suatu organisasi bisnis dapat dituangkan ke dalam selembar kertas yang dapat dianggap seperti kanvas lukisan. Selain itu, bagi kamu yang ingin membangun usaha apalagi social enterprise mengimajinasikan diri kamu sedang melukis di atas kanvas dalam membayangkan model bisnis mungkin bisa membantu proses kreatif dan membuat proses perancangan terasa lebih menyenangkan.

SEKILAS TENTANG KONSEP KANVAS MODEL BISNIS KMB menjadi suatu metode yang cukup populer saat ini karena membuat kita dapat membayangkan bagaimana suatu organisasi akan beroperasi secara keseluruhan di kehidupan nyata hanya dengan melihat selembar kertas. “Simplicity is the ultimate sophistication,” demikian kata Leonardo da Vinci. Kira-kira seperti itulah hebatnya KMB. Ia dapat menyajikan suatu proses atau mekanisme yang banyak dan mungkin kompleks, hanya ke dalam selembar kertas. Selain itu, KMB juga dapat digunakan sebagai kerangka acuan diskusi model bisnis sehingga diskusi dapat berjalan lebih fokus, terarah, efisien, dan sangat merangsang inovasi. Metode KMB ini menganalogikan organisasi sebagai suatu bangunan yang terdiri dari sembilan unsur utama yang saling terkait.

Kesembilan unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- **Customer segment** atau segmen pengguna layanan/ produk, adalah segmentasi masyarakat atau pasar yang akan ditargetkan menjadi penerima manfaat atas layanan atau produk yang ditawarkan oleh sebuah organisasi usaha (konsumen). Sebuah organisasi bisa memiliki lebih dari satu segmen pengguna atau segmen konsumen. Untuk konteks SE, segmen pengguna tidak hanya terdiri dari konsumen, tetapi juga penerima manfaat program pemberdayaan yang dilakukan SE (beneficiaries). Ada SE yang beroperasi dengan segmen pengguna konsumen sama dengan segmen pengguna penerima manfaat, ada pula yang berbeda.

- **Value preposition** atau tawaran nilai, adalah bentuk keinginan atau kebutuhan masyarakat yang akan dilayani melalui produk/jasanya. Semakin unik atau khas sebuah tawaran nilai, semakin baik. Dapat dikatakan, value preposition adalah manfaat yang terkandung di dalam suatu produk atau jasa tertentu. Untuk konteks SE, tawaran nilai ini tidak terbatas pada nilai yang terkandung dalam produk/layanannya, namun juga mencakup visi dan misi sosial yang ingin dicapai oleh SE melalui suatu proses pemberdayaan. Hal ini karena produk/layanan yang ditawarkan SE bukanlah bentuk tawaran nilai utama yang ingin disampaikan oleh SE kepada segmen penggunanya. Tawaran nilai utamanya adalah misi atau perubahan sosial tertentu, sedangkan produk/ layanan adalah sarana atau alat untuk mencapai misi tersebut. Dengan social value preposition (tawaran nilai sosial yang tepat), SE akan dapat memperdalam peran konsumennya menjadi supporter. Konsumen akan terus membeli produk/layanan SE bukan hanya karena kualitasnya baik, namun juga karena konsumen ingin agar SE tersebut dapat terus melaksanakan misi sosial dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Secara generik ada dua jenis socialvalue preposition SE di Indonesia, yaitu memberdayakan diri sendiri bersama kelompok (self-empowerment) dan memberdayakan orang lain (people empowerment).
- **Channels** atau kanal distribusi, adalah soal bagaimana tawaran nilai yang terkandung di dalam produk/layanan disediakan sehingga bisa dinikmati segmen pengguna, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Bagian ini mencakup proses komunikasi dengan segmen pengguna, distribusi, dan saluran penjualan. Untuk aspek ini, secara umum tidak ada perbedaan antara SE dan organisasi bisnis biasa.
- **Customer relationship** atau hubungan dengan segmen pengguna, adalah bagaimana suatu organisasi menjaga hubungan baik dengan masing-masing segmen penggunanya.
- **Revenue stream** atau arus penerimaan, adalah sumber dan arus pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing kelompok segmen pelanggan yang menjadi target layanan. Arus penerimaan merupakan akibat dari value preposition organisasi yang efektif sehingga dapat diterima dan dinikmati oleh segmen pengguna. Untuk konteks SE, arus penerimaan ini tidak terbatas pada pendapatan bisnis saja. Dengan adanya misi sosial sebagai value preposition, revenue stream SE bisa lebih beragam. SE dapat mendanai kegiatannya dari tiga jenis sumber dana, yaitu dana komersial (pendapatan

bisnis, pinjaman atau penanaman modal skema komersial), semikomersial (iuran, penanaman modal atau pinjaman lunak, non-devident investment, dan lain-lain), dan sosial (hibah, donasi, sedekah, hadial lomba, dan lain-lain).

- **Key resources** atau sumber daya kunci, adalah sumber daya utama yang diperlukan untuk dapat memberikan tawaran nilai kepada segmen pengguna; atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan produk /layanan yang akan ditawarkan kepada segmen pengguna. Untuk konteks SE, bagian ini juga memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dari segi sumber daya manusia. Beberapa SE perlu mengandalkan relawan, sedangkan di organisasi bisnis biasa tidak ada relawan. Selain itu, ciri lain yang berlaku untuk semua jenis SE adalah adalah intangible key resources berupa value dan trust.
- **Key activities** atau kegiatan kunci, adalah aktivitas atau proses kunci yang dilakukan terhadap sumber daya yang ada agar dapat memberikan tawaran nilai atau untuk menghasilkan produk /jasa kepada segmen pengguna.
- **Key partnership** atau rekanan kunci, adalah beberapa mitra kunci yang dapat memasok salah satu sumber daya, atau yang dapat mendukung proses pelaksanaan kegiatankegiatan kunci. Dengan adanya rekanan kunci ini, tidak semua kegiatan utama perlu dilakukan sendiri. Bagi SE, membangun jaringan rekanan kunci menjadi lebih penting karena dapat mempercepat proses perubahan sosial yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya jaringan rekanan, pada umumnya SE bisa menekan struktur biasanya karena beberapa kegiatan kunci dapat dilakukan bersama dalam skema cost-sharing atau voluntary.
- **Cost structure** atau struktur biaya, adalah keseluruhan struktur dan rincian biaya yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan tawaran nilai kepada segmen pengguna. Untuk konteks SE, kami memandang ada dua unsur utama lain yang membentuk bangunan SE. Orientasi target pengembangan organisasi, merupakan target pengembangan cakupan atau skala kegiatan organisasi. Dari analisis hasil wawancara dan diskusi kami, ada SE yang target pengembangannya berfokus pada orientasi keberlanjutan saja (sustainability oriented). Artinya, menargetkan agar SE terus ada, tidak perlu lebih besar skalanya atau lebih luas cakupan kegiatan atau area operasionalnya. Kasarnya, selamanya hanya

beroperasi dengan cakupan tingkat kecamatan tidak apa-apa, yang penting masalah sosial masyarakat dapat terus dibantu oleh SE secara berkelanjutan. Ada pula SE yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengembangan kegiatan (sustainable development oriented). SE jenis ini memiliki target agar cakupan kegiatannya dalam hal jenis kegiatan, jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau penerima manfaat dapat terus berkembang walau tidak mesti disertai dengan perkembangan skala usahanya. Misalnya, SE jenis ini berfokus mengembangkan organisasinya dengan memperluas jejaring dan rekanan kunci sehingga organisasi dapat melakukan lebih banyak kegiatan (contoh: pelatihan) tanpa mengelola lebih banyak dana karena pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan meminjam ruangan secara gratis dari rekanan kunci, makanan dan minuman bisa disediakan karena mendapatkan sumbangan, dan tenaga kunci lainnya seperti pelatih, moderator, dan fasilitator semuanya merupakan relawan.

Terakhir adalah SE yang target pengembangannya berorientasi pada pengembangan kegiatan dan skala usaha (sustainable development and growth). SE jenis ini ingin mengembangkan cakupan kegiatannya dengan turut menargetkan perkembangan skala bisnis atau unit bisnisnya. SE tipe ini umumnya ingin memperluas dampak sosial dengan mengandalkan kekuatan organisasi mereka sendiri sehingga penting bagi mereka untuk mengembangkan skala bisnis.

Skema kepemilikan dan kontrol. Seperti yang sudah disinggung, ada wirausaha sosial di Indonesia yang memandang kepemilikan SE harus bersifat terbuka bagi orang atau lembaga lain dengan visi yang sama, sehingga kekuatan kontrol organisasi tidak akan tidak mesti disertai dengan perkembangan skala usahanya. Misalnya, SE jenis ini berfokus mengembangkan organisasinya dengan memperluas jejaring dan rekanan kunci sehingga organisasi dapat melakukan lebih banyak kegiatan (contoh: pelatihan) tanpa mengelola lebih banyak dana karena pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan meminjam ruangan secara gratis dari rekanan kunci, makanan dan minuman bisa disediakan karena mendapatkan sumbangan, dan tenaga kunci lainnya seperti pelatih, moderator, dan fasilitator semuanya merupakan relawan. Terakhir adalah SE yang target pengembangannya berorientasi pada pengembangan kegiatan berpusat pada satu atau sedikit sosok pemilik saja (kepemilikan kolektif).

Hal ini dipandang penting untuk menjaga agar organisasi tidak berkembang ke arah yang melenceng dari visi awal (mission drift). Jika kepemilikan terpusat pada satu orang pemilik, SE berisiko besar mengalami pembelokan arah pengembangan apabila pemilik tersebut dalam perjalanannya berubah pikiran. Di sisi lain, ada yang berpandangan bahwa kepemilikan kolektif tidak efisien dan mengandung risiko mission drift yang berasal dari luar individu pendiri atau pemilik awal. Pada beberapa kasus, keberadaan satu sosok pendiri yang dapat berperan sebagai kapten dan memiliki wewenang untuk memimpin organisasi secara lebih otoriter adalah faktor utama yang menjaga pengembangan organisasi agar tidak melenceng dari visi awal. Dengan pola ini pun proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, untuk unsur skema kepemilikan dan kontrol ini kami membagi SE ke dalam dua jenis skema, yaitu kepemilikan kolektif dan kontrol demokratis, serta individual dan otoriter.

Seluruh unsur di atas merupakan hal-hal dasar yang perlu diidentifikasi secara jelas oleh setiap organisasi usaha yang ingin tumbuh kuat. Intisari dari unsur dasar di atas dapat disajikan ke dalam selembar kertas atau kanvas. Melalui satu lembar kanvas model bisnis tersebut, sebuah organisasi usaha dapat menyusun suatu hipotesis perencanaan operasional ke depan dan mengevaluasi koherensi setiap langkah bisnis yang telah dilakukan dengan rencana tersebut. Yang terpenting, kanvas model bisnis dapat secara rasional menjelaskan bagaimana sebuah organisasi usaha menciptakan, menawarkan, dan menyediakan tawaran nilainya kepada konsumen yang akhirnya akan berakibat pada kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan pendapatan.

Untuk lebih jelas soal kerangka KMB, silakan lihat contoh di link ini: https://www.youtube.com/watch?v= wlKP-BaC0jA. Disitu KMB digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan maskapai murah (budget airlines) beroperasi sehingga bisa menawarkan harga yang sangat murah kepada konsumen, namun tetap mampu menghasilkan laba yang cukup menggiurkan. Gambar berikut juga menunjukkan bentuk standar KMB. Namun, untuk konteks ini bentuk KMB akan ditambah dengan satu blok mengenai target pengembangan organisasi di bagian atas kanvas, dan satu blok mengenai kepemilikan dan kontrol di bagian bawah kanvas.

Bentuk standar Kanvas Model Bisnis

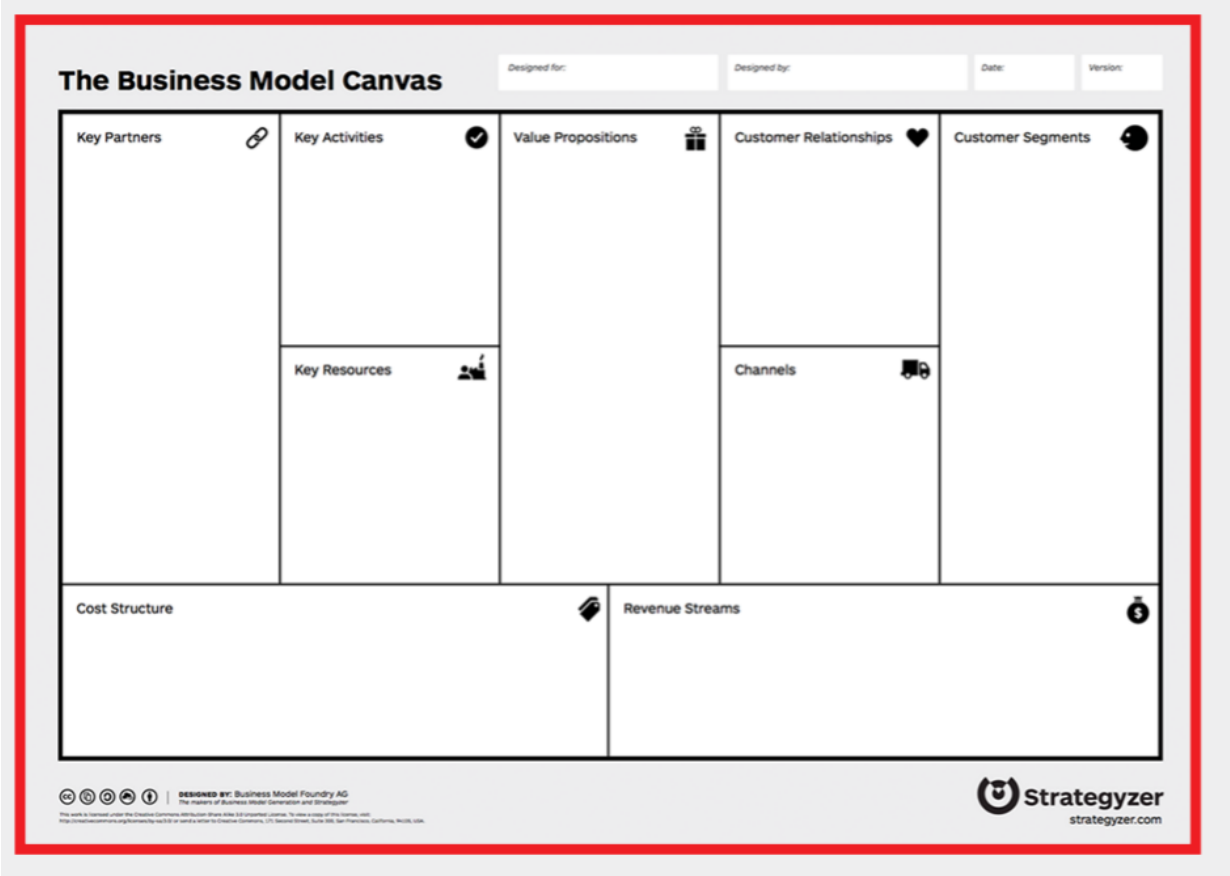

B. Latihan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran mengenai konsep dan model bisnis social enterprice, anda diminta menjelaskan kembali dan berikan contohnya!

C. Rangkuman

Pemikiran tentang konsep dan model bisnis social enterprice merupakan kegiatan usaha yang memiliki misi menyelesaikan masalah sosial lewat pemberdayaan dengan dampak terukur. Bisnis sosial sudah menjadi bidang usaha yang cukup terkenal dengan tujuan mulianya, yaitu membantu menyejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentu, untuk menjalankannya tidak seperti halnya wirausaha biasa. Salah satu alasannya karena bisnis sosial berlandaskan pada masalah sosial yang ada.

Sesuai dengan konsepnya, bisnis sosial berbasis masyarakat atau *community-based social enterprise* memiliki konsentrasi pada kebutuhan komunitasnya sendiri. Jika organisasi pada umumnya memiliki struktur yang terasa kaku, Anda akan lebih merasa

dekat secara personal layaknya keluarga pada bisnis sosial yang satu ini karena pemberdayaannya yang bersifat *self-empowerment* yang memiliki tujuan bisnis untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Not-for Profit Social Enterprise

Berbeda dari yang sebelumnya, tipe bisnis sosial yang kedua ini fokusnya ditujukan kepada pemberdayaan masyarakat. Bagaimana tidak? Motivasi dari pendirian wirausaha jenis ini berangkat dari kepedulian demi mengatasi suatu masalah dalam masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih luas. Tentu, hal ini menuntut organisasi untuk menciptakan transformasi yang nyata pada masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dengan tenaga kerja yang kompeten dalam mengelola bisnis sosial jenis ini.

Hybrid Social Enterprise

Bagi seorang wirausahawan yang cinta keselarasan dalam masyarakat, mungkin yang satu ini dapat menjadi pilihan. Pada bisnis sosial ini, orientasi memang ditargetkan pada kesinambungan dan pengembangan atau *sustainable development*. Tapi bukan itu saja, sumber dana yang digunakan untuk mendukung bisnis sosial campuran ini juga lebih beragam dan cenderung seimbang, mulai dari dana sosial, semikomersial, hingga komersial.

Profit-for Benefit Social Enterprise

Satu lagi bisnis sosial dengan ciri khas target organisasi paling luas. Mengapa luas? Karena tiga elemen penargetannya, yaitu kelancaran, pembangunan, dan pertumbuhan menjadi dasar agar organisasi dapat menjadi sepenuhnya mandiri tanpa memiliki ketergantungan terhadap individu atau lembaga donatur. Tak heran, skala bisnis wirausaha ini terbilang besar. Salah satu contohnya, PT KKI atau Kampung Kearifan Indonesia yang memiliki aktivitas berhubungan dengan dua bagian pengguna. Keduanya adalah petani lokal yang menanam produk pangan organik asli Indonesia dan masyarakat kelas menengah atas yang sadar akan gaya hidup sehat untuk mengkonsumsi makanan alami sebagai konsumen.

D. Tes Formatif 1

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Berikut merupakan contoh sosial enterprice, kecuali ….
   A. Koperasi Mufakat
   B. Tambang Batubara
   C. Toms Sepatu
   D. Dana Sosial
   E. Kampung Kearifan Indonesia
2. Berikut adalah metode dari kanvas model bisnis, kecuali …
   A. Customer Segment
   B. Value Preposition
   C. Customer Relationship
   D. Revenue
   E. Customer Preparation
3. Salah satu ciri – ciri sosial enterprice, yaitu …
   A. Peduli Terhadap Masyarakat untuk memajukan ekonomi
   B. Laba Profit untuk Pribadi
   C. Keuntungan untuk Pribadi
   D. Rukun
   E. Semuanya Benar
4. Berikut menurpakan prinsip dari sosial enterprice, kecuali …
   A. Ethnical
   B. Responsible
   C. Accuntable
   D. Transparant
   E. Tertutup
5. Berikut merupakan konsep bisnis sosial, kecuali …
   A. community-based social enterprise
   B. Profit for individuals
   C. Not-for Profit Social Enterprise
   D. Hybrid Social Enterprise
   E. Profit-for Benefit Social Enterprise

Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1. B
2. E
3. A
4. E
5. B

Daftar Pustaka

DBS Foundation, (2015) Menjadi Wirausaha Sosial, Universitas Indonesia

Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2014). Organizational transparency: a new perspective on managing trust in organization stakeholder relationships. Journal of Management .

Soepardi, H. S. (2015, 03 12). Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Pengembangan Wirausaha. Retrieved 03 30, 2015, from Antaranews.com: http://www.antaranews.com

Spreckley, F. (2008). Social Audit Toolkit (Fourth Edition). St. Oswalds Barn: Local Livelihoods.

World Economic Forum. (2013-2014). Global Competitiveness Report. World Economic Forum. YCAB Memberikan Solusi Masalah Narkoba Hingga Pemberdayaan Ekonomi. (n.d.). Retrieved 0